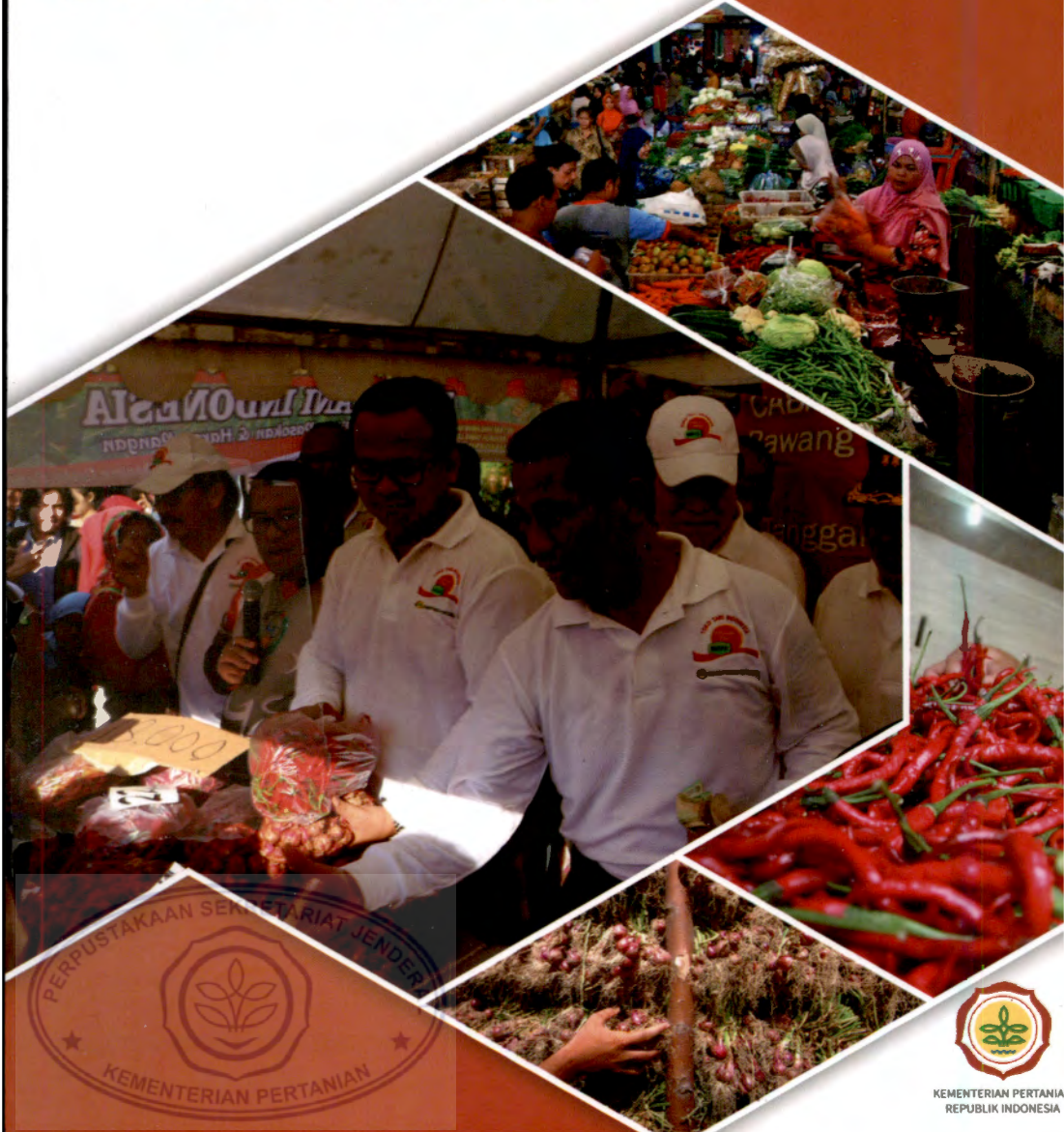


Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, dkk

MENYANGGA PANGAN JAKARTA



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN



633

Kecenderungan penduduk memilih tinggal di kota besar telah menjadi gejala yang alamiah. Saat ini lebih dari setengah penduduk dunia berdomisili di kota, dan tahun 2050 diperkirakan akan meningkat menjadi 70%. Artinya, tiga perempat penduduk bumi akan tinggal di kota-kota, hanya seperempat yang di desa. Demikian pula di Indonesia, pada tahun 2015 jumlah penduduk kota telah mencapai 53,3%, dan tahun 2035 diperkirakan meningkat menjadi 66,6%.

Maka, menjadi penting memikirkan bagaimana memenuhi pangan untuk penduduk kota. Tahun 2001, FAO telah meluncurkan sebuah inisiatif global di bawah label *"Food for the Cities"*. Atas dasar ini pula, sangat beralasan mengapa tema Hari Pangan Sedunia tahun 2017 adalah *"Change the future of migration. Invest in food security and rural development"*. Kita harus berinvestasi di pedesaan, membangun pertanian, demi menahan penduduk desa agar tidak terus-menerus bermigrasi ke kota.

Dari sisi pangan, penduduk kota akan menentukan bagaimana pola konsumsi dunia di masa mendatang. Warga kota merupakan kalangan kelas menengah (*middle class*) suatu negara. Mereka membentuk kantong-kantong konsumen pangan yang besar. Namun, mereka tidak mandiri dalam pangan, mereka perlu disuplai dari luar. Di kota tidak ada lahan yang cukup untuk bertanam padi, sayur, dan menggembala ternak.

Warga kota yang besar namun tidak memproduksi pangan sendiri adalah sebuah peluang pasar. Atas dasar paradigma *market driven*, kita perlu menyusun sistem agribisnis yang sesuai.

Satu karakter konsumen kota besar yang merupakan kelompok *economy high class* ini adalah pembentuk selera (*food consumption trends and drivers*) masyarakat. Mereka membutuhkan bahan pangan dan pangan olahan yang terus berubah dari waktu ke waktu.

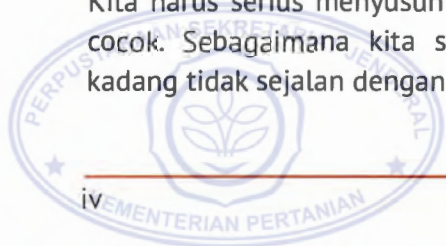
Beberapa isu penting pola konsumsi diciptakan mulai dari penduduk kota kalangan atas. Konsep pangan sehat, pangan fungsional, vegetarian, *organic food*, dan *green food*, adalah beberapa contoh pola konsumsi yang diciptakan penduduk kota, lalu menyebar ke berbagai kalangan.

Secara tradisional kebutuhan pangan Jakarta telah dipenuhi dari daerah-daerah sekitarnya. Kegiatan ini terpusat pada beberapa pasar induk produk pertanian yang ada di wilayah Jakarta atau wilayah penyangga sekitar Jakarta.

Ketersediaan bahan pangan ini sangat tergantung dari peran para pedagang dan pelaku usaha lainnya, yang mendatangkan bahan pangan dari berbagai lokasi. Secara faktual, kebutuhan pangan tidak hanya dipenuhi dari wilayah yang langsung berbatasan dengan Jakarta, seperti Jawa Barat, Banten dan Lampung, tetapi juga dipenuhi dari wilayah lainnya, seperti Jawa Timur, bahkan hingga NTT dan Sulawesi.

Selain sebagai konsumen, kota besar ternyata juga berperan sebagai rantai perdagangan yang penting. Terutama, menjadi titik sebar yang potensial untuk pemasaran komoditas pertanian. Beberapa komoditas pangan diserap lalu dibagi lagi ke wilayah lain. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa pergerakan bahan pangan tidak selalu berakhir di Jakarta. Beberapa bahan pangan seperti beras dan produk hortikultura hanya transit di Jakarta sebelum dikirim lagi ke daerah lainnya.

Memenuhi pangan kota besar membutuhkan sistem yang andal. Kita harus serius menyusun bagaimana *supply chain management* yang cocok. Sebagaimana kita sudah mafhum, corak permintaan pangan kadang tidak sejalan dengan sistem produksinya.



Produksi pangan sangat bergantung kepada sumber alam, utamanya pembatas-pembatas geografis dan iklim. Di pihak sebaliknya, konsumen membutuhkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pangan yang sering tidak peduli bagaimana ditanam, dipelihara, dan dipanen. Dengan dua perbedaan situasi antara permintaan dan penawaran ini, akan ada masa produksi berlebih dan masa lain produksi langka. Kedua kondisi ini akan berpengaruh terhadap perilaku harga produk. Terlebih bila penanganan kelebihan stok tidak dapat dilakukan dengan baik.

Produk pangan umumnya bersifat *bulky* dan cepat rusak sehingga penanganan dalam perjalanan dari wilayah produksi ke Jakarta sangat menentukan kualitas barang yang diterima konsumen Jakarta. Biaya transportasi menjadi tidak murah, sehingga menyebabkan harga per satuan produk di wilayah tujuan akan menjadi mahal. Saat ini banyak produk hortikultura, terutama sayuran dan buah, terbuang setelah sampai di Jakarta, karena sudah tidak layak konsumsi, akibat penanganan dalam perjalanan yang belum optimal.

Kementerian Pertanian telah mengembangkan berbagai skema untuk mengatasi persoalan tersebut. Saya telah melontarkan konsep pengembangan wilayah penyangga untuk memenuhi kebutuhan Jakarta. Karena kondisi sumber daya alam, beberapa pangan harus diproduksi di titik yang jauh dari Jakarta. Sapi misalnya, saat ini masih mengandalkan Nusa Tenggara Timur.

Ke depan, kebutuhan pangan pokok masyarakat kota Jakarta akan dipenuhi dari 10 kabupaten yang berbatasan dengan kota Jakarta. Yakni, Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Karawang. Untuk itu Kementerian Pertanian bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Untuk penyediaan lahan, Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perhutani. Dalam penyediaan pembiayaan akan dijalin kerja sama dengan bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Lalu untuk penyerapan hasil produksi petani, Kementerian Pertanian bersinergi dengan BULOG dan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT). Ini merupakan solusi permanen untuk Jakarta agar harga pangan tidak mengalami fluktuasi.

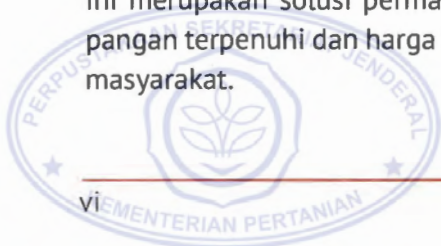
Secara konsep kerja sama antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah pendukungnya atau wilayah penyangga (*seat-belt area*) telah banyak dikembangkan di banyak negara. Konsep ini merupakan konsep *integrasi fungsional* yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai pusat pertumbuhan, karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan suatu wilayah memiliki hierarki. Konsep *center-periphery* yang diintegrasikan secara fungsional agar terjadi ikatan yang kuat ke depan maupun ke belakang dari suatu proses produksi merupakan pengembangan dari konsep ini.

Mengapa kebutuhan pangan Jakarta perlu diamankan. Alasan pertama, adalah karena sebagai pusat perhatian publik. Sorotan media yang gencar menjadi ancaman psikologis bagi bangsa ini. Besarnya peran pasar Jakarta atau Jabodetabek tidak saja dalam artian fisik, yang bagian terbesar dari orientasi penjualan beragam produk tertuju ke wilayah ini. Namun secara psikologis, dinamika pasar Jakarta berpengaruh terhadap pasar produk di berbagai wilayah lain. Karena itu, tidak salah banyak pihak menyatakan bahwa pasar Jakarta itu adalah pasar Indonesia.

Faktanya, aspek psikologis mengintervensi hukum *supply demand*, sehingga teori klasik diragukan keabsahannya oleh banyak pihak. Harga bisa naik bukan hanya karena pasokan turun. Seperti sering terjadi saat Lebaran Idul Fitri.

Buku ini baru bicara Jakarta. Namun, ini hanya langkah awal. Dengan belajar dari pola Jakarta, kita akan kembangkan bagaimana memenuhi pangan untuk semua kota-kota besar lain, semisal Surabaya, Makassar, Bandung, dan Medan.

Buku “Menyangga Pangan Jakarta!” ini hanya sebuah model. Ke depan, kota-kota besar di Indonesia dapat meniru pendekatan ini, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, bagaimana menyediakan pangan untuk Surabaya dengan murah, cepat, berkualitas dan berkelanjutan akan berbeda dengan di Medan dan Makassar. Ini merupakan solusi permanen untuk Jakarta agar kebutuhan pasokan pangan terpenuhi dan harga tidak mengalami fluktuasi yang menyulitkan masyarakat.



Buku ini dipersembahkan kepada seluruh pihak. Diharapkan buku ini akan menjadi inspirasi bagi pengembangan wilayah lainnya. Bahkan lebih dari itu, juga untuk memandu upaya pembangunan pertanian berbasis wilayah. Secara konsep, hal ini telah berkali-kali diulas dalam rencana strategis Kementerian Pertanian. Namun dalam tataran implementasi masih terbatas. Melalui penulisan buku ini diharapkan akan membuka cakrawala yang lebih luas dari para perencana dan pelaku pembangunan tentang konsep ini

Jakarta, Oktober 2017

Menteri Pertanian



Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP



KATA PENGANTAR

Sebuah Konsep Keterkaitan Pangan Kota Besar dan Wilayah Penyangga, merupakan suatu upaya yang sistematis dalam memublikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam pembangunan pertanian di negara ini. Banyak pihak yang terkadang mempertanyakan dasar akademis dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, salah satu maksud penulisan serial buku ini adalah untuk menjawab hal tersebut. Di tengah kesibukannya, Menteri Pertanian dalam berbagai kesempatan memberikan dasar pemikiran pokok bagi suatu kebijakan. Hal itu bahkan harus disampaikan berulang kali dalam beberapa kesempatan. Buku ini juga dimaksudkan mendokumentasikan semua hal tersebut dan menyusunnya dalam suatu alur yang sistematis.

Belajar dari pengalaman terdahulu, kita sering abai dalam mendokumentasikan berbagai program, kegiatan, atau kebijakan. Kadang, hal itu baru disadari pada akhir program sehingga upaya pendokumentasian menjadi tidak optimal. Bapak Amran Sulaiman sangat menyadari hal itu sehingga inisiatif penulisan serial buku ini merupakan salah satu dari berbagai ide cerdas Beliau dalam menggerakkan pembangunan pertanian di negeri ini.

Kami sadar tentu penulisan buku ini belum sepenuhnya dapat menggambarkan secara detail semua yang direncanakan dan dilaksanakan. Meski demikian, masyarakat umum yang membaca buku ini setidaknya mendapatkan gambaran yang utuh dari suatu program,

kegiatan, atau kebijakan dalam kerangka pembangunan pertanian nasional. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi jembatan yang menjadi rujukan Kementerian atau Lembaga terkait dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian. Hal yang terakhir ini menjadi penting. Di tengah berbagai percepatan pembangunan pertanian yang digagas Bapak Menteri Pertanian, dukungan dari Kementerian dan Lembaga lainnya menjadi krusial untuk mencapai hasil yang optimal dari suatu program, kegiatan, dan kebijakan.

Terkait dengan penulisan *Buku Menyangga Pangan Jakarta! Sebuah Konsep Keterkaitan Pangan Kota Besar dan Wilayah Penyangga*, dukungan dari seluruh komponen yang ada di Kementerian Pertanian sangat diapresiasi.

Demikian pula kepada para penulis dan tim pendukung yang telah membantu menuangkannya sehingga menjadi pemikiran yang utuh dalam buku ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan.

Semoga buku ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, yang pada akhirnya akan menggerakkan kita semua untuk mendukung berbagai upaya percepatan pembangunan pertanian yang terus digulirkan Kementerian Pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian



Ir. Hari Priyono, M. Si



DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
PROLOG	1
Gagasan Awal Pengembangan Wilayah Penyangga Jakarta... 2	
Kenapa Kebutuhan Pangan Jakarta Perlu Diamankan..... 8	
Bekerja sama untuk Membangun dan Maju Bersama 10	
Kenapa Buku ini Ditulis 11	
BAB I KONSEPSI MENYANGGA PANGAN KOTA BESAR	13
Apa dan Kenapa Kota Besar?..... 14	
Pangan untuk Masyarakat Kota dan Pertanian Perkotaan 18	
Keterkaitan Kota dengan Wilayah Sekitarnya 24	
Dari Konsep Berkelanjutan ke Kota Logistik..... 27	
BAB II POLITIK PANGAN JAKARTA	33
Kebijakan Pasar Pangan di Jakarta 40	
Anomali Pasar dan Intervensi 42	
Mafia dan Kartel 43	



BAB III	KEBUTUHAN DAN SUMBER PANGAN JAKARTA	47
	Kebutuhan Pangan DKI Jakarta.....	48
	Sumber Pangan Jakarta	52
	Distribusi Pangan dan Kesenjangan Harga	62
	Jakarta Sebagai Pemasok Pangan?	71
BAB IV	PERAN STRATEGIS WILAYAH PENYANGGA PANGAN JAKARTA	73
	Kemampuan DKI Jakarta Memproduksi Pangan	76
	Upaya Penyediaan Pangan oleh Pemda DKI Jakarta.....	85
	Peran Kementerian Pertanian Selama Ini	93
	Peran Strategis Wilayah Penyangga Pangan DKI Jakarta	95
BAB V	RELASI JAKARTA DENGAN WILAYAH SEKITARNYA YANG SALING MENGUNTUNGAN	99
	Keterkaitan Pasar Jakarta dengan Pasar-Pasar Sekitarnya	100
	Komoditas Beras	100
	Komoditas Gula Pasir.....	102
	Komoditas Minyak Goreng.....	106
	Komoditas Daging Sapi	110
	Komoditas Daging Ayam	112
	Komoditas Telur Ayam.....	113
	Komoditas Cabai dan Bawang Merah.....	114
	Komoditas Buah-Buahan.....	114
	Margin Tata Niaga Komoditas Pangan ke Jakarta	116
	Kemampuan Wilayah Sekitar Jakarta	120
	Sosok Petani Jakarta	123
	Komunitas Berkebun, Petani Modern Harapan Jakarta	128
	Berharap pada Potensi Wilayah Sekitar Jakarta	130
BAB VI	INVESTASI DAN KELEMBAGAAN	133
	Investasi Pengembangan Wilayah Penyangga Mendukung Pangan Jakarta	135
	Kelembagaan untuk Mendorong Kesinergian Jakarta dengan Wilayah Penyangga.....	141
	Kebijakan Integratif.....	148



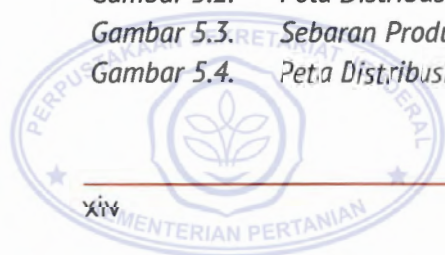
Pendekatan Partisipatif	150
Manajemen Rantai Pasok.....	150
EPILOG	153
Jakarta harus Pro aktif.....	154
Model untuk Direplikasi	155
UCAPAN TERIMA KASIH	157
DAFTAR BACAAN	158



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Sebaran Kebutuhan Pangan Masyarakat di DKI Jakarta, 2016 (BPS DKI Jakarta, 2016 diolah)	48
Gambar 3.2.	Perkiraan Jumlah Kebutuhan Pangan Menurut Bulan Masyarakat DKI Tahun 2017 (BKP, 2017).....	51
Gambar 3.3.	Perkiraan Komposisi Jumlah Kebutuhan Menurut Jenis Pangan Masyarakat DKI Jakarta Tahun 2017 (BKP, 2017) .	52
Gambar 3.4.	Tingkat ketergantungan Provinsi DKI terhadap sejumlah jenis pangan yang didatangkan dari daerah lain tahun 2016 (Dinas Perdagangan DKI Jakarta, 2017 diolah)	54
Gambar 3.5.	Peta distribusi perdagangan jagung pipilan di DKI Jakarta (BPS 2015b)	57
Gambar 3.6.	Dinamika pasokan beras di PIBC tahun 2014-2017 (PIBC diolah BKP 2017).....	58
Gambar 3.7.	Pasokan bawang merah melalui Pasar Induk Kramat Jati Januari 2016 - Mei 2017 (PIK diolah BKP).....	59
Gambar 3.8.	Pasokan cabai melalui Pasar Induk Kramat Jati Januari 2016 - Mei 2017 (PIK diolah BKP).....	59
Gambar 3.9.	Pola distribusi perdagangan beras di DKI Jakarta (BPS 2016a).....	63

Gambar 3.10.	<i>Peta distribusi perdagangan beras di Provinsi DKI Jakarta (BPS 2016a)</i>	65
Gambar 3.11.	<i>Perkembangan harga beras premium di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten periode Maret – Mei 2017 (Panel Harga Harian BKP, 2017)</i>	68
Gambar 3.12.	<i>Rata-rata rasio MPP komoditas jagung pipilan tingkat nasional dan provinsi (BPS 2015b)</i>	70
Gambar 3.13.	<i>Peta distribusi perdagangan beras di Provinsi Kepulauan Riau (a) dan Bangka Belitung (b) (BPS 2016a)</i>	72
Gambar 4. 1.	<i>Rataan Sebaran Produksi Padi di Indonesia, 2010-2015 ..</i>	78
Gambar 4.2.	<i>Perkembangan Ketersediaan beras produksi sendiri di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lainnya, 2010-2015 (kg beras/kap/th)</i>	79
Gambar 4.3.	<i>Rataan Sebaran Populasi Sapi di Indonesia, 2010-2016 ..</i>	80
Gambar 4.4.	<i>Rataan Sebaran Populasi Sapi di Indonesia, 2010-2016 ..</i>	81
Gambar 4.5.	<i>Perkembangan Ketersediaan Daging Sapi Dari Pematangan Sendiri di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lainnya, 2010-2016 (kg/kap/th)</i>	83
Gambar 4.6.	<i>Rataan Sebaran Produksi Daging Ayam di Indonesia, 2010-2016</i>	84
Gambar 4.7.	<i>Perkembangan Ketersediaan Daging Ayam Dari Pematangan Sendiri di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lainnya, 2010-2016 (kg/kap/tahun)</i>	85
Gambar 4.8	<i>Perkembangan Luas Lahan Sawah (LS), Lahan Non Sawah (LNS) di Provinsi DKI Jakarta, 2010-2015</i>	86
Gambar 4.9.	<i>Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan beserta Kontribusinya (%), Maret 2016</i>	89
Gambar 4.10.	<i>Peran Strategis Daerah Penyangga Pangan terhadap Stabilisasi Ketersediaan dan Harga Pangan bagi Masyarakat Kota</i>	96
Gambar 5.1.	<i>Peta Distribusi Perdagangan Beras di DKI Jakarta</i>	101
Gambar 5.2.	<i>Pola Distribusi Perdagangan Beras di DKI Jakarta</i>	102
Gambar 5.3.	<i>Sebaran Produksi Tebu di Indonesia</i>	103
Gambar 5.4.	<i>Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi: DKI</i>	



	<i>Jakarta</i>	104
Gambar 5.5.	<i>Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DKI Jakarta</i>	106
Gambar 5.6.	<i>Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta</i>	107
Gambar 5.7.	<i>Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta</i>	108
Gambar 5.8.	<i>Pola Distribusi Penjualan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta</i>	109
Gambar 5.9.	<i>Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta</i>	109
Gambar 6.1.	<i>Perkembangan Jumlah Proyek Investasi</i>	136
Gambar 6.2.	<i>Perkembangan Nilai Investasi</i>	137
Gambar 6.3.	<i>Kebijakan Mendukung Penyediaan Pangan bagi Jakarta</i>	146
Gambar 6.4.	<i>Sistem Operasional Pemenuhan Pangan Jakarta</i>	148
Gambar 6.5.	<i>Program Pemenuhan Kebutuhan Pangan Jakarta</i>	151

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	<i>Perkiraan Kebutuhan Menurut Jenis Pangan dan Bulan Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2017.....</i>	50
Tabel 3.2.	<i>Kondisi luas lahan pertanian (ha) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016.....</i>	54
Tabel 3.3.	<i>Provinsi-provinsi di Indonesia yang memasok pangan utama ke DKI Jakarta.....</i>	56
Tabel 3.4.	<i>Pola utama distribusi perdagangan sejumlah komoditas pangan di DKI</i>	64
Tabel 3.5.	<i>Rata-rata rasio margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) komoditas strategis di DKI Jakarta dan rata-rata nasional</i>	69
Tabel 3.6.	<i>Rata-rata rasio MPP sejumlah komoditas di DKI Jakarta menurut kategori pedagang.....</i>	71
Tabel 4.1.	<i>Status DKI Jakarta Dalam Membudidayakan dan Memproduksi Pangan Strategis, 2016.....</i>	77
Tabel 4.2.	<i>Perkembangan Produksi Padi di Sentra Provinsi Produksi dan DKI Jakarta di Indonesia, 2010-2015 (Ton)</i>	78
Tabel 4.5.	<i>Perkembangan Produksi Daging Sapi (Pemotongan Sapi) di Sentra Provinsi Produksi Daging Sapi dan DKI Jakarta di Indonesia, 2010-2016 (Ton).....</i>	82
Tabel 4.5.	<i>Perkembangan Produksi Daging Ayam di Sentra Provinsi Produksi Daging Sapi dan DKI Jakarta di Indonesia, 2010-2016 (Ton).....</i>	84
Tabel 4.7.	<i>Kontribusi Makanan dan Nonmakanan dalam Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta, 2015-2016.....</i>	88
Tabel 5.1.	<i>Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sayuran di Provinsi DKI Jakarta, 2015</i>	114
Tabel 5.2.	<i>Jumlah Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor di Wilayah DKI Jakarta.....</i>	125

PROLOG



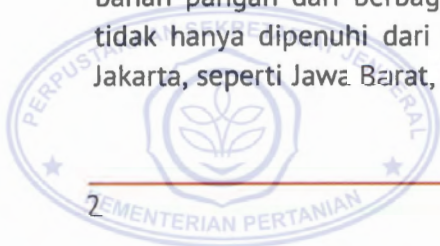
Apakah ada kegiatan pertanian di wilayah Ibukota negara kita Jakarta? Secara kasat mata kita masih dapat menemui beberapa aktivitas pertanian di seantero wilayah Jakarta. Baik itu yang diusahakan di lahan yang memang untuk pertanian, maupun pada lahan terlantar yang ditanami aneka tanaman. Data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Sensus Pertanian tahun 2013 menyebutkan, jumlah rumah tangga usaha pertanian (petani) di ibu kota mencapai 12.287 rumah tangga. Mereka disebut petani, karena melakukan kegiatan pertanian dengan motif usaha atau sebagai sumber penghidupan, bukan hanya sekedar hobi atau kesenangan belaka.

Keberadaan petani di ibu kota tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Jumlah petani di ketiga wilayah ini mencapai 9.096 petani atau sekitar 74% dari seluruh petani di ibu kota. Aktivitas pertanian yang banyak dilakukan petani di ibu kota adalah budidaya tanaman hortikultura yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat serta peternakan, dan perikanan.

Dengan jumlah petani yang hanya 12.287 rumah tangga atau hanya 0,46% dari rumah tangga yang ada di Jakarta, serta lahan yang terbatas, sudah dapat dipastikan kegiatan pertanian ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Jakarta. Karen itu, ketergantungan Jakarta terhadap wilayah sekitarnya jelas sangat tinggi.

Gagasan Awal Pengembangan Wilayah Penyangga Jakarta

Secara tradisional kebutuhan pangan Jakarta telah dipenuhi daerah-daerah sekitarnya. Kegiatan ini terpusat pada beberapa pasar induk produk pertanian yang ada di wilayah Jakarta atau wilayah penyangga sekitar Jakarta. Ketersediaan bahan pangan ini sangat tergantung dari peran para pedagang dan pelaku usaha lainnya, yang mendatangkan bahan pangan dari berbagai lokasi. Secara faktual kebutuhan pangan tidak hanya dipenuhi dari wilayah yang langsung berbatasan dengan Jakarta, seperti Jawa Barat, Banten dan Lampung. Namun juga dipenuhi



dari wilayah lainnya seperti Jawa Timur, malahan ada yang dari NTT dan Sulawesi.

Pergerakan bahan pangan ini ke Jakarta tentunya didorong karena adanya perbedaan harga antara wilayah produsen dan harga di tingkat konsumen di Jakarta. Pedagang akan mengirimkan barangnya ke Jakarta, bila selisih harga konsumen dan produsen dan dikurangi ongkos transportasi serta biaya lainnya, masih menyisakan margin bagi pedagang.

Pertanyaannya, apakah pola dan perilaku pergerakannya sesederhana itu? Tentu tidak, banyak hal lain yang mempengaruhi pola pergerakan bahan pangan dari dan ke Jakarta. Beberapa penelitian mikro yang dilakukan banyak pihak memperlihatkan bahwa pergerakan bahan pangan tidak selalu berakhir di Jakarta. Beberapa bahan pangan seperti beras dan produk hortikultura hanya transit di Jakarta sebelum dikirim lagi ke daerah lainnya.

Terkait dengan pengadaan bahan pangan bagi Jakarta ini ada dua hal yang dapat perhatian pemerintah. *Pertama*, masalah kontinuitas dan kuantitas dari bahan pangan. *Kedua*, terkait dengan kualitas. Selain itu ada beberapa perilaku harga yang dianggap sebagai suatu kelumrahan, namun sebenarnya adalah kondisi anomali. Salah satunya selalu terjadi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Idul Fitri, harga naik meski dari sisi pasokan telah tersedia secara memadai.

Kasus minyak goreng dapat menjadi contoh untuk hal ini. Sebagai negara produsen utama kelapa sawit dunia, seharusnya tidak sulit bagi pelaku usaha untuk menyediakan minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat, berapapun jumlahnya. Artinya, dari sisi suplai tidak ada masalah. Sementara saat Idul Fitri, walaupun terjadi peningkatan permintaan hingga dua kali lipat, dapat dengan mudah dipenuhi.

Meski sudah ada jaminan suplai, tapi pada kenyataannya setiap perayaan Idul Fitri harga minyak goreng cenderung akan selalu naik, mengikuti perilaku harga bahan pangan lainnya. Bagi banyak kalangan kondisi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah terjadi saat hari besar keagamaan seperti Idul Fitri tersebut. Kejadian yang sama terus berulang tiap tahun.

Produk pangan umumnya bersifat *bulky* dan cepat rusak. Karena itu, penanganan selama perjalanan dari wilayah produksi ke Jakarta sangat menentukan kualitas barang yang diterima konsumen Jakarta. Kondisi itu membuat biaya transportasi menjadi tidak murah dan menyebabkan harga per satuan produk di wilayah tujuan juga ikut mahal.

Bahkan banyak produk hortikultura, terutama sayuran dan buah, harus terbuang setelah sampai di Jakarta karena sudah tidak layak konsumsi. Ini terjadi karena buruknya penanganan dalam perjalanan. Baik itu karena kurang memadainya sarana transportasi yang dapat menjaga kesegaran produk, juga karena penanganan bongkar muat yang tidak ditangani dengan baik. Semua kondisi ini jelas akan memberatkan konsumen di Jakarta dengan makin sulitnya mendapatkan produk dengan kualitas baik. Jika ada, maka harga yang diterima konsumen sudah sangat tinggi.

Berkaitan dengan kontinuitas dan kuantitas, merupakan persoalan lain yang sering dihadapi masyarakat Jakarta, khususnya terkait pengadaan bahan pangan. Beberapa produk pangan bersifat musiman dengan wilayah produksi yang menyebar, terkadang lintas pulau. Pada sisi lain, kebutuhan masyarakat relatif stabil antar waktu.

Dengan dua perbedaan situasi antara permintaan dan penawaran ini, sudah dapat diperkirakan akan ada masa produksi dianggap berlebih dan ada masa produksi dianggap kurang. Kedua kondisi ini berpengaruh terhadap perilaku harga produk pangan. Apalagi jika penanganan kelebihan stok tidak dapat dilakukan dengan baik, maka saat kelebihan penawaran harga akan cenderung turun, sehingga fluktuasi harga sulit dihindari.

Misalnya kasus jagung. Produksi jagung di Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 17 juta ton, sementara kebutuhan jagung terbesar adalah untuk pakan. Berdasarkan data Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kebutuhan pakan selama tahun 2017 diperkirakan sebesar 17 juta ton atau naik 8% dari tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui 50% bahan baku pakan adalah jagung, sehingga kebutuhan jagung untuk pakan diperkirakan sebesar 8,5 juta ton selama setahun.

Kebutuhan jagung untuk para pengusaha yang tergabung dalam GPMT ini cenderung sama, sementara produksi berfluktuasi tiap bulannya. Karena itu, pemerintah mendorong kalangan pengusaha membangun tempat penyimpanan atau silo. Selain itu, puncak produksi jagung umumnya terjadi pada Februari-April. Pada bulan-bulan ini, curah hujannya masih cukup tinggi, sehingga persoalan pengeringan juga menjadi kendala agar jagung dapat disimpan lama.

Ketersediaan pengering atau *dryer* menjadi menentukan. Berdasarkan data yang ada saat ini, data silo dan pengering masih jauh dari kemampuan produksi petani, sehingga dikhawatirkan akan ada jagung yang tidak dapat ditampung perusahaan yang membutuhkan.

Hal lain terkait jagung ini adalah terpencarnya wilayah produksi, mulai dari NAD, NTT sampai Maluku/Papua. Sentra produksi jagung saat ini ada di Jawa Timur, NTB, Lampung dan beberapa provinsi di Sulawesi. Sementara pabrik pakan terpusat sekitar Jawa Barat dan Banten, mendekati lokasi usaha pengembangan peternakan unggas. Kondisi ini jelas akan menyulitkan untuk mempertemukan kebutuhan pabrik pakan dan produksi petani. Bertitik tolak dari berbagai kondisi tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pada 10 Mei 2017 melontarkan konsep pengembangan wilayah penyangga untuk memenuhi kebutuhan Jakarta. Dimulai dengan pemenuhan kebutuhan jagung.

Lebih lanjut Menteri Pertanian mengungkapkan, kebutuhan pangan pokok masyarakat kota Jakarta dipenuhi dari 10 kabupaten yang berbatasan dengan kota Jakarta. *"Kita harus memanfaatkan daerah perbatasan kota yang memiliki sumber daya dan lahan yang subur, untuk menyangga kebutuhan pangan masyarakat di kota besar,"* kata Menteri melalui keterangan resmi, Rabu 10/5/2017 (Kompas.com, 2017).

Ke-10 kabupaten yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jabodetabek adalah Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang dan Karawang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan jagung bagi Jakarta akan disiapkan lahan 200.000 hingga 300.000 hektar (ha). Untuk itu Kementan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Untuk penyediaan lahan Kementan bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dan BUMN, terutama Perhutani. Selain itu, untuk penyediaan akses pembiayaan atau kredit, akan dijalin kerja sama dengan Bank Mandiri, BTN, BRI dan BNI. Sementara penyerapan hasil produksi petani, Kementan bersinergi dengan Perum BULOG dan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT).

Bila pendekatan yang sama untuk komoditi lainnya seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, maka dapat dipastikan tidak ada impor lagi. Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kebijakan ini adalah solusi permanen untuk Jakarta agar harga pangan tidak mengalami fluktuasi. Balitbang Pertanian telah ditunjuk mengkoordinasikan inisiasi ini.

Pemda Kabupaten/Kota bersama Badan Litbang Pertanian mengidentifikasi dan merancang pembangunan sistem pertanian wilayah penyangga. Lalu mengembangkan sistem bantuan dan subsidi kepada petani agar mampu mencukupi minimal 80% kebutuhan jagung untuk wilayah Jabodetabek dan Banten.

Untuk penyediaan lahan, implementasi pengembangan wilayah penyangga, Kementan bekerja sama dengan Kementerian LHK dan BUMUN, khususnya Perhutani. Di 10 wilayah penyangga pangan DKI Jakarta, terdapat sekitar 1.031.283 ha lahan potensial untuk perluasan areal tanam jagung. Terdiri dari lahan Perhutani seluas 84.376 ha dan lahan non-Perhutani, seperti lahan perkebunan, lahan kering telantar, dan kebun campuran dengan luas 946.907 ha.

Pertanyaannya lagi, apakah yang disampaikan Menteri Pertanian ini sesuatu yang baru? Bila kita runut dari berbagai kebijakan yang ada, gagasan tersebut memang tidak sepenuhnya baru. Hal baru dari gagasan ini adalah penentuan wilayah penyangga pada beberapa kabupaten yang ada di sekitar Jakarta. Selain itu selama ini belum dengan jelas disebutkan komoditi yang dikembangkan, serta upaya penunjang untuk merealisasikan upaya ini. Jadi hal barunya adalah pada upaya segera merealisasikan serta penyediaan perangkat pendukung.



Untuk daerah Jakarta sebelumnya telah diinisiasi kerja sama lintas provinsi antara DKI Jakarta dengan berbagai daerah lainnya. Misalnya, kerja sama pengadaan sapi dengan pemerintah NTT. Pola kerja sama bilateral ini juga dikembangkan dengan berbagai provinsi lainnya. Selain itu kerja sama yang diinisiasi banyak terkait dengan upaya mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta serta persoalan banjir yang kerap menggenangi berbagai wilayah Ibukota.

Secara konsep kerja sama antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah pendukungnya atau wilayah penyangga (*seat-belt area*) telah banyak dikembangkan di banyak negara. Konsep ini merupakan konsep *integrasi fungsional* yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai pusat pertumbuhan, karena adanya fungsi yang komplementer.

Konsep ini menempatkan suatu wilayah memiliki hierarki. Konsep *center-periphery* yang diintegrasikan secara fungsional agar terjadi ikatan yang kuat ke depan maupun ke belakang dari suatu proses produksi merupakan pengembangan dari konsep ini.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumber daya modal dan sumber daya manusia.

Konsep lainnya adalah *Pusat Pertumbuhan* yang menekankan perlunya *investasi* pada suatu wilayah yang memiliki *infrastruktur* yang baik. Hal ini untuk menghemat investasi prasarana dasar. Sementara itu, pengembangan wilayah di sekitarnya diharapkan diperoleh melalui proses tetesan (*trickle down effect*) ke bawah.

Di Indonesia, konsep ini diimplementasikan dalam bentuk *Kawasan Andalan*. Meskipun istilah kawasan andalan tidak sepenuhnya sama dengan konsep pusat pertumbuhan, penentuan kawasan andalan dimaksudkan sebagai kawasan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah sekitarnya.

Secara konsep apa yang dikembangkan di Jakarta saat ini diharapkan akan ditiru daerah-daerah lain yang pola relasinya sama dengan wilayah sekitarnya. Secara konsepsi pengembangan suatu kota dilakukan secara

terintegrasi dengan kota atau wilayah sekitarnya. Implementasi dari konsep ini masih akan diuji dari hasil pelaksanaan program ini nantinya.

Kenapa Kebutuhan Pangan Jakarta Perlu Diamankan

Pasar Jakarta dan kota sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mempunyai peran sangat strategis dalam mempengaruhi perilaku harga beragam produk di Indonesia, termasuk harga komoditas pertanian. Kondisi ini membuat pemerintah selalu memberikan perhatian khusus terhadap pasar Jakarta. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sejak awal memberikan perhatian khusus kepada Jakarta.

Bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, beberapa kali dilakukan inspeksi mendadak ke pasar yang ada di wilayah ini. Selain itu koordinasi dan pertemuan digelar dengan banyak pihak, termasuk dengan pemerintah daerah. Misalnya, pada 15 Agustus 2016, ada pertemuan segitiga antara Gubernur Jakarta dengan Menteri Pertanian dan Perdagangan di Kantor Kementerian Perdagangan. Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa upaya untuk memangkas rantai pemasaran beberapa komoditas pangan utama. Dalam kesepakatan itu diharapkan peran BULOG dapat menyerap langsung hasil petani dan mendistribusikannya langsung di pasar Jakarta (*Detik.com, 2016*).

Besarnya peran pasar Jakarta atau Jabodetabek tidak saja dalam artian fisik yang merupakan bagian terbesar dari orientasi penjualan beragam produk tertuju ke wilayah ini. Namun juga secara psikologis, dinamika pasar Jakarta berpengaruh terhadap pasar produk di berbagai lokasi. Karena itu tidak salah banyak pihak menyatakan pasar Jakarta itu adalah pasar Indonesia.

Besarnya peran pasar Jakarta dan Jabodetabek ini juga terlihat dalam pembentukan inflasi nasional. Sampai saat ini Jakarta dan Jabodetabek memiliki peran yang sangat dominan dalam pembentukan inflasi nasional. Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2002 bobot

Jakarta terhadap inflasi nasional berkisar 27,7%. Lima tahun kemudian berdasarkan SBH 2007 bobot Jakarta masih sekitar 22,5%.

Bila dihitung dalam kaitannya dengan kota-kota sekitarnya, yaitu Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang berdasarkan SBH 2007 bobotnya menjadi 37,65%. Ini berarti porsi Jabodetabek lebih dari sepertiga inflasi nasional. Bila dilihat dari pergerakan inflasi, maka pergerakan inflasi Jakarta mencerminkan pergerakan inflasi nasional. Sebab, arah pergerakan inflasi Jakarta selalu sejalan dengan pergerakan inflasi nasional.

Menurut pola historisnya, rata-rata inflasi Jakarta masih lebih rendah dibandingkan nasional. Kenaikan inflasi nasional selalu diikuti dengan kenaikan inflasi di Jakarta. Sebaliknya jika terjadi penurunan inflasi, maka inflasi kota Jakarta turun lebih tajam dibandingkan nasional. Sementara pergerakan inflasi wilayah Bodetabek untuk kota Bekasi dan Depok relatif berada di bawah rata-rata inflasi nasional, sementara untuk kota Tangerang dan Bogor berada di atas rata-rata inflasi nasional (Bank Indonesia, 2009).

Salah satu pembentuk inflasi terbesar di Indonesia adalah harga bahan makanan atau pangan. Selama tahun 2015-2016 peran bahan makanan dan makanan jadi lebih dari 5% bila dilihat dari inflasi tahunan menurut kelompok pembentuknya. Naik turunnya harga bahan pangan di Indonesia dan masih besarnya kelompok masyarakat yang proporsi pengeluarannya dominan untuk bahan pangan, menempatkan bahan pangan dan makanan jadi sebagai penyumbang yang besar dalam pembentukan inflasi tahunan.

Secara rutin ada dua puncak inflasi tahunan yang biasanya terjadi di Indonesia. Puncak inflasi pertama, periode Desember-Januari. Dengan adanya perayaan Natal dan Tahun Baru, serta tingginya curah hujan yang menyebabkan terganggunya jalur distribusi barang, telah menempatkan harga berbagai komoditi pada posisi yang tinggi pada masa ini. Puncak inflasi kedua terjadi di periode bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri. Saat ini karena Ramadhan dan Idul Fitri juga berbarengan dengan masa liburan, serta tahun ajaran baru, terjadi peningkatan yang signifikan dalam belanja makanan dan barang-barang konsumen lain (seperti tajul, tas dan sepatu).

Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah menargetkan angka inflasi tidak lebih dari 4 persen setahun dengan angka toleransi sebesar 1 persen. Untuk itu, pemerintah menjalankan berbagai program. *Pertama*, menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan infrastruktur logistik pangan, khususnya pergudangan untuk penyimpanan komoditas.

Kedua, membangun sistem data lalu lintas barang, khususnya komoditas pangan. *Ketiga*, penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam stabilitas harga. Dalam bentuk nyata, pemerintah melakukan penguatan kerja sama antar daerah, mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat khususnya untuk cabai dan bawang, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas dan memperbaiki pola tanam pangan (Fajriah, 2017).

Bertitik tolak dengan kenyataan tersebut, yaitu peran Jakarta atau Jabodetabek yang terus dominan dalam percaturan harga berbagai komoditas, serta kuatnya keinginan untuk membuat harga komoditas pembentuk inflasi dalam keadaan stabil, semua pihak terus mencari cara untuk membuat harga di Jakarta dan sekitarnya stabil.

Bekerja sama untuk Membangun dan Maju Bersama

Konsep kerja sama pengembangan wilayah penyangga dengan Jakarta dibangun dengan konsep yang saling menunjang dan membangun. Pembangunan wilayah Jakarta dengan melibatkan pembangunan daerah sekitarnya (*seat-belt area*), diharapkan menghasilkan pemerataan taraf kehidupan, baik di pusat kota maupun di wilayah penyangga.

Konsep ini telah diterapkan dalam pengembangan kerja sama Jakarta dengan beberapa Provinsi seperti NTT (Kompas, 2 September 2017: Sapi NTT Peran Ganda PD Dharma Jaya). Kerja sama dengan NTT yang dirintis sejak dua tahun yang lalu sudah mulai kelihatan hasilnya. Kebutuhan sapi Jakarta secara berkala dapat dipenuhi dari NTT. PD Dharma Jaya bukan perusahaan yang hanya membeli sapi dari NTT lalu menjualnya di Jakarta, tapi membangun industri peternakan terintegrasi

yang melibatkan masyarakat NTT dalam kegiatan pembibitan dan penggemukan. Melalui pola kerja sama ini, tidak saja sapi tersedia saat dibutuhkan namun juga menggairahkan kegiatan ekonomi di NTT.

Pengembangan kegiatan di 10 kabupaten yang digagas Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian akan dilakukan dengan pendekatan yang sama dengan apa yang telah diinisiasi PD. Dharma Jaya di NTT. Pelaksanaannya akan memadukan secara baik berbagai konsep yang ada dengan kondisi spesifik di masing-masing wilayah.

Kenapa Buku ini Ditulis

Buku ini mencoba menerjemahkan ide Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang pengembangan wilayah penyangga Jakarta yang sejalan dengan pengembangan Jakarta. Dimulai dari sisi penyediaan pangan dengan lebih spesifik lagi jagung untuk pakan. Bahasan dalam buku ini akan diawali dengan penelaahan tentang konsepsi penyangga pangan kota besar. Akan diuraikan beberapa pemikiran besar di belakang konsep ini dan varian dalam pengembangannya.

Konsep ini juga diperluas untuk pengembangan wilayah pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya, sedangkan bahasan lainnya akan menelisik tentang politik pangan di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jakarta adalah barometer semua gerak langkah pembangunan nasional, sehingga dinamika yang terjadi di kota ini akan berdampak pada dinamika nasional.

Bahasan pada bagian ini akan menggambarkan bagaimana isu pangan tidak hanya terkait persoalan suplai dan permintaan. Namun juga penuh permainan dalam membangun opini publik terhadap suatu kebijakan, bahkan terkadang bisa menggiring pada prestasi suatu pemerintahan.

Secara mendasar juga akan dilakukan pembahasan tentang kebutuhan pangan Jakarta, ditinjau dari berbagai aspek. Sebagaimana kita ketahui Jakarta merupakan pasar yang sangat beragam dari berbagai hal, sehingga kebutuhannya juga sangat beragam dan dinamis.

Karena itu upaya pemenuhan kebutuhan pangan Jakarta memerlukan penelaahan serta pemahaman terhadap keberagaman ini. Semakin tingginya kesadaran akan makanan yang sehat serta sensitif terhadap isu lingkungan merupakan hal lain yang dipotret pada bagian ini.

Terkait dengan wilayah penyangga, gambaran utuh dari wilayah ini tidak saja terkait dengan kemampuannya memasok pangan Jakarta, tapi juga dinamika penduduknya akan memberikan pemahaman yang utuh tentang konsep wilayah penyangga. Pengembangan wilayah ini tidak melulu persoalan bagaimana membuka kesempatan berusaha. Lebih utama adalah upaya pemberdayaan dalam arti yang sebenarnya, sehingga wilayah ini berkembang seiring sejalan dengan Jakarta. Upaya menata relasi yang saling menguntungkan diharapkan akan membuat konsep pengembangan wilayah penyangga menjadi tidak statis, namun akan penuh dinamika dan berkelanjutan.

Bagaimana menarik investasi serta membangun kelembagaan yang sejalan dengan konsep wilayah pusat pertumbuhan dan wilayah penyangga, merupakan hal lain yang akan dikupas pada bagian akhir buku ini. Peran investasi dan kelembagaan akan sangat menentukan apakah konsep ini dapat membumi serta menjadi model dalam menggerakkan pembangunan secara sinergis di banyak wilayah. Pengalaman dengan pengembangan Jakarta akan jadi bekal yang baik untuk wilayah lainnya yang pola dan pendekatan pengembangannya sama.

Diharapkan dengan penulisan buku ini akan menjadi inspirasi bagi pengembangan wilayah lainnya, dan juga memandu upaya pengembangan pembangunan pertanian berbasis wilayah. Secara konsep hal ini telah berkali-kali diulas dalam rencana strategis Kementerian Pertanian, namun dalam tataran implementasi masih terbatas pengalaman praktis yang ada. Melalui penulisan buku ini diharapkan akan membuka cakrawala yang lebih luas dari para perencana dan pelaku pembangunan tentang konsep ini.



BAB I

KONSEPSI MENYANGGA PANGAN KOTA BESAR



Menilik judul buku ini, ada dua kata kunci: “pangan” dan “Jakarta”. Tentu akan timbul pertanyaan di benak kita, apa yang dimaksud dengan judul tersebut? Sebab, dari judul tersebut tersirat dua makna yang berbeda. Pertama, bisa diartikan buku ini akan banyak berbicara tentang bagaimana menyediakan pangan untuk Jakarta. Sudut pandang ini lebih memperhatikan kepentingan Jakarta sebagai Ibu Kota negara dengan segala keunikannya.

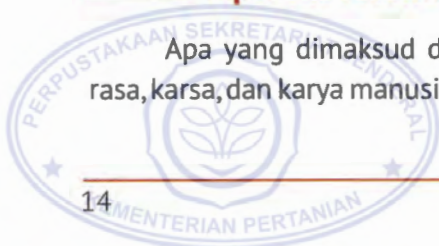
Sudut pandang kedua lebih melihat buku ini memberikan gambaran tentang bagaimana mengambil peluang besar pasar Jakarta untuk dapat menjual beragam produk pangan yang dihasilkan petani. Sudut pandang kedua lebih cenderung kepada kepentingan para produsen pangan di negeri ini. Hal ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian.

Meski mungkin akan banyak terkait dengan sudut pandang yang terakhir ini. Terutama, menjadikan Jakarta sebagai model kerja sama dalam penyediaan pangan bagi pasar yang demikian besar. Bahasan terhadap sudut pandang pertama menjadi sesuatu yang juga perlu dilihat sebagai pedoman bagi semua. Yakni, kepentingan kota besar terhadap pangan bisa jadi tidak sama. Apalagi ada balutan budaya dan lainnya yang khas kota tersebut.

Bahasan dalam bab ini akan banyak berhubungan dengan sudut pandang kedua. Yakni, Jakarta dipandang sebagai pasar besar produk pertanian dari wilayah sekitarnya. Terkait dengan hal itu, banyak teori yang bisa didekati. Mulai dari teori pengembangan wilayah, teori relasi desa-kota, teori urban farming, dan teori logistik. Selain itu juga ada beberapa program rintisan yang telah dikembangkan banyak pihak yang sejalan dengan isu ini. Di antaranya FAO yang merintis “*Food for the Cities Programme*”.

Apa dan Kenapa Kota Besar?

Apa yang dimaksud dengan “kota”? Kota merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Ciri yang paling mudah adalah kota sebagai



tempat yang padat dan dihuni orang yang heterogen. Pengertian kota secara umum adalah tempat bermukim, bekerja, dan kegiatan warga kota, baik itu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Para ahli memberikan pengertian kota sesuai dengan sudut pandang keilmuannya masing-masing.

Menurut SMSAI (*Standard Metropolitan Statistical Area*) USA – Canada, kota adalah tempat yang penduduknya 50.000 jiwa atau gabungan 2 kota dengan total penduduk 50.000 jiwa, dengan 75% penduduknya bekerja di sektor nonpertanian, dan kepadatan penduduknya minimal 375 jiwa per hektare.

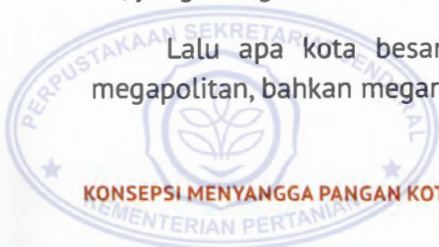
Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kota adalah *“kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”*.

Dalam Kamus Tata Ruang, kota adalah *“pemukiman yang berpenduduk relatif besar, luas area terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, dan kepadatan penduduk relatif tinggi.”*

Pada definisi klasik, kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, terdiri atas kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Namun, pada definisi modern, kota adalah suatu pemukiman yang dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota, tetapi dari suatu fungsi yang menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hierarki tertentu.

Dari kaca mata ekonom, Marx dan Engels menyebut kota sebagai perserikatan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang diperlukan agar masing-masing anggota dapat mempertahankan diri. Perbedaan kota dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dengan materi. Individu-individu terbagi dalam kedua jenis tenaga kerja ini, yang mengakibatkan mereka mengalami alienasi.

Lalu apa kota besar? Kita juga mengenal metropolitan, juga megapolitan, bahkan megaregion. Berikut persamaan dan perbedaannya.



Metropolitan ialah istilah untuk menggambarkan suatu kota yang relatif besar, baik luas wilayahnya, aktivitas ekonomi dan sosial, maupun jumlah penduduknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan dan dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa. Di Indonesia, kota yang tergolong kota metropolitan di antaranya, DKI Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung.

Lalu, *megapolitan* adalah kumpulan pemerintah kota besar dan kota-kota sekitar dalam satu kesatuan geografis yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan dan dikelola dalam satu koordinasi, tanpa menghilangkan kewenangan setiap pemerintah kota (Kuncoro, 2011). Contoh megapolitan adalah Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur). Satu wilayah megapolitan sedikitnya terdiri atas dua wilayah metropolitan, total penduduknya lebih dari 10 juta jiwa, dihubungkan infrastruktur transportasi, dan ada jaringan perkotaan fungsional melalui aliran barang dan jasa.

Terakhir *megaregion*. Istilah ini memang agak baru bagi kita. Di Indonesia belum ada yang disebut *megaregion*. Ia lebih luas dan lebih besar lagi. *Megaregion* adalah gabungan dari beberapa kota metropolitan dan sekaligus gabungan dari kawasan megapolitan. Penghubungnya ada lima kategori, yaitu sistem lingkungan dan topografi, sistem infrastruktur, keterkaitan ekonomi, pola pemukiman dan penggunaan lahan, dan adanya relasi budaya dan sejarah.

Jabodetabek mungkin bisa kita sebut *megaregion*. Begitu juga Gerbang Kertosusila yang merupakan gabungan dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.

Kota besar mendapat perhatian khusus karena memiliki keunikan tersendiri dan merupakan pasar bagi beragam produk, termasuk produk pertanian. Pada banyak kasus, ketercukupan pangan di kota besar akan menggambarkan bagaimana suatu negara memenuhi kebutuhan

rakyatnya. Kepentingan konsumen kota besar yang dapat dengan mudah mengakses ke berbagai media dan pasar kebijakan, sangat berpengaruh terhadap pusat kekuasaan di suatu negara. Sehingga berbagai kebijakan akan bias kepada kepentingan mereka.

Untuk produk pertanian di Indonesia dapat dikatakan selama 50 tahun terakhir, kebijakan produksi pangan lebih condong membela kepentingan konsumen. Kita dapat mengamati dengan saksama betapa ramainya pemberitaan media saat harga suatu komoditi mengalami peningkatan. Bahkan suara publik seakan serentak mengecam para pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap situasi ini.

Demikian juga para pengambil kebijakan dengan berbagai upaya akan meredam kehebohan ini. Namun dalam situasi sebaliknya, katakanlah harga suatu komoditi menjadi murah sekali karena kelebihan penawaran, hanya segelintir pihak yang peduli. Dengan kondisi seperti ini posisi kota besar, seperti Jakarta, menjadi strategis dan perlu diamankan.

Hal lain berkaitan dengan dinamika konsumsi di kota besar akan berpengaruh terhadap pola produksi pangan di suatu negara. Besarnya kesadaran penduduk kota besar terhadap kesehatan dan keamanan pangan telah menempatkan pilihan menu makanan sebagai perhatian yang sangat besar.



Hal ini berpengaruh terhadap jenis dan proses suatu bahan pangan dihasilkan. Karenanya penerapan *good agriculture practices* (GAP) dan standardisasi untuk keamanan pangan menjadi sesuatu yang harus mendapat perhatian para produsen bahan pangan.

Pangan untuk Masyarakat Kota dan Pertanian Perkotaan

Pada awalnya pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di daerah pedesaan. Demikian juga produk pangan yang dihasilkan penduduk di kota maupun yang tinggal di pedesaan. Dalam perkembangannya karena keterbatasan lahan di perkotaan, kegiatan produksi pangan lebih banyak di wilayah pedesaan. Sementara penduduk perkotaan lebih fokus melaksanakan kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan produksi pangan.

Pesatnya kebutuhan lahan untuk berbagai penggunaan di perkotaan, telah menjadikan alokasi lahan antar penggunaan bersaing dengan sangat ketat. Salah satu tinjauan terhadap alokasi lahan antar penggunaan dilihat dari konsep *land rent*. Hasil analisis ekonomi sewa lahan (*land rent economics*) menunjukkan bahwa rasio *land rent* perumahan dan industri jauh lebih baik daripada usaha tani (Jamal, 2006).

Persoalannya, penilaian *land rent* hanya dari nilai riil suatu lahan. Namun, nilai yang terkait dengan fungsi lahan atau multifungsi lahan sering terabaikan. Dalam kondisi penilaian hanya dari nilai riil lahan, menyebabkan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian akan kalah bersaing dengan penggunaan lain yang secara riil memberikan keuntungan ekonomi lebih tinggi. Dalam kondisi seperti ini, alokasi lahan untuk kegiatan pertanian akan semakin berkurang karena terjadi alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki nilai ekonomi sewa lahan tinggi.

Keterbatasan lahan untuk kegiatan pertanian dan makin terpinggirkannya kegiatan pertanian di perkotaan, telah menempatkan ketergantungan kota besar terhadap pasokan pangan dari luar. Kondisi

itu menjadi masalah klasik di sebagian kota besar dunia. Dalam kondisi seperti ini masalah ketersediaan stok dan persoalan distribusi bahan pangan menjadi perhatian banyak pihak.

Untuk kasus Indonesia, pertumbuhan kota besar dominan di Jawa dan terjadi kecenderungan makin besarnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. Sementara lahan pertanian produktif di Jawa juga makin terbatas. Kondisi tersebut telah menempatkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan penduduk kota menjadi masalah serius dan terus membuat heboh dari waktu ke waktu.

Ada dua hal pokok yang dapat perhatian dalam hal ini. Pertama, terkait dengan kontinuitas pasokan. Kedua, terkait dengan kualitas bahan pangan itu sendiri. Salah satu ciri dari produk pertanian adalah *bulky* dan cepat rusak, sehingga biaya distribusi akan menjadi mahal. Menghadapi masalah ini dalam jumlah terbatas selama 10 tahun terakhir berkembang gerakan masyarakat kota mengembangkan bahan pangan bagi kebutuhannya sendiri. Kegiatan ini dalam konsep *Grow Your Own Food* dan dikembangkan dalam berbagai bentuk pendekatan dan menggunakan beragam teknologi.

Menurut definisi, pertanian perkotaan (pertanian urban) adalah praktek budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota (Bailkey and Nasr, 2000). Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan.

Organisasi pangan dunia atau FAO mendefinisikan pertanian urban (FAO, 1996 dan Smit et.al, 1996) sebagai:

“Sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan memasarkan produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan, yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak”.



Salah satu solusi dalam pengembangan pertanian perkotaan tersebut dan menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan adalah optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan atau ruang terbuka dan pemanfaatan limbah rumah tangga di perkotaan. Solusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga, sekaligus menambah atau sebagai sumber pendapatan rumah tangga atau membuka lapangan kerja. Dampak yang lebih luas lagi adalah pengembangan agrowidyawisata.

Baumgartner dan Belevi (2007) menambahkan, bahwa dampaknya adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pengendalian lingkungan. Pertanian perkotaan dapat diimplementasikan selain dengan mengoptimalkan lahan pekarangan, juga melalui penataan berbasis lahan sempit dan ketersediaan sarana (media tanam, pupuk, air, dan lainnya) yang terbatas juga.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, cara menyiasatinya antara lain melalui:

- Efisien dalam penggunaan lahan dengan budidaya tanaman melalui media pot. Bisa dengan cara digantung maupun bertingkat (vertikultur) atau budidaya di atas atap (*rooftop farming*) dan sebagainya
- Budidaya tanaman dan ternak bernilai ekonomi tinggi, seperti cabai, selada, bawang daun, caysim, tanaman obat keluarga, ikan lele atau bawal, ternak kelinci, dan sebagainya.
- Pengolahan limbah rumah tangga (sisa makanan dan sayuran) menjadi kompos untuk media tanam.
- Tetap memperhatikan estetika, dengan menata tinggi-rendahnya tanaman, warna, keamanan dan kegunaan, dan sebagainya.

Ada beragam bentuk pengembangan pertanian perkotaan. Di negara Eropa, terutama Rusia, pertanian perkotaan telah lama dikembangkan. Bahkan menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Kota besar lainnya di Asia seperti di Jepang dan Korea juga telah mengembangkan konsep ini dalam skala besar.

Malahan kota besar di Jepang saat ini telah mengembangkan kegiatan pertanian yang tidak tergantung pada keberadaan matahari. Sebuah perusahaan Jepang, Mirai, dapat menghasilkan sayuran selada

yang ditanam dalam ruangan tanpa sinar matahari langsung. Bahkan, sayuran selada yang ditanam tersebut 100 kali lebih produktif dari selada yang ditanam di kebun. Penanaman selada juga dilakukan di sebuah gudang tua di Provinsi Miyagi yang pernah diguncang gempa tahun 2011.

Kegiatan ini dapat mengurangi 80% limbah dan menghemat air. Tidak hanya itu, dengan cara ini berkebun pun bisa dilakukan secara vertical, sehingga luas lahan dapat dioptimalkan. Untuk menanam selada di dalam ruangan, digunakan 17.500 lampu yang diatur dengan panjang gelombang tertentu agar selada dapat tumbuh dengan cepat dan sehat. Selain selada, sayuran jenis lain juga dapat tumbuh lebih baik dalam pabrik ini, sehingga pasokan makanan dapat dihasilkan dengan lebih cepat dan efisien. Untuk detailnya lihat <http://m.covesia.com/berita/5646/jepang-mulai-berkebun-tanpa-sinar-matahari.html>.

Untuk kasus Indonesia pengembangan pertanian di wilayah perkotaan dipayungi dengan gerakan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan ini pada awalnya diarahkan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat di areal perkotaan.

Dalam perkembangannya gerakan ini dideklarasikan sebagai gerakan massal dalam pengembangan lahan pekarangan di Indonesia. Gerakan itu ditandai saat Presiden SBY berpidato pada Konferensi Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta, 24 Mei 2010. Presiden RI ke-6 itu menyatakan bahwa, "Kita mulai gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal".

Untuk itu, ketahanan pangan adalah masalah dan tanggung jawab kita bersama, mulai dari pengambil kebijakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, RW/RT, sampai ke tingkat rumah tangga.

Ajakan Presiden kepada masyarakat terkait ketahanan pangan tersebut juga diulang saat pencaanangan Gerakan Nasional Penanganan Anomali Iklim Petani Indonesia, di Sidoarjo, Jawa Timur 14 Januari 2011, melalui pernyataan: "Ketahanan pangan keluarga juga dapat ditingkatkan melalui rumah hijau atau mungkin tepatnya rumah pekarangan pangan".

Pernyataan Presiden RI tersebut cukup beralasan, mengingat potensi lahan pekarangan di Indonesia mencapai 10,3 juta ha atau 14% dari total luas lahan pertanian.

Selama ini, program pemanfaatan pekarangan telah banyak diluncurkan, baik di lingkup Kementerian Pertanian, maupun instansi terkait lainnya. Namun demikian, sering terhenti, putus, dan tidak berlanjut. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa program-program tersebut kurang terencana dengan baik, terutama terkait dengan aspek kelembagaan, sumber benih/bibit, pasar, penanganan pascapanen, dan sebagainya.

Kementerian Pertanian merancang ulang konsep pemanfaatan pekarangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat, baik untuk masyarakat di perdesaan maupun perkotaan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) diberi mandat menyusun konsep tersebut.

Mulai tahun 2011 diperkenalkan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (m-KRPL). Dibandingkan konsep pemanfaatan pekarangan terdahulu, perbedaannya adalah adanya konsep “Kawasan” dan “Lestari”, serta komoditas pangan yang diusahakan rumah tangga untuk memenuhi ketahanan dan kemandirian pangan keluarga.

Contoh pertanian perkotaan di wilayah Jakarta adalah di lingkungan Rusun Marunda dan Rusun Besakih. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian di sekitar rumah susun yang masih relatif luas dapat menjadi solusi alternatif dalam penyediaan pangan sehat bagi keluarga. Kini manfaat yang diperoleh dengan mengelola lahan di sekitar rusun untuk kegiatan pertanian sudah sangat dirasakan warga rusun.

Kemudahan dalam penyediaan pangan sehat merupakan salah satu manfaat. Berbagai macam sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, selada, pakchoy, kemangi serta umbi-umbian seperti ubi, ketela, singkong, dan talas menjadi produk pertanian yang mudah dan murah untuk diakses warga rusun.

Selain itu manfaat yang juga dirasakan langsung adalah pengurangan pengeluaran untuk belanja kebutuhan dapur. Bukan hanya itu, masyarakat

bisa menambah pendapatan, karena hasil panen dapat dijual kepada warga sekitar. Manfaat lain adalah lingkungan menjadi hijau, sehat, asri serta menambah estetika.

Sub sistem budaya yang diterapkan berupa vertikultur dan hidroponik. Vertikultur adalah teknis budidaya secara vertikal. Ini merupakan salah satu strategi untuk menyiasati keterbatasan lahan. Vertikultur ini sangat sesuai untuk sayuran seperti bayam, kangkung, kucai, sawi, selada, kenikir, seledri, dan sayuran daun lainnya.

Namun demikian, untuk budidaya vertikultur yang menggunakan wadah talang/paralon, bambu kurang sesuai untuk sayuran buah seperti cabai, terong, tomat, pare dan lainnya. Hal ini karena dangkalnya wadah pertanaman, sehingga tidak cukup kuat menahan tumbuh tegak tanaman.

Hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Berdasarkan media tumbuh yang digunakan, hidroponik dapat dibagi menjadi tiga macam. *Pertama*, kultur air yakni hidroponik yang dilakukan dengan menumbuhkan tanaman dalam media tertentu. Pada bagian dasarnya



terdapat larutan hara, sehingga ujung akar tanaman akan menyentuh larutan yang mengandung nutrisi tersebut.

Kedua, hidroponik kultur agregat yaitu metode hidroponik dengan menggunakan media tanam berupa kerikil, pasir, arang sekam pasi, dan lain-lain. Pemberian hara dilakukan dengan cara mengairi media tanam atau dengan cara menyiapkan larutan hara dalam tangki lalu dialirkan ke tanaman melalui selang plastik.

Ketiga, *Nutrient Film Technique* (NFT) adalah metode hidroponik dengan cara menanam tanaman dalam selokan panjang yang sempit dan dialiri air yang mengandung larutan hara. Di sekitar akar nantinya akan terbentuk film (lapisan tipis) sebagai makanan tanaman tersebut.

Kegiatan produksi pangan lainnya yang bisa diusahakan di pekarangan adalah akuaponik. Caranya dengan mengintegrasikan tanaman sayuran dengan budidaya hewan air (ikan, udang dan siput) di dalam suatu lingkungan simbiosis. Pola lain adalah *wall gardening* yang termasuk dalam jenis budidaya tanaman vertikal. Bedanya sistem ini, memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat untuk menempatkan modul pertanaman. Model *wall gardening* sangat populer untuk tanaman hias, bahkan sudah banyak dijumpai di gedung-gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan.

Keterkaitan Kota dengan Wilayah Sekitarnya

Bahasan tentang keterkaitan pembangunan wilayah perkotaan dan wilayah sekitarnya telah menjadi topik kajian sejak lama. Berbagai teori yang melingkupi pemikiran ini telah banyak dikeluarkan. Salah satu titik bahasan terkait dengan upaya memacu pertumbuhan kegiatan ekonomi di pusat pertumbuhan adalah teori tetesan minyak bagi pertumbuhan daerah sekitarnya.

Bahasan lainnya terkait dengan dikotomi desa dan kota. Ini juga berkaitan dengan relasi yang diharapkan saling menunjang dan memperkuat satu dengan lainnya. Untuk kasus desa kota di Indonesia, kita mengenal konsep agropolitan. Perencanaan pembangunan pedesaan

dan perkotaan di Indonesia telah dicoba dikaitkan melalui pendekatan agropolitan. Pendekatannya adalah menekankan pada pembangunan pedesaan yang mengait dengan pembangunan wilayah perkotaan pada tingkat lokal.

Dalam implementasi konsep ini, keterkaitan lebih dilihat sebagai aliran produk pertanian sebagai bahan baku untuk mendukung pengembangan industri di perkotaan dan transfer surplus tenaga kerja dari pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Namun, *multiplier effect* dan difusi belum sepenuhnya terjadi. Sebab, konsep ini mensyaratkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat relatif rendah dan masyarakat memiliki akses yang seimbang terhadap sumber daya produktif. Akibatnya, agropolitan belum mampu menumbuhkan usaha baru dan memperbaiki distribusi sumber daya di pedesaan.

Pada tataran global berbagai lembaga internasional telah banyak merumuskan konsep keterkaitan desa kota atau pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangga. Salah satu yang banyak melakukan kajian adalah FAO. Beberapa pemikiran yang digagas FAO antara lain "*Food, Agriculture and Cities: Challenges of food and nutrition security, agriculture and ecosystem management in an urbanizing world*". Ada juga pemikiran lain "*FAO-News Article: Feeding the cities of the future*". (<http://www.fao.org/news/story/en/item/446763/icode/>)

Dalam konteks *feeding the cities of the future*, pada Oktober 2016 telah dilakukan pertemuan kedua yaitu *The Milan Urban Food Policy Pact* yang dihadiri perwakilan 130 kota. Pertemuan ini untuk merumuskan *urban food systems* sebagai bagian dalam mencari solusi mengakhiri kemiskinan, malnutrisi, mengurangi sampah dan beradaptasi untuk perubahan iklim.

Secara global kota hanya menggunakan 3% lahan, namun merupakan rumah bagi 3,5 miliar orang. Diprediksi pada tahun 2030, sebanyak 60% penduduk dunia akan tinggal di kota. Masalah utama yang akan dihadapi adalah *urban poverty and food insecurity*. Urbanisasi yang cepat telah menimbulkan tekanan kepada *food systems* dan sumber daya alam. Direktur FAO menyatakan, dalam jangka panjang "*food security and*



nutrition will be overlooked in urban planning and development". Sistem pangan mestilah masuk dalam rencana kota itu sendiri.

Dalam bentuk lain, di bawah aksi "*Food for the Cities Programme*", FAO bersama the RUAF Foundation bekerja sama dalam membangun keberlanjutan, resiliensi dan dinamika *city region food systems* dengan memperkuat relasi *rural-urban* (<http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/en/>).

Program ini membantu pemerintah mengidentifikasi dan memahami kesenjangan, *bottlenecks*, sekaligus kesempatan untuk perencanaan yang berkelanjutan. Termasuk, informasi untuk pengambilan keputusan, investasi, dan mendesain kebijakan pangan yang berkelanjutan dan strategi untuk meningkatkan *local food systems*.

FAO juga telah menginisiasi konsep *City Region Food Systems* (CRFS), yakni sebuah pendekatan untuk mempercepat pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan, wilayah perbatasan dan wilayah penyangga melalui penguatan relasi desa kota (<http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/approach/crfs/en/>).

Komponen dalam sistem ini adalah, *pertama*, ketahanan pangan dan kecukupan nutrisi bagi penduduk kota dan desa. *Kedua*, kondisi kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi semua pelaku usaha dalam rantai pasok pangan dan konsumen. *Ketiga*, pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan. *Keempat*, kesetaraan untuk semua pelaku dalam rantai pasok pangan dan konsumen.

Pendekatan menyeluruh dan multidisiplin diharapkan dapat memperkuat keterkaitan wilayah perkotaan dan wilayah sekitarnya. Bila pendekatan ini dapat berjalan dengan baik, berbagai perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Hal itu akan ditandai dengan perbaikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta kualitas lingkungan yang melingkupi kehidupan masyarakat perkotaan dan pedesaan.



Dari Konsep Berkelanjutan ke Kota Logistik

Kota-kota besar dunia dalam dekade terakhir berkembang dengan sangat pesat. Tingginya arus perdagangan barang dan jasa di suatu kota menjadi salah satu indikator. Data UN Habitat (*United Nation Human Settlement Programme*), atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tempat tinggal manusia menyebutkan sekitar setengah dari seluruh penduduk tinggal di kota. Padahal seperti diketahui, luas wilayah perkotaan relatif kecil dibandingkan luas wilayah pedesaan atau wilayah penyangga. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk di kota jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

Banyaknya jumlah penduduk yang bermukim pada suatu pusat daerah tertentu dapat meningkatkan masalah. Ancaman krisis air, pangan, dan energi lambat laun akan mulai dirasakan warga yang tinggal di kawasan padat penduduk. Diperlukan upaya perbaikan guna menjadikan suatu kota sebagai *sustainable city* (kota berkelanjutan).

Menurut European Commission (2009), kota berkelanjutan adalah kota yang mengonsumsi sumber daya terbarukan tidak lebih cepat dari kapasitas regenerasinya. Ia juga mampu berkontribusi pada penggantian sumber daya yang tidak terbarukan, khususnya melalui penghematan, penelitian, dan inovasi.

Tiga aspek kota berkelanjutan adalah ekonomi, ekologi, dan sosial. Kegiatan ekonomi harus bisa menyediakan kehidupan kepada warganya secara kontinu, membangun potensi lokal, dan tidak ketergantungan dengan kota lain. Kota berkelanjutan adalah suatu kota yang bukan hanya memperhatikan aspek keberlanjutan dari fisiknya. Apalagi jika hal tersebut dilakukan tanpa adanya integrasi satu sama lain. Namun, kota berkelanjutan adalah suatu kota yang juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat. Selain menjadi masyarakat yang siap menjadi masyarakat kota berkelanjutan.

Di samping konsep kota berkelanjutan, pengembangan wilayah penyangga kota besar merupakan hal lain yang banyak dibicarakan orang terkait dengan pengembangan perkotaan. Konsep ini tidak hanya melihat pengembangan wilayah sekitarnya sebagai suatu upaya dalam

menopang pengembangan kota besar. Tapi juga dapat secara bersama mengembangkan wilayah penyangga.

Secara konsep banyak sudah pemikiran yang mencoba menyambungkan kota besar dan wilayah sekitarnya. Konsep pertama untuk ini adalah konsep negara kota. Konsep ini berasal dari negara yang basisnya hanya berupa sebuah kota. Contoh untuk ini adalah Singapura, Monako, dan juga kota-kota baru di Timur Tengah seperti Kuwait dan Qatar. Konsep ini memperlihatkan bagaimana kota mengeksploitasi wilayah sekitarnya dalam menghidupi dirinya.

Konsep lain yang sejalan dengan pemikiran ini adalah Klaster Pangan Kota atau KPK. Ini adalah sebuah pendekatan yang digulirkan untuk memenuhi kebutuhan pangan suatu kota. Konsep ini adalah sebuah agrologistik. Kuncinya adalah pada bagaimana mengirimkan produk dalam bentuk segar ke pasar. Dasar pendekatan ini datang dari Konsep Keterkaitan Desa-Kota (Douglass 1998).

Ada beberapa komponen Klaster Pangan Kota (KPK), yaitu:

1. *Rural Transformation Center (RTC)*, yakni wilayah satelit di daerah perdesaan yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses input produksi bagi petani.
2. *Agropark* (kawasan pertanian), yakni klaster spasial yang berfungsi memproduksi tanaman dan hewan dengan produktivitas tinggi yang dikombinasikan dengan input teknologi dan pengetahuan yang tinggi dalam suatu mode industri.
3. *Consolidation Center (CC)*, yaitu bahan mentah maupun produk jadi yang berasal dari daerah perdesaan ataupun *agropark* dikombinasikan dengan input dari impor. Bila perlu dilakukan proses lebih lanjut, lalu direkombinasikan dan didistribusikan ke kota.

Contoh penerapan konsep *agropark* dan KPK di mancanegara adalah Venlo (Netherland) yang menjadi KPK bagi daerah Ruhr di Jerman dengan 7 juta susukumen. Lalu, ada *Green field Agropark*, Agriport 7, Amsterdam; *Greenport Coofedian* di Tiongkok; dan IFFCO Greenport Nellore-SEZ, India.

Konsep lain terkait dengan relasi kota besar dengan wilayah sekitarnya dikenal sebagai konsep logistik. Logistik identik dengan organisasi, pergerakan, dan penyimpanan dari material dan manusia. Domain dari aktivitas logistik sendiri adalah menyediakan sistem dengan produk yang tepat, di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat (*right product, in the right place, at the right time*) dengan mengoptimalkan pengukuran performa yang diberikan (contohnya meminimalisasi total biaya operasional) dan memenuhi kualifikasi yang diberikan (contohnya sesuai dengan kemampuan dari klien dan sesuai dengan kualitas pelayanan) (Ghani, Laporte, and Musmanno 2004).

Logistik menurut *Council of Supply Chain Management Professionals* (CLM, 2000) adalah bagian dari manajemen rantai pasok (*supply chain*). Dari mulai perencanaan, pengimplementasian, pengontrolan aliran, penyimpanan barang, informasi, pelayanan yang efektif dan efisien dari titik asal ke titik tujuan sesuai dengan permintaan konsumen.

Untuk mengalirkan barang dari titik asal menuju titik tujuan akan membutuhkan beberapa aktivitas yang dikenal dengan 'aktivitas kunci dalam logistik'. Di antaranya adalah pelayanan pelanggan, perkiraan atau perencanaan permintaan, manajemen stok, sistem informasi logistik, penanganan bahan baku, transportasi dan distribusi, serta penyimpanan dan pemeliharaan. (Lambert *et. al* 1998).

Dalam cetak biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres No. 26 Tahun 2012), Logistik didefinisikan sebagai bagian dari rantai pasok (*supply chain*) yang menangani arus barang, informasi, dan uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*warehousing*), transportasi (*transportation*), distribusi (*distribution*) dan pelayanan pengantaran (*delivery services*).

Adapun penyusunan sistem logistik ditujukan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan efektifitas pergerakan barang, informasi, dan uang. Dimulai dari titik asal (*point of origin*) sampai titik tujuan (*point of destination*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen.



Sistem logistik tersusun atas fasilitas-fasilitas yang terhubung dengan jasa pelayanan transportasi. Sistem ini membahas mengenai bagaimana suatu material diproses, manufaktur, disimpan, diseleksi, untuk kemudian dijual atau dikonsumsi.

Berdasarkan skema tersebut dapat digambarkan bahwa sistem logistik merupakan sistem yang membahas mengenai keterkaitan antara entitas/pelaku dalam sebuah kegiatan logistik yang terintegrasi. Dari mulai pemasok hingga konsumen dalam masing-masing jaringan distribusi untuk menggerakkan barang/jasa.

Adapun yang menjadi objek dari sistem logistik dapat berupa barang jadi, barang setengah jadi, maupun bahan baku. Untuk memaksimalkan nilai sistem logistik diperlukan variasi rencana mengenai pengambilan keputusan untuk setiap tahapan aktivitas. Perencanaan sistem logistik yang mendukung juga mempengaruhi desain dan operasional sistem logistik yang akan diberlakukan guna menciptakan efisiensi dan efektivitas produksi suatu barang dan jasa.

Indonesia saat ini memiliki banyak masalah logistik. Kita merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya yang melimpah berpotensi menjadi *supply side* yang mampu memasok dunia dengan aneka ragam hasil alam dan industri olahannya. Disisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang besar sekaligus juga dapat menjadi target pasar atau *demand side* yang besar dalam rantai pasok global.

Namun potensi-potensi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional tersebut masih belum didukung sistem logistik yang optimal. Dari mulai penyediaan infrastruktur, penerapan sistem, kompetensi para pelaku dan penyedia jasa logistik, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan baik dalam skala institusi maupun nasional.

Tingginya biaya logistik nasional yang mencapai 27% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan belum memadainya kualitas pelayanan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hal itu ditandai dengan masih rendahnya tingkat penyediaan infrastruktur, baik kuantitas maupun kualitas, serta masih adanya pungutan tidak resmi dan biaya transaksi.

Visi sistem logistik nasional ke depan adalah Terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat. Terintegrasi secara lokal diartikan bahwa seluruh aktivitas logistik di Indonesia mulai dari tingkat pedesaan, perkotaan, sampai dengan antar wilayah dan antar pulau beroperasi secara efektif dan efisien. Selain itu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi secara nasional dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.



BAB II

POLITIK PANGAN JAKARTA



Pangan adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia. UU RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Karena itu terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi.

Di samping itu pangan memegang peranan yang sangat signifikan dan strategis secara sosial, ekonomi, dan politik. Paradigma ketahanan pangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi yang setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera mereka bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Selain itu aspek pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangkau masyarakat juga tidak boleh dilupakan.

Konsep ketahanan pangan tersebut pada dasarnya bertujuan mewujudkan terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia. Permasalahan ketahanan pangan di Indonesia sudah mulai dibenahi dalam pendekatan empat aspek yaitu;

a. Aspek produksi dan ketersediaan pangan.

Ketahanan pangan menghendaki ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga. Dalam arti setiap penduduk dan rumah tangga mampu untuk mengonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup. Permasalahan aspek produksi diawali dengan ketidakcukupan produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Hal ini karena laju pertumbuhan produksi pangan yang relatif lebih lambat dari pertumbuhan permintaannya. Permasalahan ini berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan.

Ketersediaan bahan pangan bagi penduduk semakin terbatas akibat kesenjangan yang terjadi antara produksi dan permintaan. Sebelum kepemimpinan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, permasalahan ini dapat diatasi dengan impor bahan pangan tersebut. Namun, saat ini kita tidak lagi mengimpor bahan pangan dari luar (khususnya beras).

b. Aspek distribusi.

Permasalahan di dalam pembangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke konsumen di suatu wilayah. Karena itu, pembangunan sarana jalan, jembatan, masih diperlukan, pemeliharaan infrastruktur dan memperbaiki sistem transportasi

c. Aspek pola konsumsi.

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi terhadap bahan pangan beras. Masyarakat harus diberi pengetahuan yang cukup mengenai bahan pangan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini adalah agar masyarakat lebih cerdas dan bijak dalam menentukan pola konsumsi makanan mereka. Selain itu, pendapatan masyarakat sangat berpengaruh di dalam menentukan pola konsumsi masyarakat.

Politik pangan Jakarta merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat Jakarta. Terpenuhinya kebutuhan pangan untuk Jakarta merupakan *significant goal*. Sebab, sebagai Ibukota Negara, Jakarta adalah barometer kebutuhan pangan nasional. Karena itu, politik pangan Jakarta sangat penting diwujudkan. Apalagi pangan merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar, sehingga semua daerah berupaya mencukupi kebutuhan pangan seluruh warganya.

Jakarta memerlukan politik pangan berbasis pemenuhan kebutuhan pangan didasarkan atas pertimbangan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi Jakarta. Ditinjau dari kondisi global, konsumsi pangan Jakarta akan cenderung meningkat.

Jakarta tentu tidak akan terjebak dalam kekurangan pangan karena politik pangan yang dibuat Kementerian Pertanian adalah dengan menetapkan daerah-daerah yang berbatasan dengan Jakarta sebagai daerah penyangga pangan. Sektor pertanian/pangan menjadi prioritas dalam pembangunan. Produksi pangan dalam negeri terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus tumbuh, baik jumlah maupun keragaman jenis pangannya.

Sistem logistik dan distribusi pangan untuk Jakarta menjadi perhatian pemerintah dalam politik pangan Jakarta. Hal ini guna memastikan bahwa kebutuhan pangan mudah didapatkan masyarakat dengan harga yang layak. Menyadari pentingnya penataan sistem logistik, pemerintah tentu telah mengembangkan sistem logistik yang menelaah jarak geografis daerah penyangga. Hal ini dilakukan agar biaya dari sentra produksi ke sentra konsumen tidak mahal.

Jakarta berada dalam demografi dengan tingginya jumlah angkatan muda dan mulai dirasakan pengaruhnya pada perekonomian nasional. Arus urbanisasi menyebabkan pertumbuhan, sehingga menambah pangsa kelas konsumen. Untuk mengimbangi pertumbuhan tersebut, pemenuhan pangan harus dilakukan dengan cara mengefektifkan daerah-daerah penyangga pangan.

Kelebihan Jakarta adalah memiliki konsumen yang cukup besar dan beragam. Tentunya menjadi pasar dalam negeri yang potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di samping itu Pemerintah Kota Jakarta telah berhasil dalam melakukan pengendalian tingkat inflasi, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Di sisi lain, kondisi perubahan iklim dan faktor-faktor yang lain, sering menyebabkan suplai pangan global ke Jakarta terganggu sehingga menimbulkan fluktuasi harga secara cepat.

Sebagai barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia, membuat posisi Jakarta sangat strategis seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah penyangga pangan. Situasi ini mengharuskan Jakarta memenuhi kecukupan pangannya yang tentu bersumber dari produksi dalam negeri. Di samping itu, kemampuan daerah penyangga memproduksi kebutuhan pangan Jakarta harus diimbangi dengan keberadaan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai stabilisator harga pangan strategis di pasar dalam negeri sekaligus mengelola sistem logistik pangan pemerintah.

Pemerintah saat ini telah menetapkan Perum Bulog menjalankan fungsi tersebut agar harga pangan di Jakarta tidak berfluktuasi dan cadangan pangan untuk kondisi darurat tetap terjaga. Bulog diharapkan mampu menjaga harga pangan dipasar, sehingga petani menerima harga

jual yang tetap memberikan keuntungan bagi usaha tani. Sementara konsumen dapat membeli pangan dengan harga terjangkau. Setidaknya untuk beberapa produk pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi dan minyak goreng.

Dalam mengimplementasikan politik pangan Jakarta, ada beberapa strategi yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan pangan yang sebaiknya dilakukan, yaitu:

1. Kesinergian antarlembaga dan antara Jakarta dan daerah penyangga.
2. Fokus pada jenis kebutuhan pangan, mencakup pertanian tanamati pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan.
3. Alokasi anggaran untuk pembangunan sektor pertanian pada daerah penyangga.
4. Peningkatan inovasi dan produktivitas.
5. Revitalisasi BUMN pangan guna meningkatkan produksi untuk mendapatkan *economy of scale*, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan.
6. Dukungan pemerintah untuk pengembangan sistem perbenihan dan perbibitan melalui pemanfaatan hasil riset baik oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, maupun masyarakat.
7. Penataan sistem logistik melalui perbaikan infrastruktur jalan, perhubungan, dan pergudangan agar dapat menurunkan biaya logistik untuk meningkatkan daya saing.
8. Memperpendek *supply chain* pangan melalui peningkatan peran Bulog untuk stabilisasi harga komoditas pangan strategis dan menekan pasar yang bersifat oligopoli.
9. Melakukan pengawasan terhadap distribusi pangan dan berbagai subsidi input produksi.
10. Modernisasi industri pangan lokal mulai dari pengolahan hingga pengemasan, sehingga dapat menjadi kebanggaan dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat daerah penyangga.
11. Peningkatan keamanan pangan untuk menjamin keselamatan konsumen melalui pemberdayaan Badan POM.



Pelaksanaan politik pangan Jakarta harus konsisten dan dinamis berdasarkan pertimbangan perkembangan lingkungan daerah penyangga. Di samping itu, penjabaran politik pangan membutuhkan kesinergian pemerintah pusat dan daerah penyangga. Baik antar kementerian/ lembaga, maupun pelaku usaha, dan masyarakat dalam membentuk regulasi untuk menjamin ketersediaan pangan dan keterjangkauan harganya.

Politik pangan nasional (*national food political*) adalah komitmen pemerintah yang dibebankan kepada Kementerian Pertanian RI di bawah kepemimpinan Dr. Andi Amran Sulaiman. Targetnya adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berbasis pada Kedaulatan Pangan (*food sovereignty*) dan Kemandirian Pangan (*food autonomous*).

Kedaulatan pangan nasional yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian RI berorientasi pada hak bangsa kita dalam tiga dimensi. *Pertama*, menentukan kebijakan pangan secara mandiri. *Kedua*, menjamin hak atas pangan bagi rakyat. *Ketiga*, memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem usaha sesuai potensi sumber daya dalam negeri.



Di sisi lain, Kemandirian pangan adalah kemampuan bangsa dalam memproduksi pangan di dalam negeri dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. Jika Kementerian Pertanian dapat mewujudkan ketahanan pangan, maka harapan untuk menggapai ketahanan nasional akan lebih mudah. Ketahanan nasional adalah “*the real goal*” (tujuan sejati) dari tercapainya ketahanan pangan nasional.

Karena itu, politik pangan perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Sebab, pangan adalah *basic need* semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Kementerian Pertanian harus berupaya keras memenuhi kebutuhan pangan seluruh warga negara dan menyimpan sebagian untuk cadangan pangan nasional.

Negara kita harus memiliki politik pangan yang berbasis pada kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal tersebut didasarkan pada pendekatan kondisi lingkungan internal dan eksternal bangsa. Pemerintah juga harus memahami kekuatan (*strong*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threaten*) terhadap rencana kedaulatan dan kemandirian pangan yang telah, saat ini, dan akan dihadapi bangsa kita.

Politik pangan yang berbasis pada kedaulatan dan kemandirian pangan tersebut menjadi sangat mendesak diwujudkan karena pertimbangan kondisi global. Apalagi ada indikasi konsumsi pangan dunia cenderung meningkat. *United Nation* memprediksi populasi penduduk dunia pada tahun 2050 akan lebih dari 9 miliar jiwa. Populasi tersebut membutuhkan tambahan pangan sebesar 70% bila dibandingkan kondisi saat ini.

Pada masa depan diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang diakibatkan beberapa hal. Di antaranya, kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, pemanasan iklim dan lain-lain. Kondisi itu mengakibatkan daerah produsen pangan akan mengamankan produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, bahkan meningkatkan pasokan pangan untuk mengamankan stok dalam daerahnya.

Namun dengan keragaman sumber daya dan kondisi lingkungan yang berbeda-beda, setiap daerah memiliki cara sendiri untuk mewujudkan ketahanan pangannya. Hanya daerah-daerah yang konsisten membangun



ketahanan pangannya, menyediakan infrastruktur yang terkoneksi antarwilayah dan memberikan perlindungan sosial bagi warga negaranya yang mampu lepas dari jeratan kekurangan pangan.

Jakarta tidak akan terjebak sebagai daerah yang kekurangan pangan apabila politik pangan yang dilaksanakan pemerintah pusat, khususnya pemerintah DKI berorientasi pada koneksi antar wilayah atau membangun kerja sama dengan daerah penopang pangan. Selain itu, proteksi harga pangan dengan membangun kerja sama dengan aparat keamanan untuk mengamankan kartel atau penimbun pangan.

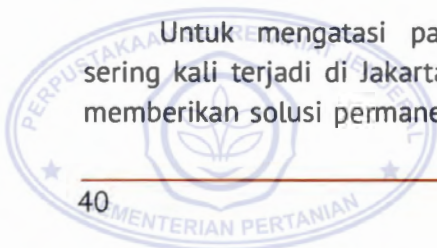
Sistem logistik dan distribusi pangan menjadi perhatian pemerintah dalam politik pangan Jakarta untuk memastikan bahwa ketahanan pangan dinikmati setiap orang di Jakarta. Menyadari pentingnya penataan sistem logistik dalam menghadapi kartel pangan, Pemerintah Pusat dan DKI sebaiknya menyusun *blueprint* pengembangan logistik yang menelaah kebutuhan pangan warga Jakarta. Hal ini dilakukan agar kebutuhan pangan warga Jakarta dapat terpenuhi dengan harga yang relatif stabil.

Kebijakan Pasar Pangan di Jakarta

Kebijakan pasar pangan di Jakarta adalah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Kebijakan tersebut berorientasi pada penentuan, antara lain wilayah/daerah penyangga pangan atau daerah sumber pangan, jenis pangan yang dibutuhkan, cara pangan/makanan diproduksi, diproses, didistribusikan dan dipasarkan.

Pilihan terhadap kebijakan tersebut tentu untuk mempengaruhi pengelolaan sistem pertanian dan pangan. Jika mengamati apa yang telah dilakukan Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah DKI, maka kebijakan pangan tersebut terdiri dari penentuan jumlah produksi pangan yang dibutuhkan, pengelolaan pangan (*food processing*), pemasaran, ketersediaan, akses, pemanfaatan dan konsumsi bahan pangan.

Untuk mengatasi pasokan pangan dan gejolak harga yang sering kali terjadi di Jakarta, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberikan solusi permanen untuk mengamankan hal tersebut. Solusi





yang ditawarkan adalah dengan menetapkan 10 kabupaten yang memiliki sumber daya dan lahan yang subur dan berbatasan dengan kota Jakarta sebagai daerah penyangga pangan.

Kesepuluh kabupaten yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta adalah Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang dan Karawang. Dari kesepuluh kabupaten penyangga tersebut disiapkan kurang lebih 200.000 – 300.000 ha untuk penuhi kebutuhan Jagung di DKI Jakarta. Mentan berharap, untuk tahap awal 10 kabupaten ini bisa memenuhi kebutuhan jagung untuk wilayah Jakarta.

Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta, Kementerian Pertanian telah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya yakni, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kementerian BUMN, untuk penyediaan lahan. Selanjutnya untuk penyediaan anggaran kredit telah bekerja sama dengan Bank Mandiri, BTN, BRI dan BNI. Lalu untuk penyerapan hasil produksi petani Kementan bersinergi dengan BULOG dan GPMT.

Di samping itu, untuk mendukung pemenuhan pangan akan dibangun embung desa bersinergi dengan Kementerian Desa dan PDTT. Sementara itu, untuk penyediaan alsintan, benih unggul dan pompa, Kementerian Pertanian siap untuk memberikan secara gratis kepada kabupaten yang mendukung pemenuhan kebutuhan pangan Jakarta. Apabila program tersebut berhasil, dapat diyakini bahwa tidak ada impor lagi.

Anomali Pasar dan Intervensi

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli pernah mengungkapkan, bahwa kebijakan ekonomi pesanan yang banyak melibatkan pejabat-pejabat dan aparatur negara berwatak koruptif mengakibatkan banyaknya praktik perburuan rente (*rent seeking*). Di antaranya melalui kartel, mempermainkan harga komoditas pangan tanpa memperhatikan daya beli dan keberlangsungan hidup yang layak bagi masyarakat banyak.

Harga pangan khususnya di Jakarta tidak normal menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2017. Misalnya, harga bawang putih di pasar mengalami lonjakan Rp 48.000-60.000/kg dari harga normal Rp 22.000/kg. Bawang putih memang bukan komoditas yang mampu disediakan dari produksi dalam negeri. Selama ini sebagian besar kebutuhan bawang putih nasional dipasok dari negara lain.

Karena itu, Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman sangat menyayangkan kenaikan harga komoditas tersebut yang jauh dari ambang batas normal. Hal itu akibat dari sebuah perilaku sadis para kartel yang memanfaatkan kebutuhan kaum muslim yang menjalani bulan puasa Ramadan dan hari raya.

Menteri Pertanian menilai, seharusnya harga tidak melonjak naik mengingat bawang putih dominan impor. Selayaknya yang mengalami kenaikan harga tinggi adalah komoditas yang tidak impor. Misalnya bawang merah yang tidak impor, justru harganya malah relatif stabil, bahkan menunjukkan tren penurunan. Anomali harga inilah yang membuat Amran Sulaiman menganggap sebagai hal yang tidak

manusiawi dari praktik kartel dalam mempermainkan pasokan dan stok, serta memaksakan harga ke pasar.

Karena marah dan tidak senang terhadap permainan segelintir oligarki mafia pangan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman lalu berinisiatif membentuk Satgas Pangan dengan menggandeng POLRI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Dalam Negeri dan Bulog. Satgas Pangan bertugas membasmi kartel pangan yang mempermainkan harga, sehingga meresahkan masyarakat.

Tidak lama setelah dibentuk, Satgas Pangan berhasil menangkap jaringan penimbun bawang putih sebesar 182 ton di Cilincing, Marunda, dan Bekasi di gudang milik PT Tunas Perkasa Indonesia. Hanya beberapa jam setelah penangkapan tersebut memberi dorongan pada penurunan harga bawang putih ke harga rata-rata Rp 25.000/kg.

Tidak hanya menggiring para pelaku kartel ke penjara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengancam akan mencabut izin impor perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan praktik kartel. Intervensi terhadap harga pangan inilah yang menjadi alasan Rizal Ramli menyebutkan bahwa hanya Amran Sulaiman yang berani menyatakan perang dan sikat praktik kartel. Apalagi saat masih banyak pejabat dari aparaturnegara yang bermain mata dengan para kartel pemburu rente.

Mafia dan Kartel

Semakin banyaknya kartel dalam perdagangan pangan sangat mengganggu peningkatan produktivitas serta daya saing. Perilaku kartel sudah sangat terbuka, bahkan hampir semua komoditas dikuasai. Terus berlangsungnya praktik-praktik kartel tak lain akibat lemahnya pengawasan pemerintah. Di samping itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum maksimal dalam memberantas persoalan kartel tersebut.

Mafia pangan di Indonesia (seperti mafia daging sapi, beras dan bawang) sangat terasa keberadaannya, tapi sulit untuk membuktikannya



secara hukum. Sebab, hukum Indonesia belum mengenal *indirect evident* alias bukti tidak langsung. Mafia pangan sulit dibuktikan dengan bukti langsung alias bukti fisik karena persekongkolan untuk mengendalikan harga dan pasokan dilakukan tanpa dokumen tertulis.

Mafia pangan jelas memang ada di Indonesia. Indikatornya sangat jelas. Sering terjadi pasokan melimpah, harga jatuh di tingkat petani, namun harga pangan di pasar tetap tinggi. Sebagai contoh anomali harga daging sapi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Meski impor sapi dibuka selebar-lebarnya, pasokan melimpah, harga tak pernah berada di bawah Rp 100.000/kg di pasaran.

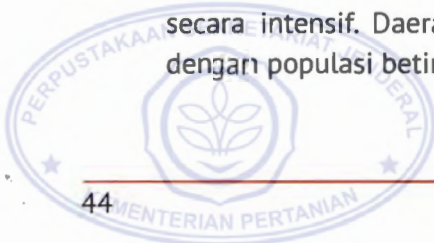
Seharusnya, ketika impor sapi dibuka selebar-lebarnya harga daging sapi harus turun. Kenyataannya, harga sapi tidak turun akibat permainan kartel. Sebelumnya, KPPU mencatat ada 24 perusahaan penggemukan sapi atau *feedloter* yang terindikasi kartel sapi. Mereka diduga secara sengaja mengendalikan atau menahan pasokan sapi bakalan siap potong ke pasar atau Rumah Potong Hewan (RPH).

Untuk mengatasi kartel sapi atau anomali harga daging sapi, Kementerian Pertanian telah berupaya keras meningkatkan kualitas program upaya khusus (UPSUS) Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) yang bertujuan meningkatkan populasi dan produksi ternak. Upaya tersebut dilakukan melalui program UPSUS SIWAB tahun 2017 dengan pendekatan strategi optimalisasi pelaksanaan inseminasi di 33 provinsi.

Ada beberapa maksud program UPSUS SIWAB ini. Di antaranya, mempercepat pencapaian peningkatan produksi daging di dalam negeri, memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia, mengurangi ketergantungan impor daging dan ternak bakalan. Selain itu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha budidaya ternak.

Implementasi UPSUS SIWAB di 33 provinsi dibagi dalam tiga zona, yaitu:

1. Zona 1 adalah daerah sentra sapi dengan pemeliharaan dilakukan secara intensif. Daerah tersebut yaitu, Jawa, Bali, dan Lampung dengan populasi betina sebanyak 3,3 juta ekor.



2. Zona 2 adalah daerah sentra sapi dengan pemeliharaan dilakukan secara semi intensif. Daerah tersebut meliputi Sulawesi Selatan, Sumatera, dan Kalimantan dengan potensi populasi betina sebanyak 1,9 juta ekor.
3. Zona 3 adalah daerah sentra sapi dengan pemeliharaan dilakukan secara ekstensif. Daerah tersebut meliputi, NTT, NTB, Papua, Maluku, Sulawesi, NAD, dan Kaltara dengan total populasi betina sebanyak 700.000 ekor.

UPSUS SIWAB terdiri dari dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Program tersebut dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Permentan itu ditandatangani Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman pada 3 Oktober 2016.

UPSUS SIWAB dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada daging yang ditargetkan Presiden Joko Widodo tercapai pada tahun 2026 mendatang serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Diperkirakan dari belanja pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan 2,4 juta anakan lahir pada tahun 2018. Dengan harga anakan Rp 3 juta per ekor, nilai total yang didapat peternak mencapai Rp 7,2 triliun saat pedet lahir. Selanjutnya, jika anakan tersebut dipelihara hingga usia dewasa, dengan harga rata-rata per ekor sebesar Rp 12 juta, nilai ekonomi yang diperoleh peternak mencapai Rp 28,8 triliun.

Mengapa kartel atau mafia pangan sangat susah diatasi dan atau dibasmi di negara kita? Ada beberapa faktor penyebab susahnyanya mengatasi dan membasmi kartel atau mafia di Indonesia.

1. Perilaku korup. Saat ini masih banyak oknum pejabat terlibat dalam rantai praktik kartel dan pesuruh mafia.

2. Sifat serakah pengusaha. Mereka hanya berpikir meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Biasanya, kartel ini melakukan persekongkolan di antara pemain bisnis sejenis, entah itu sepakat mengatur harga, membatasi produksi, atau hal-hal yang bersifat memonopoli.
3. Belum efektifnya koordinasi antar-kementerian.

Pada masa yang akan datang, tantangan terhadap politik pangan Jakarta akan semakin kompleks. Apalagi Jakarta punya pangsa pasar yang amat sangat besar dan ditambah dengan kebijakan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada pasar.

Karena itu, solusi permanen dengan menetapkan kabupaten penyangga pangan Jakarta merupakan jalan keluar agar ketersediaan pangan di ibu kota negara ini dapat terjamin. Di samping itu pula, agar industrialisasi pangan berjalan tidak hanya menguntungkan segelintir orang dan tidak mematikan pertanian skala kecil yang diusahakan rakyat.

Setidaknya ada dua program sebagai solusi permanen.

1. Mengembangkan dan menguatkan kelompok tani, koperasi dan UKM dalam produksi dan distribusi. Industrialisasi pangan juga harus dilaksanakan dengan pembangunan kelembagaan petani. Dengan jumlah petani dan nelayan yang relatif banyak, pengembangan kelembagaan petani juga akan menjadi potensi untuk pembangunan industri pangan yang sangat besar.
2. Menghentikan langkah para mafia dan kartel pangan melalui deregulasi kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kapitalis besar agar lebih berpihak pada rakyat. Selama ini beberapa kebijakan memudahkan langkah perusahaan besar justru mengalahkan pertanian rakyat. Karena itu melalui deregulasi kebijakan, industrialisasi pangan diharapkan berjalan dengan semangat keadilan sosial.

BAB III

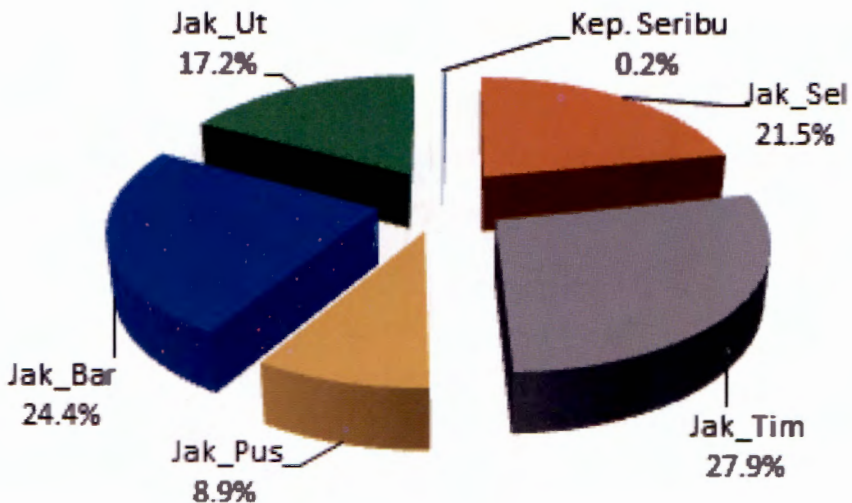
KEBUTUHAN DAN SUMBER PANGAN JAKARTA



Kebutuhan Pangan DKI Jakarta

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sekitar 10,27 juta jiwa. Pada tahun 2017 diperkirakan menjadi 10,37 juta jiwa yang tersebar di enam kabupaten/kota madya. Dengan melihat penyebaran jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota madya pada tahun 2016 dan tidak banyak berubah pada tahun 2017.

Dapat diperkirakan sebaran kebutuhan pangan terbanyak di Jakarta Timur, yaitu 27,9% dari total kebutuhan pangan DKI Jakarta. Disusul Jakarta Barat sebanyak 24,4%, Jakarta Selatan sebanyak 21,5%, dan Jakarta Utara sebanyak 17,2% (Gambar 3.1). Kebutuhan pangan di Jakarta Pusat sekitar 8,9%, dan terendah adalah di Kepulauan Seribu hanya 0,2% (BPS DKI Jakarta, 2016).



Gambar 3.1. Sebaran Kebutuhan Pangan Masyarakat di DKI Jakarta, 2016 (BPS DKI Jakarta, 2016 diolah)



Informasi sebaran jumlah kebutuhan pangan ini sangat penting bagi pemerintah dalam upaya perbaikan sistem tata niaga dan distribusi pangan ke masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan infrastuktur dan jumlah gudang logistik penyimpanan, serta jumlah distributor/pedagang yang bisa langsung menjangkau masyarakat sepatutnya disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang menjadi target. Namun demikian, Kepulauan Seribu sekalipun jumlah kebutuhannya paling kecil, tapi tetap perlu mendapat perhatian mengingat lokasinya terpisah, sehingga akses masyarakat terhadap pangan tetap mudah.

Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2017 sekitar 10,37 juta jiwa. Tingkat konsumsi per kapita per tahun untuk beras sekitar 114,6 kg, gula pasir 10,5 kg, minyak goreng 41,51 kg, cabai 5,58 kg, daging sapi 5,76 kg, daging ayam 17,74 kg, dan telur 8,22 kg. Dari data tersebut dapat diperkirakan jumlah kebutuhan dari masing-masing jenis pangan untuk masyarakat DKI Jakarta pada tahun 2017. (Seperti disajikan pada Tabel 3.1.)

Diperkirakan rata-rata kebutuhan beras di DKI Jakarta per bulan adalah sekitar 99,1 ribu ton dan dalam setahun sebanyak 1,19 juta ton. Kebutuhan per bulan untuk gula dan minyak goreng masing-masing 9,1 ribu ton dan 35,9 ribu ton atau dalam setahun masing-masing sebanyak 109 ribu ton dan 431 ribu ton.

Sementara itu jumlah kebutuhan bawang merah dan cabai per bulan masing-masing 3,3 ribu ton dan 5,3 ribu ton atau masing-masing 40,0 ribu ton dan 63,2 ribu ton per tahun. Rata-rata kebutuhan daging sapi, daging ayam, dan telur ayam per bulan masing-masing 5,0 ribu ton, 9,5 ribu ton, dan 8,9 ribu ton. Dalam setahun masing-masing 59,7 ribu ton, 113,4 ribu ton, dan 106,9 ribu ton.

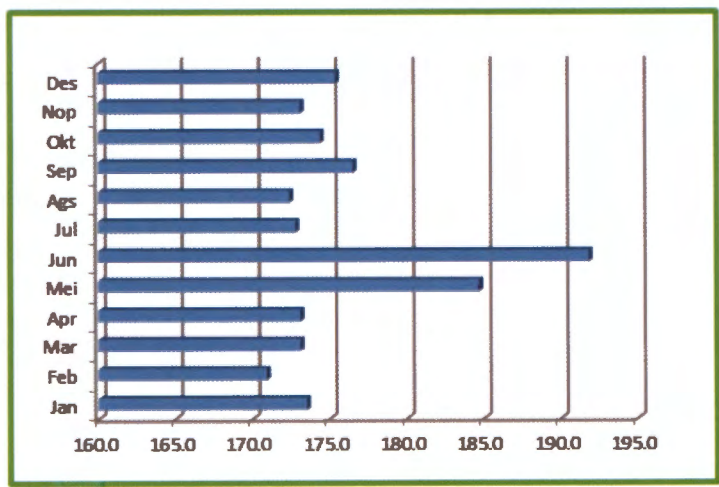
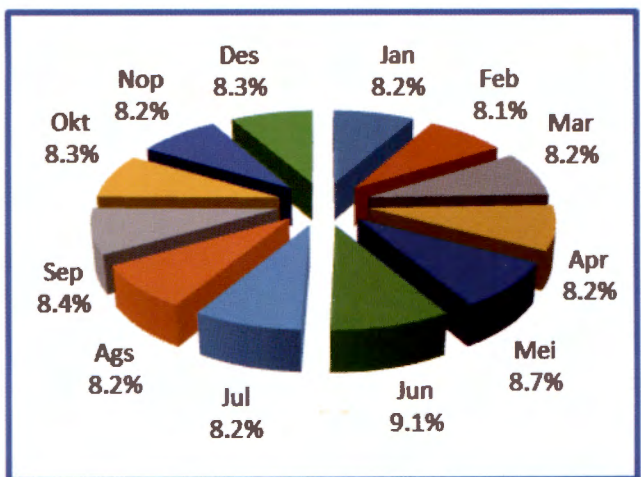
Tabel 3.1. Perkiraan Kebutuhan Menurut Jenis Pangan dan Bulan Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2017

Bulan	Jenis Pangan (000 Ton)							
	Beras	Gula	Minyak Goreng	Bawang Merah	Cabai	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam
Jan	98.4	7.9	35.6	3.3	5.2	4.9	9.4	8.8
Feb	97.6	6.4	35.4	3.3	5.2	4.9	9.3	8.8
Mar	97.6	8.6	35.4	3.3	5.2	4.9	9.3	8.8
Apr	97.6	8.5	35.4	3.4	5.2	4.9	9.3	8.8
Mei	101.7	13.3	36.8	3.6	5.4	5.1	9.7	9.1
Jun	107.4	11.2	38.9	3.3	5.7	5.4	10.3	9.6
Jul	97.6	8.3	35.4	3.3	5.2	4.9	9.3	8.8
Ags	97.6	7.9	35.4	3.3	5.2	4.9	9.3	8.8
Sep	98.8	10.1	35.8	3.3	5.2	5.0	9.4	8.9
Okt	97.6	9.9	35.4	3.3	5.2	4.9	9.3	8.8
Nop	97.6	8.6	35.4	3.3	5.2	4.9	9.3	8.8
Des	99.2	8.3	35.9	3.3	5.3	5.0	9.5	8.9
Per Bln	99.1	9.1	35.9	3.3	5.3	5.0	9.5	8.9
Setahun	1188.7	109.0	430.8	40.0	63.2	59.7	113.4	106.9

Sumber : BKP, 2017

Pada tahun 2017, saat puasa dan Idul Fitri jatuh pada Mei dan Juni. Lalu Idul Adha pada September, Natal dan Tahun Baru pada Desember menyebabkan kebutuhan pangan tidak merata setiap bulan dan cenderung lebih tinggi pada bulan-bulan tersebut (Gambar 3.2). Jumlah kebutuhan

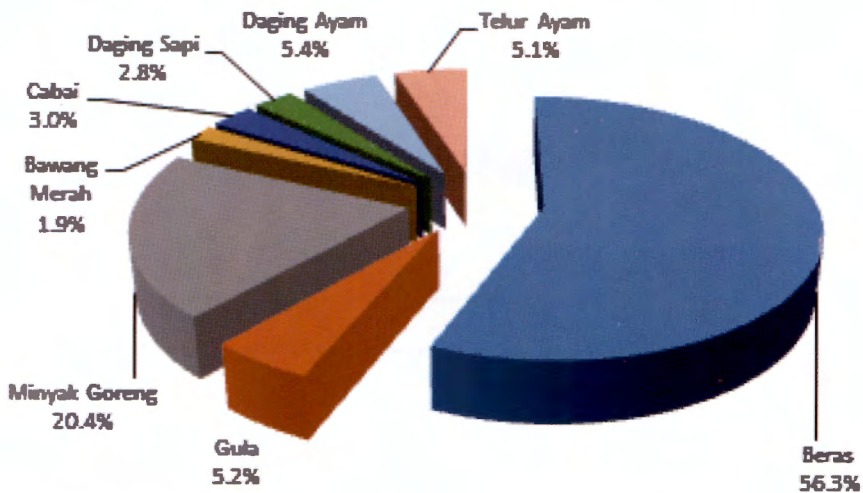
pangan pada bulan-bulan normal diperkirakan sebesar 8,1-8,2% dari total kebutuhan per tahun. Kebutuhan pangan tertinggi terjadi pada Juni dan Mei masing-masing 9,1% dan 8,7%, diikuti September sebesar 8,4%, dan Oktober dan Desember masing-masing 8,3%.



Gambar 3.2. Perkiraan Jumlah Kebutuhan Pangan Menurut Bulan Masyarakat DKI Tahun 2017 (BKP, 2017)



Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat DKI Jakarta sebanyak 10,37 juta jiwa, diperkirakan jumlah pangan (beras, gula, minyak goreng, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam, dan telur) yang harus disediakan Pemerintah DKI Jakarta dalam setahun mencapai 2,11 juta ton. Dari jumlah ini, sebagian besar adalah pangan beras, dengan pangsa 56,3%. Lalu disusul daging ayam, gula dan telur ayam dengan pangsa berturut-turut 5,2% dan 5,1% (Gambar 3.3). Sesuai tingkat konsumsi per kapita per tahun, kebutuhan daging sapi, cabai, dan bawang merah masing-masing 3,0%; 2,8%; dan 1,9% dari total kebutuhan pangan setahun.



Gambar 3.3. Perkiraan Komposisi Jumlah Kebutuhan Menurut Jenis Pangan Masyarakat DKI Jakarta Tahun 2017 (BKP, 2017)

Sumber Pangan Jakarta

DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi terpadat penduduknya di Indonesia. Data resmi BPS menunjukkan DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk 15.517 jiwa/km² atau lebih dari 100 kali rata-rata kepadatan penduduk nasional di provinsi-provinsi lain. Jakarta Barat



merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 19.268 jiwa/km². Sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu Kepulauan Seribu yang hanya mencapai 2.714 jiwa/km² (BPS DKI Jakarta 2017). Hal ini berdampak langsung pada tingginya kebutuhan pangan dan kompetisi penggunaan sumber daya lahan.

Menurut laporan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, total luas lahan pertanian di DKI Jakarta hanya sekitar 11.000 ha. Angka itu pun cenderung menurun seiring berjalannya waktu (DKPKP 2017). Selanjutnya data BPS menyebutkan pada tahun 2016 potensi lahan pertanian di Provinsi DKI Jakarta tercatat tinggal 1.696 ha. Sebaran lahan pertanian di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada Tabel 3.2.

Luas total sawah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 hanya 587 ha, sekitar 82% di antaranya merupakan sawah irigasi. Sebagian besar sawah (70%) terdapat di Jakarta Utara. Sisanya di Jakarta Barat (17%) dan Jakarta Timur (13%) (BPS DKI Jakarta 2017).

Berdasarkan hasil Survei Pertanian, pada tahun 2016 produksi padi Provinsi DKI Jakarta hanya mencapai 5.342 ton dengan produktivitas 5,33 ton/ha. Sementara itu, tanaman palawija pada tahun 2016 tidak berproduksi. Kangkung dan mangga merupakan komoditas sayuran dan buah yang paling banyak dihasilkan DKI Jakarta dengan tingkat produksi berturut-turut 66.027 kuintal (ku) dan 40.279 ku.

Jenis ternak yang paling banyak diusahakan yaitu kambing sebanyak 5.739 ekor (BPS DKI Jakarta 2017). Tingkat produksi pangan tersebut tentu sangat kecil dibandingkan tingkat kebutuhan pangan DKI Jakarta. Kondisi paradoks tersebut menyebabkan DKI Jakarta memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari daerah lain atau pun impor.

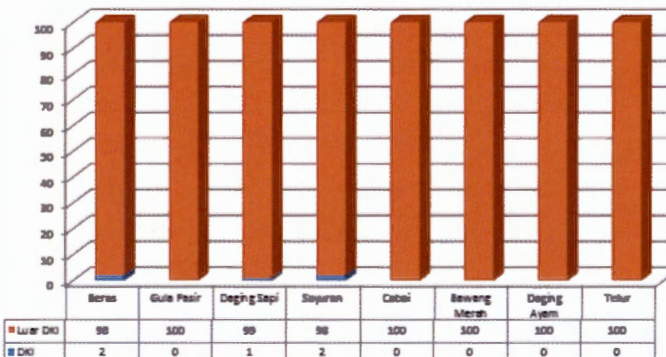


Tabel 3.2. Kondisi luas lahan pertanian (ha) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016

Wilayah	Sawah Irigasi	Sawah Non Irigasi	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Tidak Diusahakan	Jumlah
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-
Jakarta Selatan	-	-	342	-	144,4	486,4
Jakarta Timur	69	5	109	100	8	291
Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-
Jakarta Barat	-	99	12	320	40	471
Jakarta Utara	414	-	34	-	-	448
DKI Jakarta	483	104	497	420	192,4	1.696,4

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2017 diolah

Gambar 3.4 menunjukkan tingkat ketergantungan DKI Jakarta terhadap sejumlah komoditas pangan utama yang harus didatangkan dari daerah lain. Sebagai contoh, dalam pemenuhan kebutuhan beras, Pemprov DKI harus mendatangkan beras, baik dari luar daerah maupun pasar impor sebesar 98% dari jumlah kebutuhan. Demikian juga untuk ternak sapi/daging sapi dan sayuran, masing-masing 99% dan 98% didatangkan dari luar. Bahkan untuk gula pasir, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras semuanya didatangkan dari luar daerah (Dinas Perdagangan DKI Jakarta, 2017).



Gambar 3.4. Tingkat ketergantungan Provinsi DKI terhadap sejumlah jenis pangan yang didatangkan dari daerah lain tahun 2016 (Dinas Perdagangan DKI Jakarta, 2017 diolah)



Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan dan ketersediaan pangan DKI Jakarta sangat ditentukan oleh pasokan dari daerah luar DKI Jakarta. Adanya permasalahan produksi pangan di daerah-daerah sebagai pemasok utama akan berdampak terhadap stabilitas harga pangan di Jakarta.

Karena itu, upaya peningkatan produksi pangan yang sedang dijalankan Kementan di daerah-daerah luar DKI secara tidak langsung juga sebagai upaya meningkatkan stabilitas pasokan dan harga pangan di DKI Jakarta. Selain itu, kondisi sarana distribusi, transportasi, dan infrastruktur lainnya juga berpengaruh terhadap kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan di Jakarta.

Selain impor, dari mana saja DKI Jakarta mendapat pasokan pangannya? Tabel 3.3. menunjukkan sebaran provinsi-provinsi di Indonesia yang tercatat memasok sejumlah pangan utama ke DKI Jakarta. Daerah pemasok utama beras ke DKI Jakarta adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung dan Banten.

Pemasok utama ternak sapi/daging sapi untuk DKI adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Bali, DI Yogyakarta. Sementara komoditas sayur-sayuran kebanyakan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Seperti cabai dan bawang merah dipasok dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Sementara itu, daerah pemasok utama gula adalah Lampung dan Jawa Barat. Di samping itu, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung tercatat sebagai pemasok utama jagung ke DKI Jakarta. Tabel 3.3. tersebut mempertegas peran provinsi-provinsi di sekitar DKI Jakarta, seperti Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang merupakan sentra sekaligus penyangga utama pangan untuk DKI Jakarta.

Tabel 3.3. Provinsi-provinsi di Indonesia yang memasok pangan utama ke DKI Jakarta

Jenis Pangan Utama	Provinsi pemasok
Beras	Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan
Sapi/daging sapi	Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Bali, DI Yogyakarta
Cabai dan bawang merah	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung
Gula	Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten
Jagung	Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung

Sumber: BPS, 2016a, 2016b, 2016c diolah

Seberapa besar kemampuan/potensi pasokan pangan utama dari provinsi-provinsi lain di Indonesia ke DKI Jakarta? Hasil penelusuran menunjukkan ketersediaan data tersebut masih sangat terbatas. Adapun data-data yang tersedia masih bersifat umum. Sebagai contoh, hasil studi BPS tahun 2016 memperlihatkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi pemasok beras terbesar dengan persentase 43,71% (BPS 2016a).

Provinsi Lampung dilaporkan dapat memasok 40% kebutuhan pangan DKI Jakarta (Kurniawan 2017). Komoditas yang dapat dipasok meliputi beras, sayur mayur, hingga daging sapi. Khusus beras, BPS melaporkan bahwa pada tahun 2016 Lampung hanya menjual 2,26% produksi berasnya ke DKI Jakarta. Sementara itu, sekitar 58% produksi beras Lampung dijual/dipasarkan di dalam provinsi tersebut (BPS 2016a).

Provinsi lain sebagai pemasok pangan utama ke DKI Jakarta yaitu lain Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Sulawesi Selatan dilaporkan memasok pangan utama ke DKI Jakarta berupa beras, daging sapi, dan ikan. Pada tahun 2016, Provinsi Sulawesi Selatan mendistribusikan 0,99% perdagangan berasnya ke DKI Jakarta (BPS

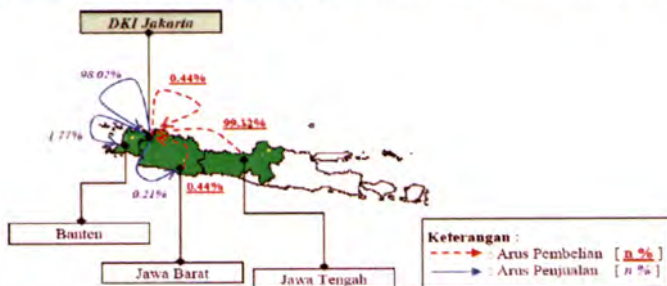
2016b). Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaporkan dapat memasok 15% kebutuhan daging Jakarta (Ariyanti 2015).

DKI Jakarta juga tercatat sebagai provinsi dengan tingkat ketergantungan jagung pipilan yang sangat tinggi terhadap daerah-daerah lain. Sebagai contoh, pada tahun 2015 sebanyak 99,12% kebutuhan jagung pipilan DKI Jakarta didatangkan dari provinsi Jawa Tengah dan sebagian kecil (0,44%) dipasok dari Jawa Barat. Sementara itu, sebagian besar (98,02%) jagung pipilan yang dipasok ke DKI Jakarta dijual kembali di DKI Jakarta (BPS 2015b). Distribusi perdagangan jagung di DKI Jakarta terlihat secara detail pada Gambar 3.5.

Pasokan pangan dari provinsi lain sebagian besar dikirim ke pasar-pasar utama/induk di DKI Jakarta. Karena itu, data pasokan pangan ke DKI Jakarta juga dapat ditelusuri melalui data pemasukan dan pengeluaran pangan di pasar induk tersebut. Sebagai contoh, pasokan beras untuk DKI Jakarta sebagian besar didatangkan melalui Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Food Station Tjipinang Jaya atau *Food Station* merupakan Perusahaan BUMD DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai pengelola tunggal Pasar Induk Beras Cipinang. Kondisi di PIBC merupakan indikator pasokan dan harga beras Jakarta dan Nasional. Pasokan beras melalui PIBC rata-rata 2.000 – 3.000 ton/hari dan puncak pasokan beras biasanya terjadi pada setiap awal pekan.

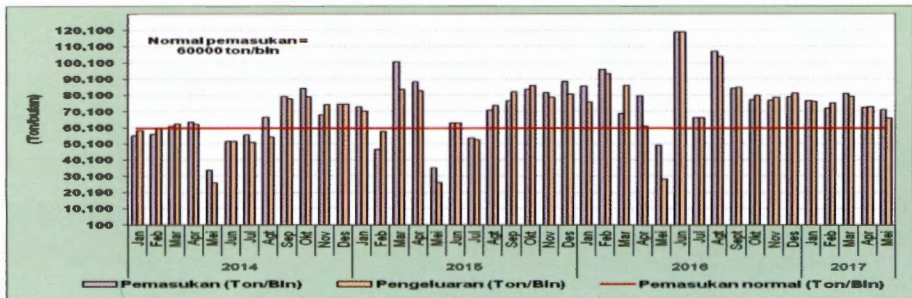
Peta Distribusi Perdagangan Jagung Pipilan di Provinsi DKI Jakarta, 2015



Gambar 3.5. Peta distribusi perdagangan jagung pipilan di DKI Jakarta (BPS 2015b)



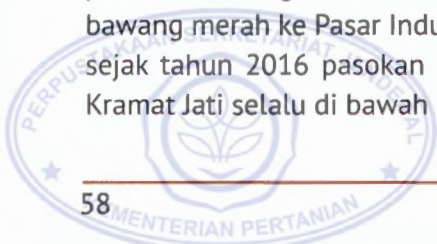
Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian mencatat rata-rata normal pasokan beras ke PIBC pada tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2017 sekitar 60.000 ton/bulan (Gambar 3.6). Untuk memenuhi kebutuhan beras DKI Jakarta selama 14 hari ke depan rata-rata diperlukan stok minimal 40.000 ton. Data di PIBC mencatat hingga Mei 2017 pasokan beras ke DKI Jakarta didominasi dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Karawang (21,83%), Cirebon (23,00%), dan Bandung (8,76%). Pasokan beras juga berasal dari Provinsi Jawa Tengah (25,92%) dan daerah lainnya (Jawa Timur, Cianjur, dan antarpulau) mencapai sekitar 20,49%.

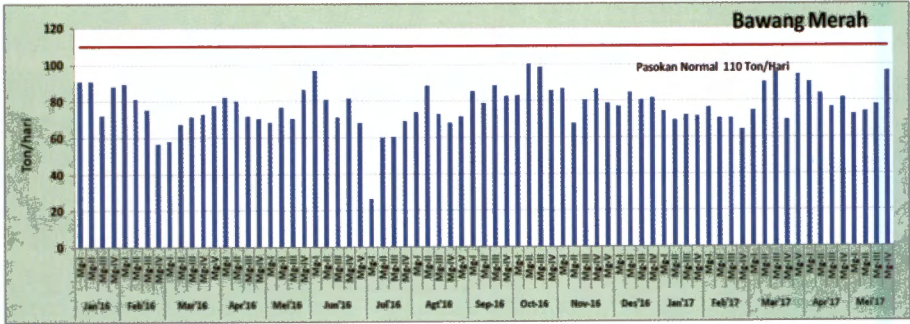


Gambar 3.6. Dinamika pasokan beras di PIBC tahun 2014-2017 (PIBC diolah BKP 2017)

Dari sisi penjualan, BPS (2016a) melaporkan 84,91% dari pasokan beras yang ada dipasarkan pedagang ke dalam Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu perlu dicatat bahwa beras yang disuplai ke DKI Jakarta, tidak hanya beras giling siap jual. Pasokan juga berupa beras pecah kulit yang kemudian diproses kembali oleh penggilingan milik BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi beras medium atau premium (model bisnis *rice to rice*).

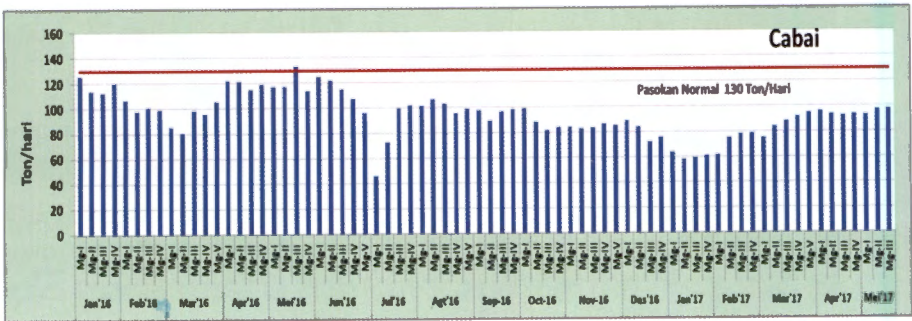
Sementara itu, pasokan produk hortikultura untuk DKI Jakarta sebagian besar dikirim ke Pasar Induk Kramat Jati. Gambar 3.7 menunjukkan pasokan bawang merah melalui pasar induk Kramat Jati. Pasokan normal bawang merah ke Pasar Induk Kramat Jati yaitu 110 ton/hari. Akan tetapi, sejak tahun 2016 pasokan bawang merah yang masuk ke Pasar Induk Kramat Jati selalu di bawah pasokan normal tersebut (110 ton/hari).





Gambar 3.7. Pasokan bawang merah melalui Pasar Induk Kramat Jati Januari 2016 - Mei 2017 (PIK diolah BKP)

Produk hortikultura lainnya yang banyak dipasok ke DKI Jakarta melalui Pasar Induk Kramat Jati yaitu cabai. Pasar Induk yang berlokasi di Jakarta Timur itu bahkan menjadi indikator pasokan dan harga cabai nasional. Pasokan normal cabai di Pasar Induk Kramat Jati yaitu 130 ton/hari. Sama seperti halnya bawang merah, sejak tahun 2016 pasokan cabai yang masuk ke Pasar Induk Kramat Jati selalu di bawah pasokan normal 130 ton/hari (Gambar 3.8). Pasokan di bawah pemasukan normal merupakan salah satu indikator perubahan harga cabai, baik nasional maupun DKI Jakarta dan sekitarnya.



Gambar 3.8. Pasokan cabai melalui Pasar Induk Kramat Jati Januari 2016 - Mei 2017 (PIK diolah BKP)



Dalam upaya menstabilkan pasokan dan harga bawang merah dan cabai di pasar induk, Pemerintah DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya telah berinvestasi dan mengoperasikan mesin kontainer penyimpanan hasil pertanian terkendali atau yang disebut *controlled atmosphere storage* (CAS). Pengoperasian mesin kontainer penyimpanan ini dilakukan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Satu unit mesin CAS mampu menampung sebanyak 20 ton bawang dan cabai merah. Persediaan bawang dan cabai merah diharapkan dapat disimpan dan tetap baik mutunya selama 6 bulan. Dengan adanya CAS, hasil panen petani dapat disimpan dan dikeluarkan, meski musim panen sudah berhenti. Terjaganya pasokan, akan menjaga harga cabai dan bawang tetap stabil.

Untuk menjamin pasokan pangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi lain dan juga institusi Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian. Bentuk kerja sama tersebut berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) pasokan pangan ke DKI Jakarta.

Beberapa kerja sama lainnya, yakni MoU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lampung terkait pasokan beras, sayur mayur, hingga daging sapi, MoU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pasokan beras, daging sapi dan ikan, MoU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur terkait pasokan daging sapi ke Ibukota Negara ini.

Pasokan dan distribusi pangan di DKI Jakarta dilakukan dengan memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan, yaitu PD Pasar Jaya, PD. Dharma Jaya dan PT. Food Station Tjipinang Jaya. Guna mengamankan sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras di PIBC, BUMD PT. Food Station Tjipinang Jaya juga merangkul dan membangun kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog dan gabungan kelompok tani (gapoktan).

Sebagai contoh, kerja sama dengan Gapoktan di Indramayu, Jawa Barat. Kerja sama ini dilakukan karena Indramayu dikenal sebagai



produsen beras yang diharapkan mampu menyuplai secara stabil untuk memenuhi kebutuhan beras di PIBC. Kerja sama ini juga dimaksudkan untuk membuka akses Gapoktan ke pasar-pasar beras.

Bentuk kerja sama lain berupa pembibitan sapi lokal betina di daerah sentra, seperti yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga BUMD merupakan pangsa pasar daging sapi. Kerja sama ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, juga untuk menyelamatkan sapi lokal. Pada kondisi darurat stok pangan, pemenuhan kebutuhan juga dilakukan melalui kegiatan impor.

Tingginya ketergantungan DKI Jakarta terhadap pasokan pangan dari daerah lain berpotensi menimbulkan sejumlah permasalahan pangan. Adanya permasalahan produksi pangan di daerah-daerah sebagai pemasok utama akan berdampak terhadap stabilitas harga pangan di Jakarta.

Karena itu, upaya peningkatan produksi pangan yang sedang dijalankan Kementan saat ini di daerah-daerah luar DKI secara tidak

langsung juga sebagai upaya meningkatkan stabilitas pasokan dan harga pangan di DKI Jakarta. Selain itu, kondisi sarana distribusi, transportasi, dan infrastruktur lainnya juga berpengaruh terhadap kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan di Jakarta.

Distribusi Pangan dan Kesenjangan Harga

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, Provinsi DKI Jakarta melakukan perdagangan antar wilayah. Aktivitas perdagangan tersebut membentuk rantai distribusi dari produsen penghasil pangan hingga konsumen akhir di DKI Jakarta. Bahkan dipasarkan kembali ke daerah lain.

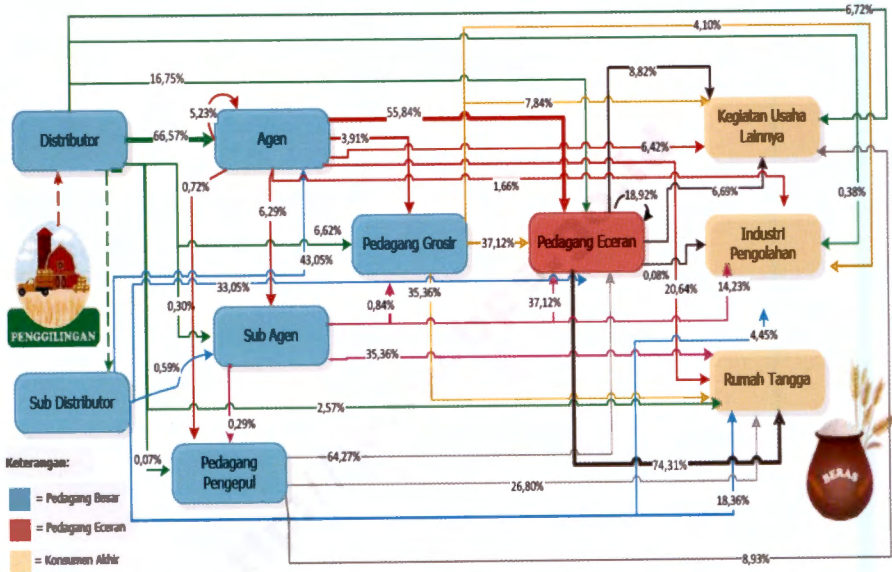
Rantai distribusi ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Jika rantai distribusi dapat terwujud secara efisien, maka pergerakan suatu komoditas dari produsen ke konsumen akan ditempuh dengan biaya yang paling murah. Hal ini dapat berdampak pada pembagian nilai tambah yang adil untuk setiap pelaku perdagangan yang terlibat diiringi dengan tendensi harga yang terjangkau konsumen.

Karena itu, distribusi pangan yang bermasalah dicirikan terjadinya disparitas harga yang tinggi antara di tingkat produsen dengan konsumen. Selain itu, ketersediaan pangan yang kurang mencukupi saat dibutuhkan, terutama di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta (BPS 2016a).

Seperti dijelaskan pada Tabel 3.1, beras merupakan pangan utama dengan tingkat kebutuhan tertinggi di DKI Jakarta. Hal ini terlihat pula dari cukup kompleksnya rantai distribusi perdagangan beras di DKI Jakarta. Hasil survei pola distribusi perdagangan beras yang dilakukan BPS tahun 2016 menunjukkan secara umum banyak fungsi kelembagaan pada level pedagang besar yang berperan dalam jalur jual-beli. Yakni, distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, hingga melibatkan pedagang pengepul.

Fungsi kelembagaan lainnya yang berperan dalam distribusi beras dari pedagang besar ke konsumen akhir di DKI Jakarta, yaitu pedagang pengecer. Konsumen akhir beras di DKI Jakarta dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rumah tangga, industri pengolahan, dan kegiatan

usaha lainnya. Secara detail, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Pola distribusi perdagangan beras di DKI Jakarta (BPS 2016a)

Menurut hasil studi BPS (Gambar 3.9), pola utama distribusi perdagangan beras di DKI Jakarta yaitu produsen → distributor → agen → pedagang eceran → konsumen akhir. Hasil studi BPS juga menunjukkan, di DKI Jakarta komoditas beras dan gula pasir memiliki pola utama distribusi perdagangan yang berbeda dengan komoditas telur ayam ras (Tabel 3.4). Di antara keempat komoditas tersebut, beras dan gula pasir memiliki pola utama distribusi perdagangan yang lebih panjang dibandingkan pada telur ayam ras dan minyak goreng.



Tabel 3.4. Pola utama distribusi perdagangan sejumlah komoditas pangan di DKI

Komoditas	Pola utama distribusi perdagangan
Beras	produsen → distributor → agen → pedagang eceran → konsumen akhir
Gula pasir	produsen → distributor → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir
Telur ayam ras	produsen → distributor → pedagang eceran → konsumen akhir
Minyak goreng	produsen → distributor → pedagang eceran → konsumen akhir

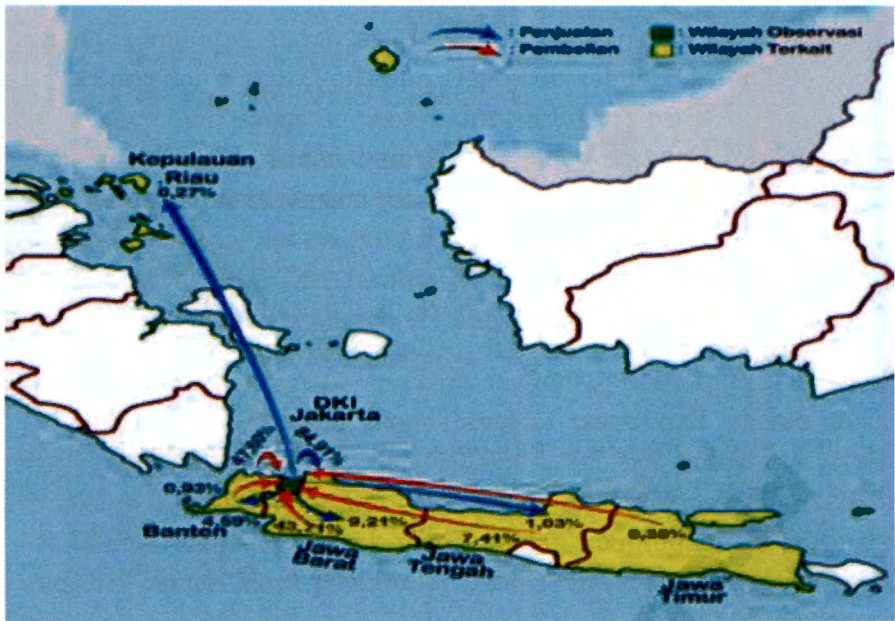
Sumber: BPS (2016a,b)

Di DKI Jakarta distribusi beras berawal dari produsen (penggilingan padi) ke distributor yang menjual sebagian besar persediaan berasnya ke agen (66,57%) (Gambar 3.9). Selanjutnya, sebagian besar pasokan beras di agen (55,84%) dijual ke pedagang eceran. Akhirnya, hampir 3/4 persediaan beras di pedagang eceran (74,31%) dijual ke rumah tangga sebagai konsumen akhir.

Dengan kata lain, jalur distribusi utama perdagangan beras di DKI Jakarta dari produsen sampai dengan konsumen akhir melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu distributor, agen, dan pedagang eceran. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa rantai distribusi utama beras tersebut berpotensi dapat berkembang hampir dua kali lipat lebih panjang ketika jalur distribusi perdagangan beras yang terjadi yaitu produsen → distributor → sub distributor → agen → sub agen → pedagang grosir/ pedagang pengepul → pedagang eceran → konsumen akhir.

Hasil survei menunjukkan bahwa DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan provinsi yang mempunyai potensi jalur distribusi perdagangan beras terpanjang. Namun, jalur terpanjang tersebut bukan merupakan jalur utama dari pendistribusian beras. Data perdagangan tahun 2016, hampir 85% pasokan beras yang masuk/ada di DKI Jakarta dijual untuk memenuhi kebutuhan penduduk/konsumen akhir beras di

Ibukota Negara itu. Peta distribusi perdagangan beras disajikan pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10. Peta distribusi perdagangan beras di Provinsi DKI Jakarta (BPS 2016a)

Pola distribusi perdagangan beras di DKI Jakarta tersebut di atas berbeda dengan pola penjualan produksi beras secara nasional. Di tingkat nasional, hampir 47% dari produksi beras produsen dijual kepada pedagang eceran. Setelah itu, proporsi terbesar penjualan beras dari produsen tertuju kepada pedagang grosir (20,72%) dan rumah tangga (19,38%).

Secara nasional, pada tingkat pedagang fungsi kelembagaan lainnya yang terlibat dalam pola distribusi perdagangan beras yaitu distributor, agen, pedagang pengepul, dan supermarket/swalayan. Sedangkan konsumen akhir di tingkat nasional secara umum dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya (BPS 2016b).



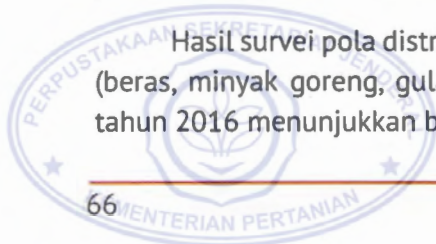
Contoh pola distribusi pangan lainnya yang menarik di Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk komoditas telur ayam ras. Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pasokan telur ayam ras, baik dari wilayah Jakarta maupun dari wilayah sekitarnya. Sekitar 34% pasokan telur ayam ras DKI Jakarta dipenuhi dari wilayah Jakarta sendiri. Sedangkan sebagian besar sisanya (66%) dipenuhi dari Banten (40,9%), Jawa Barat (16%), Jawa Timur (9%), dan Jawa Tengah (0,1%).

Dari sisi distribusi, sebagian besar (89%) pasokan telur ayam ras tersebut dipasarkan di wilayah Jakarta. Uniknya, sekitar 12% pasokan telur dipasarkan kembali ke Jawa Barat (8%) dan Banten (3%) (BPS, 2016c). Distribusi perdagangan telur ayam ras di Provinsi DKI Jakarta cukup kompleks karena melibatkan tujuh pedagang perantara. Rantai utama distribusi perdagangan telur ayam ras Provinsi DKI Jakarta melibatkan produsen, distributor, pedagang eceran, dan konsumen akhir (Tabel 3.4).

Distributor yang mendapatkan pasokan dari produsen dan dari sesama distributor lain, mendistribusikan sebagian besar pasokan ke pedagang besar lain yaitu sub distributor, agen, sub-agen, pedagang grosir, dan bahkan pedagang pengepul untuk pemenuhan kebutuhan persediaannya. Oleh pedagang besar tersebut, sebagian besar pasokan kemudian didistribusikan ke pedagang eceran. Sisanya didistribusikan ke sesama pedagang besar lain untuk memenuhi kebutuhan stok, atau langsung didistribusikan ke konsumen akhir seperti industri pengolahan, kegiatan usaha lain seperti rumah makan, rumah sakit, dan katering, serta rumah tangga.

Banyaknya rantai distribusi perdagangan telur ayam ras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Namun, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi delapan rantai ketika melalui jalur: produsen - distributor - sub distributor - agen - sub agen - pedagang pengepul - pedagang grosir - pedagang eceran - konsumen akhir (BPS, 2016c).

Hasil survei pola distribusi perdagangan empat komoditas strategis (beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras) yang dilakukan BPS tahun 2016 menunjukkan bahwa secara nasional DKI Jakarta merupakan



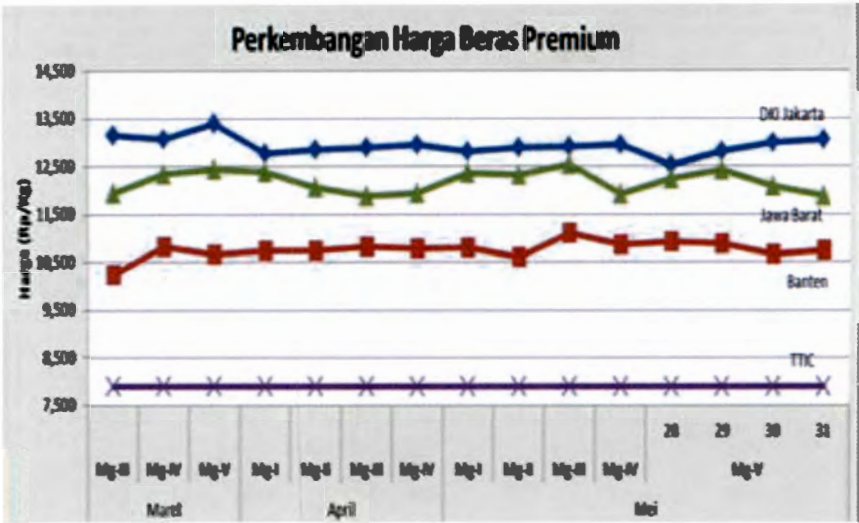
provinsi yang memiliki potensi pola distribusi terpanjang untuk keempat komoditas strategis tersebut (BPS 2016b). Dengan menggunakan metode studi yang sama pada tahun 2015, BPS melaporkan bahwa DKI Jakarta juga memiliki alur distribusi perdagangan terpanjang untuk komoditas daging ayam ras (BPS 2015b).

Sementara itu, potensi pola terpendek distribusi perdagangan beras dan telur ayam ras terjadi di Provinsi Aceh, gula pasir di Provinsi Jambi, minyak goreng di Provinsi Bengkulu (BPS 2016b), cabai merah dan jagung pipilan di Provinsi Sulawesi Utara, bawang merah di Provinsi Maluku Utara, dan daging ayam ras di Provinsi Kalimantan Barat (BPS 2015b)

Seperti dijelaskan sebelumnya, panjang-pendeknya rantai perdagangan komoditas dapat mempengaruhi perbedaan harga komoditas di tingkat produsen dan konsumen. Hasil studi BPS tahun 2015 dan 2016 menunjukkan DKI Jakarta memiliki potensi rantai distribusi perdagangan beras terpanjang.

Data Panel Harga Harian BKP tahun 2017 menunjukkan bahwa perkembangan dan rata-rata harga beras premium di DKI Jakarta (Rp 12.846/kg) lebih tinggi dibandingkan harga beras premium di Jawa Barat (Rp 12.165/kg) dan Banten (Rp 10.810/kg) (Gambar 3.11). Harga beras premium di tingkat penjual tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga beras premium di tingkat penggilingan yang mencapai Rp 9.383,68/kg (BPS 2017).





Gambar 3.11. Perkembangan harga beras premium di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten periode Maret – Mei 2017 (Panel Harga Harian BKP, 2017)

Perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen juga dapat tercermin dari parameter rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP). Menurut BPS (2016b), MPP menggambarkan besarnya keuntungan yang diambil pada kegiatan perdagangan dengan masih mengikutsertakan biaya pengangkutan barang (selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian).

Nilai rasio MPP yang tinggi secara tidak langsung dapat mencerminkan tingginya perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen, serta beban yang besar pada konsumen akhir. Besarnya rata-rata rasio MPP untuk sejumlah komoditas di DKI Jakarta dan nasional disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Rata-rata rasio margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) komoditas strategis di DKI Jakarta dan rata-rata nasional

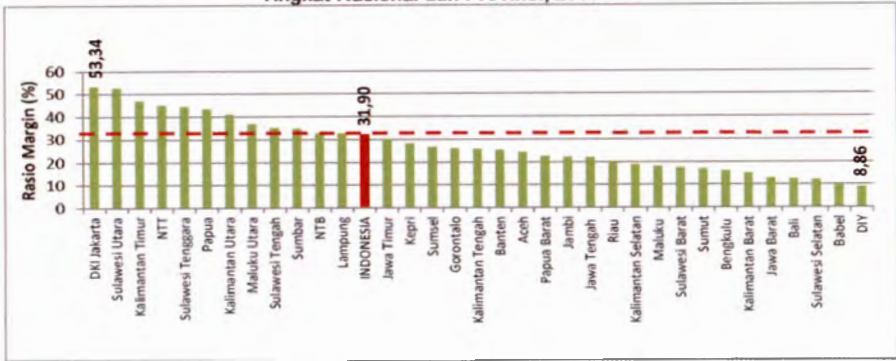
Komoditas	MPP (%)	
	DKI Jakarta	Nasional
Beras ¹	13,18	10,57
Jagung pipilan ²	53,34	31,90
Cabai merah ²	16,30	25,33
Bawang merah ²	40,26	22,61
Daging ayam ras ²	20,48	11,63
Telur ayam ras ¹	8,06	8,76
Gula pasir ¹	9,56	9,25
Minyak goreng ¹	10,13	9,79

Keterangan sumber: ¹BPS (2016b), ²BPS (2015b)

Pada Tabel 3.5 terlihat bahwa rasio MPP beras, jagung pipilan, bawang merah, daging ayam ras, gula pasir dan minyak goreng di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio MPP komoditas tersebut secara nasional. Bahkan menurut data BPS, rasio MPP jagung pipilan di DKI Jakarta (53,34%) merupakan yang tertinggi secara nasional (Gambar 3.12) dan paling tinggi pula dibandingkan MPP komoditas lain di DKI Jakarta. Hal tersebut berarti secara umum pedagang jagung pipilan mendapatkan keuntungan terbesar dari nilai pembeliannya.

Data lainnya menunjukkan rasio MPP beras di DKI Jakarta pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,93% (BPS 2015b). Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 13,18% (Tabel 3.5).

Rata-Rata Rasio Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditi Jagung Pipilan Tingkat Nasional dan Provinsi, 2015



Gambar 3.12. Rata-rata rasio MPP komoditas jagung pipilan tingkat nasional dan provinsi (BPS 2015b)

Komoditas bawang merah memiliki rasio MPP (40,26%) tertinggi kedua di DKI Jakarta. Rasio MPP bawang merah tersebut hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio MPP komoditas tersebut secara nasional (22,61%). Karena itu, DKI Jakarta merupakan pasar bawang merah yang menggiurkan. Hal lain yang menarik untuk dicatat yaitu komoditas cabai merah di DKI Jakarta memiliki rasio MPP (16,30%) yang relatif jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata rasio MPP komoditas tersebut secara nasional (25,33%) (Tabel 3.5).

Berapa besarnya rasio MPP di tingkat pedagang? Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa untuk setiap komoditas rasio MPP di tingkat pedagang besar dan pedagang eceran tidak berbeda jauh. Sebagai contoh, pedagang besar beras rata-rata memperoleh rasio MPP sebesar 12,50%. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dari rata-rata rasio MPP yang diperoleh pedagang eceran yaitu sebesar 13,90%. Bahkan untuk komoditas gula pasir rasio MPP yang diperoleh pedagang besar dan eceran hampir sama. Dengan kata lain, perbedaan rasio MPP terlihat lebih besar untuk komoditas yang berbeda dibandingkan perbedaan antar pedagang.

Tabel 3.6. Rata-rata rasio MPP sejumlah komoditas di DKI Jakarta menurut kategori pedagang

Komoditas	MPP (%) menurut kategori pedagang		
	Besar	Eceran	Besar & Eceran
Beras	12,50	13,90	13,18
Telur ayam ras	7,50	8,67	8,06
Gula pasir	9,58	9,54	9,56
Minyak goreng	11,27	9,11	10,13

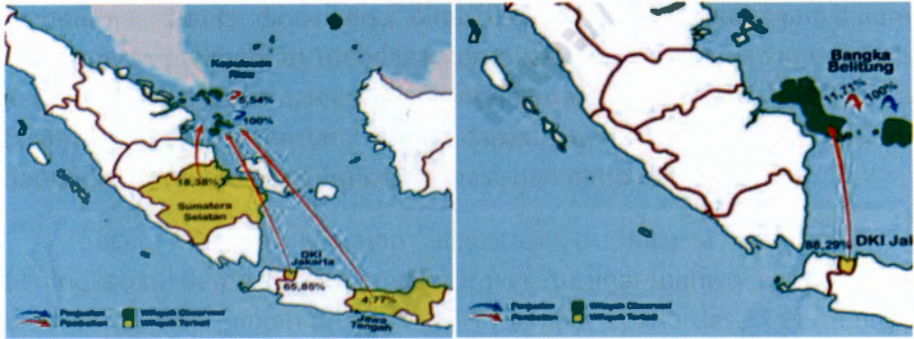
Sumber: BPS (2016b)

Jakarta Sebagai Pemasok Pangan?

Keterbatasan sumber daya lahan pertanian dan kepadatan penduduk yang tinggi mengharuskan Jakarta untuk mendatangkan pangan dari daerah lain secara berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, mungkinkah DKI Jakarta pada saat bersamaan menjadi pemasok pangan bagi daerah lain?

Sejumlah data distribusi perdagangan pangan di DKI Jakarta menunjukkan tidak semua pangan yang dipasok ke DKI Jakarta dijual di DKI Jakarta. Hal tersebut mengindikasikan sejumlah pasokan pangan yang masuk ke DKI Jakarta dijual kembali ke daerah lain. Sebagai contoh, hampir 85% dari pasokan beras yang masuk dipasarkan di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian kecil lainnya dijual ke wilayah-wilayah terdekat seperti Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan bahkan diperdagangkan antar pulau ke Provinsi Kepulauan Riau (Gambar 3.10).

DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan sumbangan stok beras terbesar ke Provinsi Kepulauan Riau yaitu 65,85% (Gambar 3.13a). Demikian pula, Provinsi Bangka Belitung mendatangkan sebagian besar pasokan berasnya (88,29%) dari DKI Jakarta (Gambar 3.13b) (BPS 2016a). Beras yang diperdagangkan antar pulau tersebut di antaranya berupa produk *re-packing*, seperti beras dalam kemasan 5 kg, 10 kg, dan 20 kg.



Gambar 3.13. Peta distribusi perdagangan beras di Provinsi Kepulauan Riau (a) dan Bangka Belitung (b) (BPS 2016a)

Selain beras, DKI Jakarta juga memasok jagung pipilan, gula pasir, telur ayam ras, dan minyak goreng ke daerah lain. Sebagai contoh, DKI Jakarta menjual kembali sebagian kecil pasokan jagung pipilan yang diterimanya ke Jawa Barat (0,21%) dan Banten (1,77%). Dua provinsi itu terdapat banyak pabrik pakan ternak yang berbahan baku jagung.

Meski bukan produsen gula pasir, data BPS mencatat bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang mendistribusikan gula pasir terbesar ke provinsi lain yaitu mencapai 30,25% dari total kebutuhannya. BPS juga mencatat DKI Jakarta merupakan provinsi dengan luas jaringan perdagangan terbesar untuk komoditi minyak goreng. DKI Jakarta memasok minyak goreng ke 15 provinsi (BPS, 2015c).

Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa selain menerima pasokan pangan dari provinsi lain, pada saat bersamaan DKI Jakarta juga merupakan pemasok sejumlah pangan tertentu ke provinsi lain termasuk di luar Jawa. Hal ini dimungkinkan mengingat DKI Jakarta dengan fasilitas infrastruktur yang lebih baik dibandingkan provinsi lain dapat berperan sebagai perlintasan perdagangan pangan antar wilayah.

BAB IV

PERAN STRATEGIS WILAYAH PENYANGGA PANGAN JAKARTA



Dalam setiap kabinet pemerintah, upaya pemenuhan pangan yang cukup bagi masyarakat selalu menjadi salah satu tujuan prioritas dari program-program yang dijalankan. Demikian juga pada Kabinet Kerja Jokowi-Kalla sekarang ini. Salah satu butir dari 9 Agenda Prioritas dalam NAWACITA tidak lagi sebatas memenuhi kebutuhan pangan, tapi target tersebut ditingkatkan dalam rangka terwujudnya kedaulatan pangan.

Perkembangan ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta yang direpresentasikan oleh tingkat perkembangan harga yang terjadi di pasar Jakarta sering menjadi barometer perkembangan harga pangan di Indonesia. Tingkat harga pangan yang terjadi di provinsi ini pada setiap saat selalu menjadi acuan dan isu bagi perkembangan harga daerah lainnya.

Sebagai contoh pada Februari 2015, media pemberitaan elektronik, cetak, dan *daring banyak* memberitakan “melambungnya” harga beras untuk menggambarkan adanya kenaikan yang cukup tinggi. Pemberitaan media ini telah membangun opini publik bahwa harga beras di Indonesia telah meningkat sangat tajam. Padahal dalam kenyataannya, sebagian besar kota-kota besar lainnya di Indonesia harga beras pada waktu itu relatif stabil dan luput dari pemberitaan media.

Karena itu, untuk menjaga harga pangan di Jakarta tidak bergejolak yang berdampak luas terhadap stabilisasi harga pangan di Indonesia, upaya penyediaan dan pemenuhan pangan untuk Provinsi DKI Jakarta menjadi penting untuk dilakukan. Berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya, sebagai barometer perkembangan harga pangan nasional, Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini justru hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri sebesar 2%. Sebanyak 98% didatangkan dari luar DKI Jakarta (Dinas Pertanian, Kelautan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, 7 April 2017).

Sementara jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4,0% dari jumlah penduduk Indonesia terus tumbuh 1,07% per tahun (Bappenas, 2010). Dengan demikian dapat dibayangkan kemampuan Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi pangannya ke depan dari produksi sendiri akan terus menurun dan tidak lagi sebesar 2% pada tahun-tahun mendatang.

Dengan berpijak pada kondisi DKI Jakarta saat ini, seperti ketersediaan lahan yang tidak rasional lagi, pemenuhan pangan untuk warga DKI Jakarta akan lebih cocok dengan mengedepankan konsep ketahanan pangan dibanding kemandirian pangan. Sesuai UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Sementara Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pada konsep Ketahanan Pangan ini tidak mempersoalkan asal-usul dari sumber daerah produksi pangan tersebut. Namun demikian, pada tataran nasional upaya membangun kemandirian dan kedaulatan pangan sangat relevan untuk diwujudkan.

Agar upaya memenuhi pangan untuk masyarakat DKI Jakarta bisa dilakukan, konsep pendekatan dalam membangun ketahanan pangan harus betul-betul memperhatikan potensi pengembangan pangan. Terutama dengan lebih menitikberatkan pada upaya membangun sentra-sentra perdagangan, memperkuat pasokan pangan khususnya dari luar DKI Jakarta, serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Dengan lahan yang sangat terbatas, keberadaan wilayah-wilayah penyangga pangan bagi masyarakat DKI Jakarta mempunyai peran yang sangat strategis dalam stabilisasi ketersediaan dan harga pangan bagi masyarakat Jakarta.

Kemampuan DKI Jakarta Memproduksi Pangan

Tidak mengherankan seperti apa yang dikatakan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta pada berbagai kesempatan. Misalnya, saat pembukaan Rapat Teknis Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 pada 7 April 2015, bahwa kemampuan provinsi ini dalam memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri hanya 2% adalah sangat beralasan. Apalagi mengingat dari sekian banyak pangan yang dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta, hanya pangan beras yang dihasilkan sendiri dan itu pun dalam jumlah yang relatif sangat kecil terhadap total kebutuhan (Tabel 4.1).

Untuk komoditas pangan strategis lainnya seperti jagung, kedelai, telur, gula, bawang merah, dan cabai dapat dikatakan Provinsi DKI hampir sama sekali tidak membudidayakan dan memproduksinya. Untuk daging sapi, selain memelihara ternak sapi, Provinsi DKI Jakarta juga memproduksi daging sapi yang sebagian besar ternaknya didatangkan dari luar.



Demikian juga untuk daging ayam. Walaupun tidak membudidayakan ternak ayam, DKI Jakarta setiap tahun memproduksi daging ayam dengan jumlah yang cenderung meningkat. Provinsi ini juga tidak memproduksi gula, sehingga semua kebutuhan gula pasok dari luar. Hal yang sama juga dengan komoditas jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai, dapat dikatakan DKI Jakarta tidak memproduksi jenis-jenis pangan ini. Pasokan sepenuhnya mengandalkan pasokan dari luar.

Tabel 4.1. Status DKI Jakarta Dalam Membudidayakan dan Memproduksi Pangan Strategis, 2016

Jenis Pangan	Status Membudidayakan/Memproduksi
1. Padi/Beras	Ya/Ya
2. Jagung	Tidak/Tidak
3. Kedelai	Tidak/Tidak
4. Ternak Sapi/Daging Sapi	Ya/Ya
5. Ternak Ayam/Daging Ayam	Tidak/Ya
6. Ayam Petelur/Telur	Tidak/Tidak
7. Tebu/Gula	Tidak/Tidak
8. Bawang Merah	Tidak/Tidak
9. Cabai	Tidak/Tidak

Mengingat tidak semua komoditas pangan strategis tersebut dibudidayakan atau diproduksi DKI Jakarta, hanya komoditas yang dibudidayakan/diproduksi seperti padi, sapi/daging sapi, dan daging ayam yang dipaparkan dalam buku ini.

Dalam kurun waktu 2010-2015, rata-rata produksi padi di Jakarta mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni 9,42% per tahun. Dari 11.164 ton GKG pada tahun 2010 menjadi tinggal 6.361 ton GKG pada tahun 2015. Padahal secara nasional pada periode yang sama rata-rata produksi padi nasional mengalami peningkatan 2,54% per tahun (Tabel 4.2).

Penurunan ini terjadinya lebih disebabkan adanya penurunan luas panen akibat beralih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Jika tahun 2010 masih sekitar 2.015 ha, tahun 2015 tinggal 1.137 ha.

Sementara itu, produktivitas tidak banyak berubah dari 5,54 ton GKG/ha tahun 2010 naik menjadi 5,60 ton GKG/ha tahun 2015.

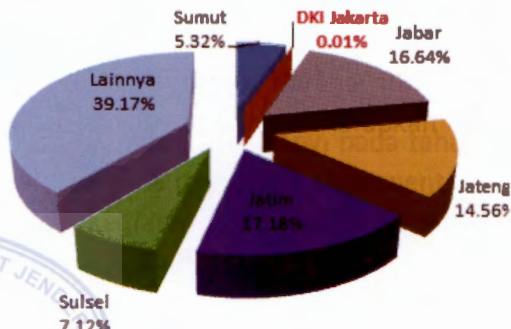
Tabel 4.2. Perkembangan Produksi Padi di Sentra Provinsi Produksi dan DKI Jakarta di Indonesia, 2010-2015 (Ton)

No.	Provinsi	Tahun						r (%/th)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Sumut	3582.302	3.607.403	3.715.514	3.727.249	3.631.039	4.044.829	1,84
2.	DKI Jakarta	11.164	9.516	11.044	10.268	7.541	6.361	-9,42
3.	Jabar	11.737.070	11.633.891	11.271.861	12.083.162	11.644.899	11.373.144	-0,24
4.	Jateng	10.110.830	9.391.959	10.232.934	10.344.816	9.648.104	11.301.422	1,92
5.	Jatim	11.643.773	10.576.543	12.198.707	12.049.342	12.397.049	13.154.967	3,06
6.	Sulsel	4.382.443	4.511.705	5.003.011	5.035.830	5.426.097	5.471.806	4,73
7.	Lainnya	25.001.812	26.025.887	26.623.055	28.029.042	28.091.736	30.045.312	3,43
	INDONESIA	66.469.394	65.756.904	69.056.126	71.279.709	70.846.465	75.397.841	2,54

Sumber: BPS, 2016 (diolah).

Dengan luas panen yang amat sangat terbatas, rata-rata kontribusi DKI Jakarta terhadap produksi padi nasional selama periode 2010-2015 hanya sebesar 0,01% (Gambar 4.1). Sementara itu, kontribusi Jawa Timur sebagai provinsi penghasil padi utama sebesar 17,18%. Disusul Jawa Barat (16,64%), Jawa Tengah (14,56%), Sumatera Utara sebagai penghasil padi terbesar kelima berkontribusi nasional sebesar 5,32%. Kontribusi provinsi lainnya 39,17%.

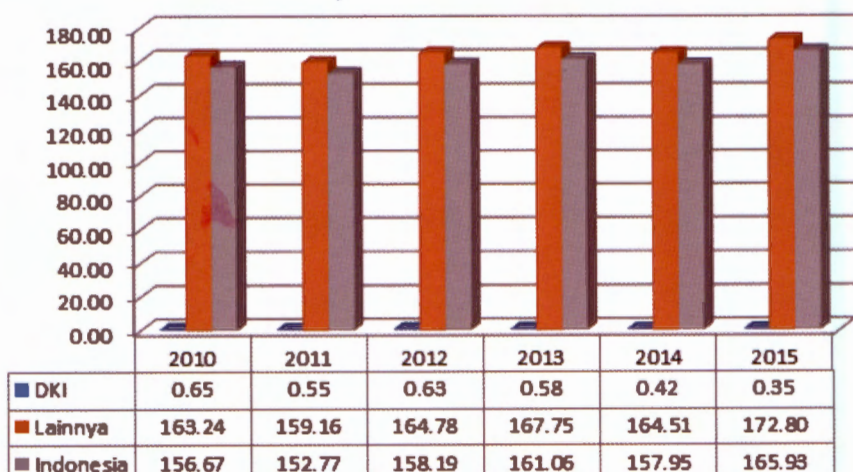
Gambar 4.1. Rataan Sebaran Produksi Padi di Indonesia, 2010-2015



Sumber: BPS, 2016 (diolah)

Dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, sementara jumlah produksi padi/beras terus menurun, ketersediaan beras/kapita/tahun di Provinsi Jakarta cenderung menurun semakin cepat. Pada tahun 2010, ketersediaan beras/kapita/tahun dari produksi sendiri sekitar 0,65 kg. Pada tahun 2015 tinggal 0,35 kg (Gambar 4.2).

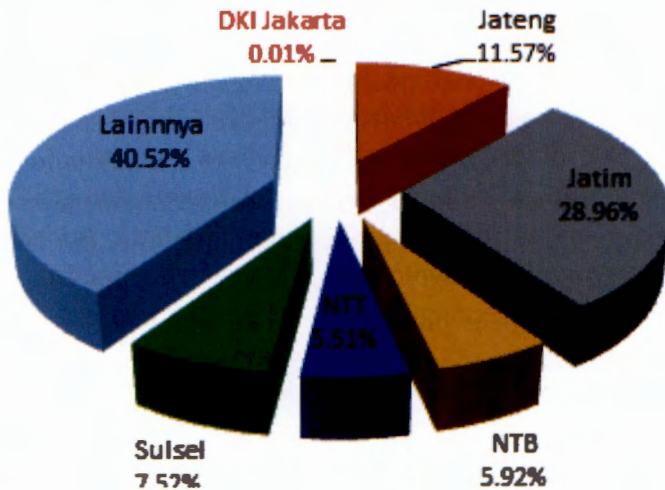
Pada periode yang sama, di tingkat nasional ketersediaan beras per kapita/tahun, produksi meningkat dari 156,67 kg pada tahun 2010 menjadi 165 kg pada tahun 2015. Ketersediaan ini sudah di atas rata-rata konsumsi/kapita/tahun, baik menggunakan angka 114,80 kg, 124,89 kg maupun 132,98 kg/kap/tahun. Dengan jumlah ketersediaan beras per kapita/tahun sebesar tersebut, dari sisi produksi dapat dikatakan bahwa kebutuhan pangan beras masyarakat DKI Jakarta selama ini sebenarnya hampir 100% berasal dari luar DKI Jakarta.



Gambar 4.2. Perkembangan Ketersediaan beras produksi sendiri di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lainnya, 2010-2015 (kg beras/kap/th)

Dari rata-rata populasi sapi di Indonesia selama periode 2010-2016 sebanyak 14,76 juta ekor, hanya sekitar 0,01% atau 406 ribu ekor yang ditenakkan di DKI Jakarta (Gambar 4.3). Populasi ternak sapi tertinggi

terdapat di Jatim (28,98%), disusul Jateng dan Sulsel dengan populasi masing-masing 11,57% dan 7,52%. Sementara itu, populasi di NTB dan NTT hampir berimbang yaitu 5,92% dan 5,51% dari total populasi sapi di Indonesia. Sisanya 40,52% tersebar di 29 provinsi lainnya.

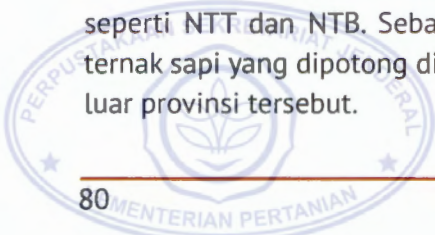


Sumber: BPS, 2017 (diolah)

Gambar 4.3. Rataan Sebaran Populasi Sapi di Indonesia, 2010-2016

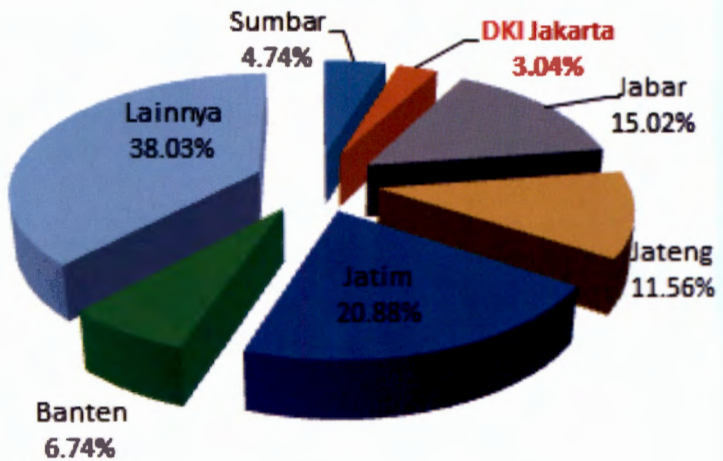
Meski populasi sapi di DKI Jakarta hanya sekitar 0,01%, namun demikian jumlah produksi daging sapi di provinsi ini mencapai 3,04% dari total produksi daging di Indonesia (Gambar 4.4). Dengan membandingkan kedua pangsa tersebut, dapat dipastikan sebagian besar (99,7%) ternak sapi yang dipotong berasal dari luar DKI Jakarta dan hanya sebanyak 0,3% berasal dari DKI Jakarta.

Tampak juga bahwa tidak semua dari lima provinsi utama sentra ternak sapi masuk dalam lima sentra produksi daging sapi di Indonesia. Sebab, sebagian besar ternak sapinya diperdagangkan ke provinsi lainnya, seperti NTT dan NTB. Sebaliknya, dengan DKI Jakarta, sebagian besar ternak sapi yang dipotong di Provinsi Jawa Barat dan Banten berasal dari luar provinsi tersebut.



Karena itu tampak, walaupun bukan sebagai sentra ternak sapi di Indonesia, tapi tingkat pemotongan ternak sapi di Jawa Barat adalah terbesar kedua (15,02%) setelah Jawa Timur (20,88%). Demikian juga Banten, jumlah pemotongan ternak sapi menduduki urutan keempat (6,74%) setelah Jateng (11,56%).

Dari informasi ini cukup penting dan menarik untuk menjadi basis dalam pengembangan ternak sapi sebagai daerah penyangga produksi daging DKI Jakarta. Jabar dan Banten, meski posisinya sangat dekat dengan DKI Jakarta yang sebenarnya lebih efisien dari biaya transportasi, namun kenyataannya cukup sulit menjadikan kedua lokasi tersebut sebagai daerah penyangga untuk memasok daging sapi bagi daerah DKI Jakarta. Terlihat sampai saat ini kedua provinsi tersebut statusnya sama dengan DKI Jakarta yaitu masih defisit dalam perdagangan ternak sapi.



Sumber: BPS, 2017 (diolah)

Gambar 4.4. Rataan Sebaran Populasi Sapi di Indonesia, 2010-2016

Tabel 4.3. Perkembangan Produksi Daging Sapi (Pemotongan Sapi) di Sentra Provinsi Produksi Daging Sapi dan DKI Jakarta di Indonesia, 2010-2016 (Ton)

No.	Provinsi	Tahun							r (%/th)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Sumbar	20.442	20.287	22.638	23.099	24.943	26.007	26.787	4,99
2.	DKI Jakarta	6.058	9.413	12.206	18.021	19.260	20.166	20.166	16,83
3.	Jabar	76.066	78.476	74.312	71.881	67.073	75.478	77.231	-0,47
4.	Jateng	51.001	60.322	60.893	61.141	55.988	55.332	56.029	0,01
5.	Jatim	109.016	112.447	110.762	100.707	97.908	95.431	97.675	-2,79
6.	Banten	20.326	25.806	36.121	36.676	37.672	37.164	39.765	8,84
7.	Lainnya	153.541	178.584	191.973	193.294	194.825	197.083	206.456	3,77
	INDONESIA	436.450	485.335	508.905	504.819	497.669	506.661	524.109	2,12

Sumber: BPS, 2017 (diolah)

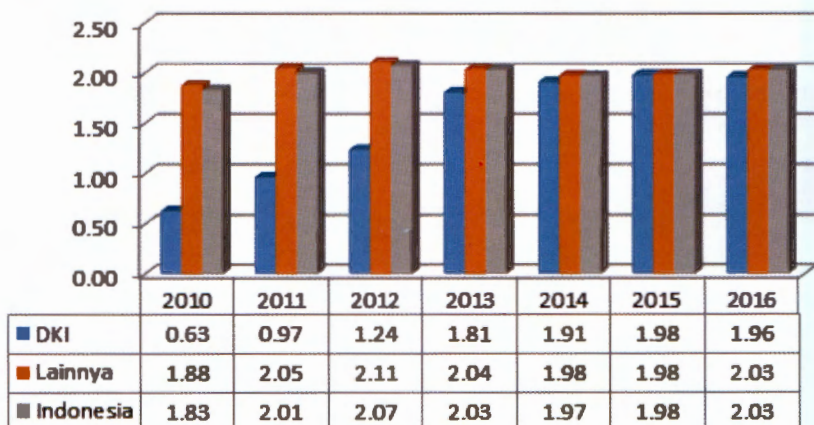
Dalam periode 2010-2016, produksi daging sapi (jumlah pemotongan sapi) di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu 16,83% per tahun, sementara secara nasional hanya tumbuh sebesar 2,12%. Sebaliknya Jawa Timur sebagai sentra ternak sapi, produksi daging sapi (jumlah pemotongan sapi) turun 2,79% per tahun (Tabel 4.3).

Tingkat pertumbuhan produksi daging (pemotongan sapi) di DKI Jakarta yang cukup besar ini sebagai petunjuk bahwa permintaan masyarakat DKI Jakarta terhadap daging sapi meningkatkan cukup besar. Pada tahun 2010, produksi daging sapi (pemotongan sapi) di DKI Jakarta hanya sebesar 6.1 ribu ton dan pada tahun 2016 menjadi 20,2 ton. Peningkatan yang tinggi juga terjadi di Banten, yaitu 8,84% per tahun.

Sejalan dengan pertumbuhan produksi daging di DKI Jakarta mencapai 16,83% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk hanya sekitar 1,07% per tahun, menyebabkan ketersediaan daging sapi yang berasal dari pemotongan ternak sapi di provinsi ini juga terus meningkat tiap tahunnya. Jika tahun 2010 hanya 0,63 kg/kap/tahun, maka tahun 2015 menjadi 1,98 kg/kap/tahun. Tahun 2016 sedikit menurun menjadi 1,96

kg/kap/tahun. Namun masih lebih dari rata-rata ketersediaan nasional maupun dari rata-rata provinsi lainnya (Gambar 4.5).

Pertumbuhan ketersediaan yang cukup bagus ini tidak otomatis menunjukkan kemampuan yang semakin baik bagi DKI Jakarta dalam penyediaan daging dari produksi sendiri mengingat hampir sepenuhnya ternak sapi yang dipotong di DKI Jakarta didatangkan dari luar DKI Jakarta. Untuk itu, dalam memperkuat upaya penyediaan daging sapi di DKI Jakarta, perlu membangun kerja sama yang kuat dengan daerah lainnya dalam produksi dan penyediaan ternak sapi, tidak bukan hanya sekedar membeli ternak sapi dari daerah lainnya.



Gambar 4.5. Perkembangan Ketersediaan Daging Sapi Dari Pematangan Sendiri di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lainnya, 2010-2016 (kg/kap/th)

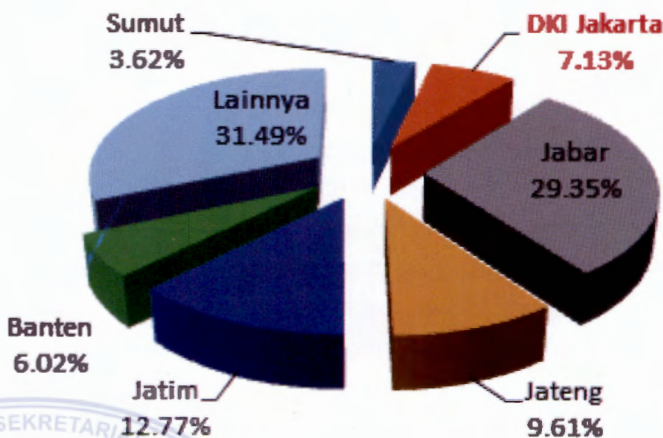
Sama halnya dengan produksi daging sapi, perkembangan produksi daging ayam (ayam pedaging, ayam kampung, dan ayam petelur) di Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat dalam periode 2010-2016, yaitu sebesar 1,09% per tahun. Angka itu masih di bawah pertumbuhan nasional yang mencapai 5,13% per tahun (Tabel 4.6). Perlu ditekankan kembali bahwa dalam produksi daging ayam di DKI Jakarta hampir semua ternak ayam berasal dari luar dan hanya pematongannya saja dilakukan di DKI Jakarta.

Tabel 4.4. Perkembangan Produksi Daging Ayam di Sentra Provinsi Produksi Daging Sapi dan DKI Jakarta di Indonesia, 2010-2016 (Ton)

No.	Provinsi	Tahun							r (%/th)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Sumut	72.546	64.721	57.983	67.345	65.863	68.531	70.445	0,49
2.	DKI Jakarta	124.668	127.696	125.205	163.123	106.729	133.595	140.275	1,09
3.	Jabar	431.127	526.137	531.130	598.190	577.771	563.155	563.080	3,41
4.	Jateng	150.347	151.092	166.584	177.157	184.296	202.338	208.932	5,96
5.	Jatim	204.921	205.287	212.502	220.021	260.941	269.336	276.089	5,91
6.	Banten	102.048	126.633	121.088	120.052	110.378	98.376	99.275	-2,43
7.	Lainnya	454.029	463.286	519.519	548.721	633.247	695.553	752.765	9,06
	Indonesia	1.539.686	1664.852	1.734.011	1.894.609	1.939.225	2.030.884	211.0861	5,13

Sumber: BPS, 2017 (diolah)

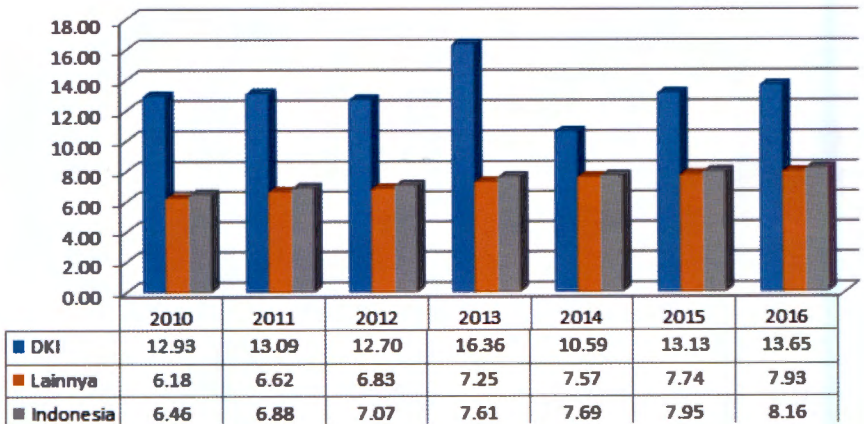
Dalam periode 2010-2016, walaupun tidak mempunyai ternak ayam, ternyata DKI Jakarta menduduki urutan keempat sebagai produksi utama dalam produksi daging ayam dengan pangsa 7,13%. Angka ini masih di bawah Jabar (29,35%), Jatim (12,7%), dan Jateng 9,61% (Gambar 4.6). Banten dan Sumut menduduki urutan kelima dan keenam dengan pangsa masing-masing 6,02% dan 3,62%. Sisanya 31,49% tersebar di 28 provinsi lainnya.



Gambar 4.6. Rataan Sebaran Produksi Daging Ayam di Indonesia, 2010-2016

Jumlah ketersediaan daging ayam di Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2010-2016 relatif stabil dan cenderung meningkat. Dari 12,93/kap/tahun pada tahun 2010 menjadi 13,65 kg/kap/tahun (Gambar 4.7). Dibanding dengan rata-rata nasional yang berkisar antara 6,18-7,93/kap/tahun, jumlah ketersediaan daging ayam di DKI Jakarta sekitar 78% lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Namun demikian, sama halnya dengan daging sapi. Angka ini patut dipahami secara hati-hati, karena tidak secara otomatis menunjukkan kinerja provinsi ini baik dalam penyediaan pangan protein dari daging ayam karena semua ternak ayamnya didatangkan dari luar.



Gambar 4.7. Perkembangan Ketersediaan Daging Ayam Dari Pematangan Sendiri di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lainnya, 2010-2016 (kg/kap/tahun)

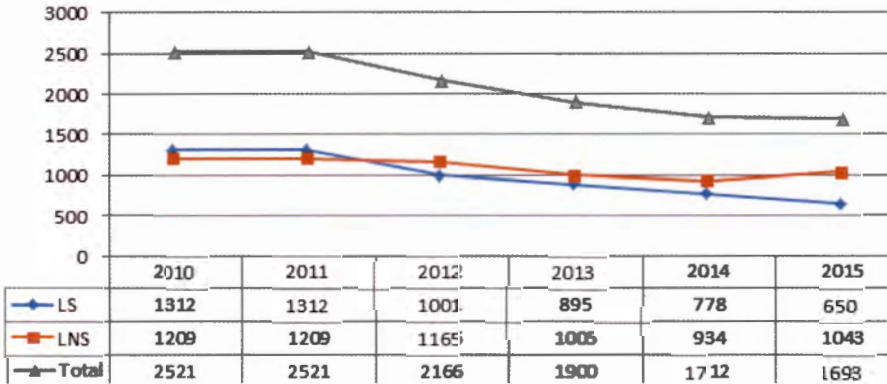
Upaya Penyediaan Pangan oleh Pemda DKI Jakarta

Tantangan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan pangan bagi warganya sangat berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Ciri utama Provinsi DKI Jakarta adalah lahan pertaniannya sangat sempit dan sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Itupun semakin

menurun secara tajam. Sementara di sisi lain, jumlah penduduk terus meningkat.

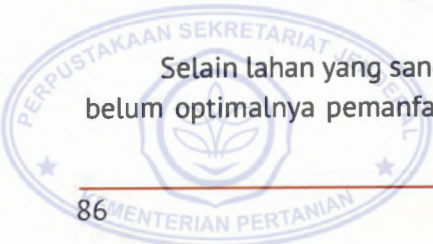
Pada tahun 2010, total luas lahan yang potensi untuk pertanian sebanyak 2.521 ha yang terdiri dari lahan sawah 1.312 ha dan lahan non sawah 1.209 ha. Jumlah penduduk pada tahun tersebut sekitar 9,6 juta jiwa. Pada tahun 2015 luas lahan pertanian tinggal 1.693 ha yang didominasi lahan non sawah seluas 1.043 ha, sementara lahan sawah hanya tinggal 650 ha. Sementara pada tahun 2015 jumlah penduduk meningkat pesat mencapai 10,2 juta jiwa (Gambar 4.8).

Selama periode 2010-2015, lahan sawah di DKI yang terkonversi ke penggunaan non pertanian sekitar 662 ha atau 50,5%. Karena itu dapat dibayangkan dalam sepuluh tahun ke depan akibat terus tumbuhnya kawasan perumahan dan industri akibat alih fungsi sawah dapat dipastikan tidak akan ada lagi lahan sawah di DKI Jakarta. Artinya sudah tidak bisa berharap lagi untuk memproduksi pangan beras di provinsi ini. Karena itu tantangan utama yang dihadapi DKI dalam memproduksi pangan adalah “tidak tersedianya” lahan.



Gambar 4.8. Perkembangan Luas Lahan Sawah (LS), Lahan Non Sawah (LNS) di Provinsi DKI Jakarta, 2010-2015

Selain lahan yang sangat terbatas, tantangan lainnya adalah masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi produksi yang ada, sehingga



produktivitas seperti padi tidak jauh beda dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2015, produktivitas padi di provinsi ini sekitar 5,6 ton GKG/ha. Padahal di provinsi tetangganya, Jawa Barat sudah mencapai 6,1 ton GKG/ha. Masyarakat pun belum banyak memanfaatkan lahan pekarangannya sebagai sumber tambahan pangan keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan sayur-sayuran.

Upaya penyediaan pangan bagi masyarakat DKI Jakarta juga dihadapkan pada tantangan terbatasnya infrastruktur pengolahan dan penyimpanan, serta pendistribusiannya ke konsumen. Sebagai daerah yang lahannya sangat terbatas, sebenarnya DKI Jakarta harus mempunyai sarana dan prasarana yang baik dalam pengolahan dan penyimpanan serta penyalurannya ke konsumen, sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati masyarakat DKI Jakarta. Keterbatasan ini menyebabkan stok pangan menjadi tidak memadai, tidak banyak mengalami proses pengolahan, dan harganya pun menjadi relatif mahal.

Tantangan lainnya adalah masih terdapatnya penduduk miskin, sehingga menjadi masalah dalam penyediaan pangan bagi warga di DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan sebagian warga tidak dapat mengakses pangan (salah satu pilar dari empat pilar dalam ketahanan pangan).

Selama 2 tahun terakhir (Maret 2015 dan Maret 2016), tercapat sekitar 384 ribu-399 ribu orang atau 3,75-3,93% dari total warga DKI yang termasuk kelompok masyarakat miskin. Meski jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 relatif lebih sedikit dari Maret 2015 (Tabel 4.7). Penyebab kemiskinan ini hampir 65% berasal dari komponen pangan dan hanya 35% berasal dari komponen non pangan. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya ketersediaan pangan yang mencukupi dan diikuti dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat kelas bawah terhadap pangan.

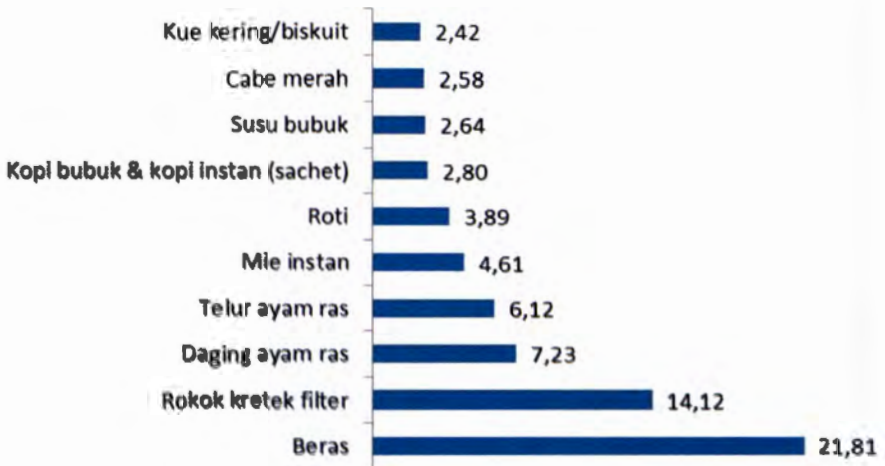
Tabel 4.5. Kontribusi Makanan dan Nonmakanan dalam Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta, 2015-2016

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (000)	% Penduduk Miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
Maret 2015	319.595 (65,57%)	167.793 (34,43%)	487.388 (100%)	398,92	3,93
Maret 2016	329.644 (64,59%)	180.715 (35,41%)	510.359 (100%)	384,30	3,75

Sumber: BPS DKI, Maret 2016.

Pada komponen makanan, ternyata yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap garis kemiskinan adalah pangan beras, yaitu mencapai 21,81% (Gambar 4.9). Pangan daging ayam ras dan telur ayam ras juga berkontribusi besar (menduduki urutan ke tiga dan ke empat setelah rokok kretek filter) terhadap pembentukan garis kemiskinan makanan, dengan kontribusi masing-masing 6,12% dan 4,61%.

Demikian juga cabai merah menduduki urutan kesembilan dari sepuluh komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan. Dengan demikian, upaya penyediaan pangan yang mencukupi perlu juga diikuti dengan program peningkatan pendapatan penduduk, serta program stabilisasi harga pangan agar masyarakat kelompok ini lebih akses terhadap pangan, terutama untuk pangan beras.



Gambar 4.9. Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan beserta Kontribusinya (%), Maret 2016

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan, beberapa langkah-langkah telah dilakukan Pemda DKI. Baik melalui peningkatan produksi pangan di lahan yang ada di daerah DKI Jakarta sendiri, peningkatan logistik dan distribusi/penyaluran pangan ke konsumen, maupun melalui regulasi dan bekerja sama dengan pemda luar DKI Jakarta dalam memastikan adanya peningkatan pasokan pangan dari luar daerah ke DKI Jakarta.

Dalam meningkatkan produksi pangan pada lahan yang ada di DKI, beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah yaitu perbaikan teknologi produksi dan penyediaan benih, khususnya untuk tanaman padi, perbaikan produktivitas dan kualitas serta nilai tambah produk tanaman hortikultura, meski jumlahnya masih sangat terbatas. Pengembangan tanaman hortikultura diarahkan melalui pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*) dan penerapan teknologi pengolahan hasil atau diversifikasi berbagai bentuk olahan produk hortikultura.

Dalam peningkatan logistik dan distribusi/penyalur pangan ke masyarakat, Pemda DKI bekerja sama dengan Perum Bulog untuk meningkatkan penyediaan stok dalam upaya stabilitas harga beras.

Pasokan beras Bulog tersebut didistribusikan melalui PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Pasar Jaya. PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Pemda DKI Jakarta dalam bidang pengadaan komoditi pangan dengan bekerja sama dengan produsen beras atau penggilingan padi di seluruh Indonesia untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan.

BUMD ini juga melakukan operasi pasar untuk membantu mengontrol harga dan memenuhi kebutuhan pokok bagi warga Jakarta. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Divisi Regional Bulog Jakarta dan Induk Koperasi Kepolisian Indonesia (Inkoppol) secara rutin melakukan operasi pasar, sehingga harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dan stabil.

Sementara untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga masyarakat DKI dan juga memastikan adanya jaminan serta peningkatan pasokan pangan dari luar daerah ke DKI Jakarta, beberapa regulasi telah dikeluarkan. Misalnya, INSTGUB No.80/2014 tentang Pengelolaan Informasi Pangan Jakarta (IPJ). Diharapkan melalui IPJ ini perkembangan harga pangan, baik menurut jenis dan kualitasnya akan terpantau tiap hari dan masyarakat pun tahu dengan baik.

Jadi jika harganya meningkat, maka pemerintah akan segera mengambil tindakan untuk melakukan operasi pasar agar masyarakat tetap dapat membeli pangan dengan harga yang wajar. Selain itu, Pemerintah DKI juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah NTT untuk pengembangan ternak sapi di NTT. Kerja sama ini diinisiasi lewat kunjungan Gubernur DKI waktu itu (Jokowi Widodo) ke NTT pada 29 Maret 2014.

Kerja sama ini secara resmi dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2014. Tujuan kerja sama ini untuk menambah pasokan daging sapi ke Jakarta dengan menambah populasi sapi dari NTT. Pengiriman sapi dari NTT ke Jakarta bukan dalam bentuk sapi utuh lagi, melainkan dalam bentuk daging potong agar lebih efisien.

Dalam meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan, Pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 140 Tahun 2016 untuk penyediaan beras bagi PNS yang berkualitas dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan. Implementasinya efektif dilakukan mulai November 2016.

Sesuai Pergub tersebut, setiap keluarga PNS akan disediakan beras sebanyak 5 kg/bulan/anggota keluarga. Nantinya akan dipotong dari tunjangan kinerja daerahnya. Dengan menggandeng PT Food Station Tjipinang, secara teknis pegawai yang mau mengikuti program diberikan formulir dan mendapat voucher untuk membeli beras pandan wangi dengan harga sekitar Rp 13.000/kg (jauh di bawah harga pasar) di Alfamart terdekat dengan tempat tinggal.

Masih pada tahun 2016, untuk meningkatkan daya beli dan memperbaiki gizi masyarakat tertentu, serta menjaga stabilisasi harga pangan, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan PERGUB No. 208/2016 tentang Penyediaan Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu. Untuk mengimplementasikan PERBUG ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya menyediakan pangan yang bermutu dengan harga murah/bersubsidi, terutama untuk masyarakat penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Produk pangan yang bias dibeli yakni daging sapi dengan harga Rp 50.000/kg, daging ayam Rp25.000/kg, telur Rp10.000/kg, dan beras Rp6.000/kg. Jika masih tersedia kuota penyediaan pangan dengan harga murah, maka sasaran dapat ditujukan kepada masyarakat dengan kategori pekerja penyedia jasa lainnya atau perorangan yang memperoleh penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau keluarga yang tinggal di rumah susun yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pemda DKI Jakarta juga melakukan kerja sama dengan Pemda Lampung yang MoU-nya telah ditandatangani pada tahun 2016 tentang Kerja sama Pasokan Beras ke DKI Jakarta. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah Pemda DKI membeli lahan di Provinsi Lampung untuk ditanami padi. Nanti hasilnya untuk menambah pasokan langsung ke DKI Jakarta.

Pada tahun 2017, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pembibitan dan penggemukan sapi pada lahan seluas 113 ha. Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Barat pada 3 Mei 2017.

MoU tersebut bertujuan meningkatkan ketersediaan sapi siap potong untuk kebutuhan kedua belah pihak dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pembangunan pusat pembibitan ternak sapi, penggemukan ternak sapi, penyediaan bibit sapi, penyediaan pakan ternak pendukung, dan distribusi sapi, serta pengembangan teknologi, manajemen pengelolaan. Selain itu, pembinaan sumber daya manusia dalam rangka alih pengetahuan dan pengalaman dalam pembibitan dan penggemukan ternak sapi.

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan sumber protein dari daging sapi, Pemda DKI Jakarta juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam program distribusi sapi dengan menggunakan kapal khusus ternak (Kapal Cemara Nusantara I) dari daerah produsen NTT menuju wilayah DKI Jakarta. Agar tidak hanya tergantung pada stok sapi asal NTT, Pemda DKI Jakarta secara aktif juga mencari sumber-sumber peternak yang memiliki stok dalam jumlah banyak dan berkelanjutan.

Misalnya, mencoba menjajaki kerja sama dengan Kabupaten Blora-Jawa Tengah. Penjajakan itu dilakukan mengingat saat didatangkan sebanyak 500 ekor sapi dari NTT, PD Dharma Jaya sebagai pelat merahnya Pemda DKI Jakarta hanya mendapat jatah 100 ekor sapi. Jumlah ini masih jauh dari yang dibutuhkan DKI Jakarta sebanyak 650-750 ekor sapi/hari untuk memenuhi permintaan masyarakat maupun industri kuliner.



Peran Kementerian Pertanian Selama Ini

Sampai saat ini hampir 92% kebutuhan pangan di Provinsi DKI Jakarta dipenuhi dari daerah luar DKI Jakarta dan impor, dan hanya 2% dari produksi sendiri. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari produksi sendiri tersebut ke depan akan semakin sulit untuk dipertahankan mengingat alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian masih terus terjadi. Di sisi lain jumlah penduduk terus meningkat.

Pada kondisi ini, Kementerian Pertanian mempunyai peran yang penting dan strategis dalam membantu meningkatkan ketersediaan pangan bagi warga DKI Jakarta. Baik dari sisi produksi maupun pembenahan tata niaga pangan dan distribusi pangan untuk meningkatkan aksesibilitas warga DKI Jakarta terhadap pangan.

Salah satu peran Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan di DKI Jakarta adalah melalui program optimalisasi lahan pekarangan dengan pendekatan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program ini pada dasarnya tidak dirancang khusus untuk DKI Jakarta saja, tapi untuk seluruh Indonesia.



Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan tambahan pangan pada tingkat rumah tangga dari produksi sendiri di lahan pekarangan. Selain itu juga mendorong konsumsi protein dan energi per kapita rumah tangga yang lebih tinggi dan beragam, serta mengurangi belanja pangan.

Program ini sangat cocok dengan kondisi Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai masalah serius pada ketersediaan lahan pertanian. Berbeda dengan provinsi lainnya, bekerja sama dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, KRPL dikembangkan dengan teknik vertikultur dan hidroponik. Program ini sudah dikembangkan mulai tahun 2013.

Namun, sejak tahun 2016, Kementerian Pertanian yang dinakhodai Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP melakukan terobosan baru dalam memassalkan program ini. Yakni, mengajak secara berjenjang tim penggerak PKK mulai dari tingkat pusat sampai daerah, Persit (Persatuan Istri TNI) dan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), khususnya dalam pelaksanaan program Gerakan Tanam Cabai (Gertam Cabai) sebagai salah satu dari komoditas yang dikembangkan dalam KRPL.

Selain berperan dalam peningkatan produksi pangan, Kementerian Pertanian juga telah berperan aktif dalam membantu penyediaan dan meningkatkan aksesibilitas warga DKI Jakarta terhadap pangan. Salah satu program yang menonjol dijalankan Kementerian Pertanian adalah pembenahan tata niaga pangan dari mulai daerah asal pemasok pangan sampai ke konsumen DKI Jakarta. Pemerintah memangkas pelaku-pelaku ekonomi yang kurang bermanfaat dalam rantai tata niaga pangan dari semula berkisar 7-9 pelaku menjadi hanya 3-4 pelaku. Pemerintah juga memperbanyak *outlet*/distributor pangan melalui program Toko Tani Indonesia (TTI).

Dengan program TTI yang telah dikembangkan sejak tahun 2016, masyarakat DKI Jakarta bisa menikmati harga yang lebih murah dari harga pasar yang seharusnya dibayar. Sampai saat ini sudah dikembangkan 22 TTI yang tersebar di DKI Jakarta. Terdiri dari 11 TTI di Jakarta Selatan, 6 TTI berlokasi di Jakarta Timur, dan 5 TTI Jakarta Barat.

Jumlah TTI ini akan ditambah terus agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat DKI Jakarta. Dengan membenahan tataniaga dan memperbanyak jumlah TTI, produsen sebagai pemasok pangan untuk daerah DKI akan mendapatkan harga yang lebih layak, sehingga terdorong untuk meningkatkan produksinya. Pada saat yang sama konsumen atau masyarakat DKI tidak akan cemberut lagi dan bisa tersenyum karena membeli pangan dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya.

Peran Strategis Wilayah Penyangga Pangan DKI Jakarta

Selain berupaya meningkatkan produksi pangan dari lahan pertanian sendiri dan membenahan tata niaga pangan dari produsen ke konsumen DKI Jakarta, saat ini Kementerian Pertanian di bawah Menteri Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP sedang melakukan terobosan besar dalam meningkatkan penyediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat kota seperti DKI Jakarta.

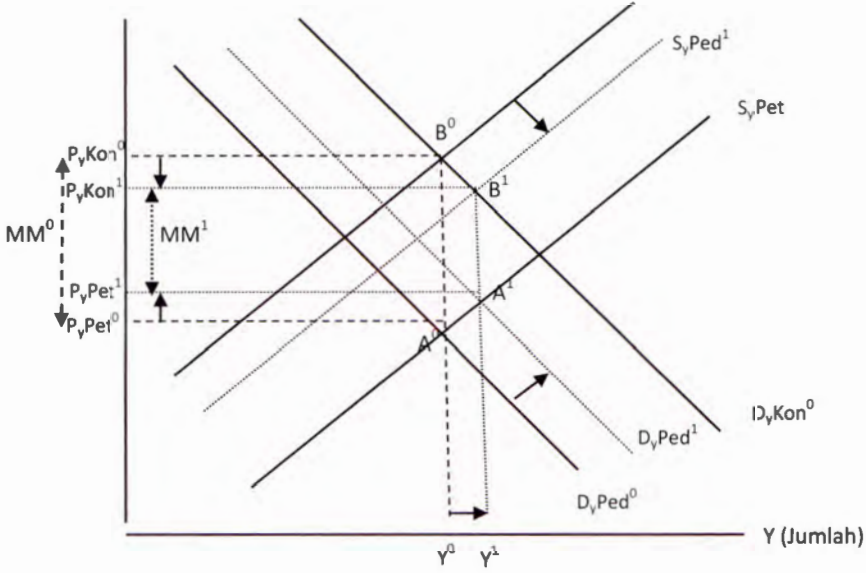
Salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya pertanian yang ada pada wilayah-wilayah penyangga pangan. Keberhasilan terobosan ini pada wilayah-wilayah penyangga pangan DKI Jakarta akan juga dikembangkan pada wilayah penyangga pangan untuk kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya, Medan, Semarang, Denpasar, Makassar, dan kota-kota lainnya.

Inisiasi ini telah disampaikan Menteri Pertanian dalam berbagai kesempatan. Misalnya pada 9 Mei 2017, Menteri Pertanian, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP dalam Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan dan Pengembangan Pangan di Wilayah Penyangga Kota Besar menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi harga bergejolak di Jakarta. Sebab, pasokan pangan akan didukung 10 kabupaten yang mengelilingi Jakarta dan dukungan dari pemerintah.

Rencana ini akan melibatkan daerah-daerah yang berada di sekitar Jakarta. Ke-10 kabupaten yang berada di Provinsi Banten, Jawa Barat dan

Lampung nantinya sebagai produsen pangan untuk DKI Jakarta. Diawali dengan jagung, baru dilanjutkan komoditas cabai, bawang merah, sapi, dan lain sebagainya. Pengembangan dilakukan pada lahan seluas 200 ribu ha dengan pola integrasi antara hutan dengan komoditas-komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Pengembangan ini membutuhkan keterlibatan dan komitmen dari beberapa *stakeholder* yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bulog, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan PDTT, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, dan TNI.

Kenapa daerah penyangga pangan mempunyai peran strategis bagi masyarakat perkotaan, seperti Jakarta? Kenapa pangannya tidak didatangkan saja dari daerah-daerah sentra produksi pangan? Berikut dapat dijelaskan peran strategis daerah penyangga pangan untuk stabilisasi ketersediaan dan harga pangan bagi masyarakat kota (Gambar 4.10).



Gambar 4.10. Peran Strategis Daerah Penyangga Pangan terhadap Stabilisasi Ketersediaan dan Harga Pangan bagi Masyarakat Kota



Sebagai contoh, dalam pemenuhan kebutuhan beras untuk masyarakat, Pemprov DKI harus mendatangkan beras, baik dari luar daerah maupun pasar impor sebesar 98% dari jumlah kebutuhan. DKI Jakarta sendiri hanya mampu menyediakan pangan beras dari produksi sendiri sekitar 2,0%. Daerah pemasok utama adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Dalam kasus pangan beras, mendatangkan beras dari beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Karawang, Subang, Cianjur dan Purwakarta sebagai sentra produksi padi di Jawa Barat yang letaknya relatif dekat dengan DKI Jakarta dapat mewakili daerah penyangga pangan. Dibandingkan kalau mendatangkan beras dari Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi dari Sulawesi Selatan.

Para pedagang yang mendatangkan beras dari daerah bukan penyangga pangan, seperti dari Sulawesi Selatan untuk masyarakat DKI Jakarta, margin pemasaran yang harus ditanggung adalah sebesar MM^0 . Dengan demikian untuk mendapatkan keuntungan tertentu dan mengganti semua biaya pengiriman yang dikeluarkan, pedagang hanya mampu membeli beras petani di Sulawesi Selatan dengan harga sebesar P_yPet^0 dan total jumlah beras yang dibeli hanya sebesar Y_0 . Selanjutnya para pedagang atau pengecer di Jakarta menjual beras tersebut kepada konsumen dengan harga sebesar P_yKon^0 .

Bandingkan sekarang kalau pedagang tersebut mendatangkan beras dari Kabupaten Karawang sebagai daerah penyangga pangan. Dengan keuntungan yang sama dari mendatangkan beras dari Sulawesi Selatan, margin pemasaran yang diperlukan hanya sebesar MM^1 . Pedagang mau membeli beras petani dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sebesar P_yPet^1 . Bahkan dengan jumlah modal yang sama mampu membeli beras dalam jumlah yang lebih besar yaitu sebesar Y^1 . Beras sejumlah Y^1 ini kemudian dijual pedagang pengecer kepada konsumen di Jakarta dengan harga lebih rendah dari beras yang didatangkan dari Sulawesi Selatan, yaitu sebesar P_yKon^1 .

Dari ilustrasi tersebut dapat dipetik beberapa poin untuk menjelaskan kenapa daerah penyangga pangan mempunyai peran strategis dalam

stabilisasi ketersediaan dan harga pangan bagi masyarakat kota.

Mampu memasok pangan dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga menyebabkan jumlah pangan yang tersedia di pasar bagi masyarakat kota menjadi lebih banyak. Harga juga menjadi lebih stabil dan inflasi bisa ditekan mengingat pangan mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan inflasi.

Mampu memasok pangan bagi masyarakat kota dengan harga yang murah, karena tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh para pelaku ekonomi dalam tata niaga pangan. Pengecer juga bias menjual ke konsumen dengan harga yang lebih murah karena berkurangnya biaya transportasi secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan menjadi meningkat. Dengan demikian, mampu mengurangi kemiskinan karena pangan, khususnya beras, yang selama ini berkontribusi besar terhadap pembentukan garis kemiskinan.

Mampu memasok pangan bagi masyarakat kota secara berkelanjutan, bahkan dengan jumlah yang cenderung meningkat. Karena harga padi/beras yang diterima petani lebih tinggi menyebabkan keuntungan yang diterima petani pun meningkat. Kondisi ini mendorong petani untuk tetap menanam padi, bahkan lebih tertantang untuk mengelola usaha tani padinya lebih baik. Pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas.

Dalam upaya meningkatkan peran strategis daerah-daerah penyangga pangan ke depan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama-sama oleh pemerintah daerah penyangga pangan, pemerintah kota, maupun pemerintah pusat. *Pertama*, mendorong investasi sarana dan prasarana produksi, panen dan pasca panen serta transportasi di daerah penyangga pangan. *Kedua*, mengondisikan petani agar lebih akses terhadap penerapan inovasi teknologi, permodalan dan penerapan pertanian modern. *Ketiga*, peningkatan sumber daya petani.



BAB V

RELASI JAKARTA DENGAN WILAYAH SEKITARNYA YANG SALING MENGUNTUNGAN



Jakarta adalah magnet. Tidak hanya magnet untuk mencari rezeki dan pekerjaan, namun juga magnet komoditas-komoditas pangan utama. Melihat pada struktur pasar nasional, Jakarta adalah sentral. Jakarta sedikit banyak menjadi *price maker*, pembentuk harga pangan, juga barometer. Gejolak pasar di Jakarta menjadi gambaran gejolak pasar-pasar lokal di pelosok wilayah.

Keterkaitan Pasar Jakarta dengan Pasar-Pasar Sekitarnya

Kita sudah mafhum, Jakarta adalah pasar pangan. Konsumen Jakarta yang selalu *lapar* dan *rakus*, menyedot produksi pangan dari wilayah sekitar. Namun, selain mengonsumsi sendiri, Jakarta juga menjadi titik bagi banyak komoditas buah-buahan. Misalnya, jeruk dari Medan masuk ke Jakarta di pagi hari. Siangnya sudah dikirim lagi ke Bandung. Karenanya, pasar Jakarta memiliki keterkaitan struktural dengan pasar-pasar kecil lain di kota, kabupaten, dan provinsi sekitarnya.

Bagian ini menggambarkan struktur distribusi per komoditas pangan penting untuk Jakarta. Informasi mencakup pola kebutuhan, periodisasi, fluktuasi, dan dinamika pasarnya. Bahasan dibatasi pada beberapa komoditas pangan strategis saja.

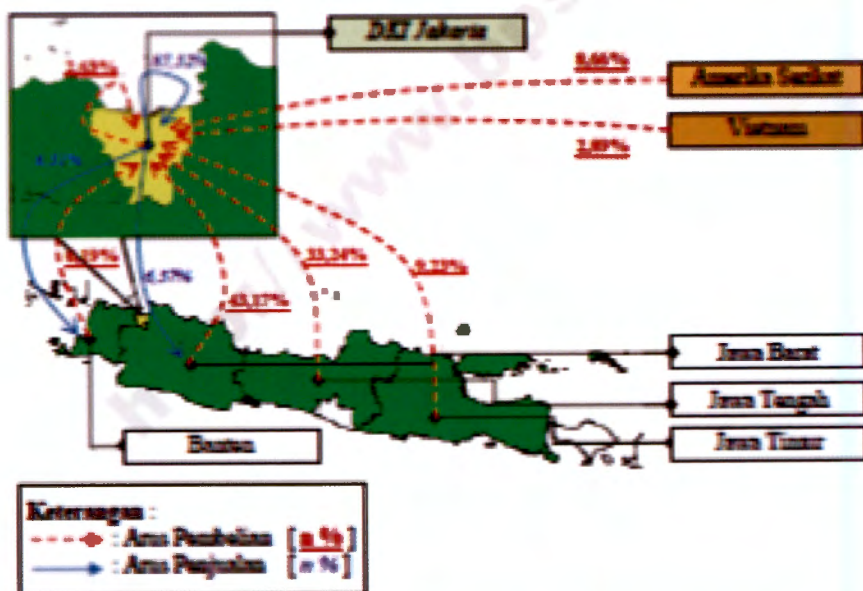
Komoditas Beras

Secara umum, dalam buku “Perdagangan Komoditas Strategis 2016” (BPS 2016), disebutkan bahwa potensi pola terpanjang distribusi perdagangan beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Jaringan perdagangan beras terluas ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun minyak goreng dan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta. Telur ayam ras di Provinsi Gorontalo.

Kebutuhan beras DKI per bulan berkisar 90-100 ribu ton. Total kebutuhan selama tahun 2017 lebih dari 1,18 juta ton. Pasokan beras ke PIBC per bulan rata-rata 60.000 ton. Pasokan beras untuk DKI sebagian

besar didatangkan dari beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Lampung melalui Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Sebagian besar pasokan beras yang masuk ke wilayah Jakarta berasal dari luar Jakarta, bahkan dari luar negeri. Pasokan beras terbesar berasal dari Provinsi Jawa Barat (43,17%) dan Jawa Tengah (33,24%). Dari sisi penjualan, 87,32% untuk memenuhi kebutuhan di dalam Provinsi DKI Jakarta sendiri. Sisanya dijual kembali ke Banten dan Jawa Barat.

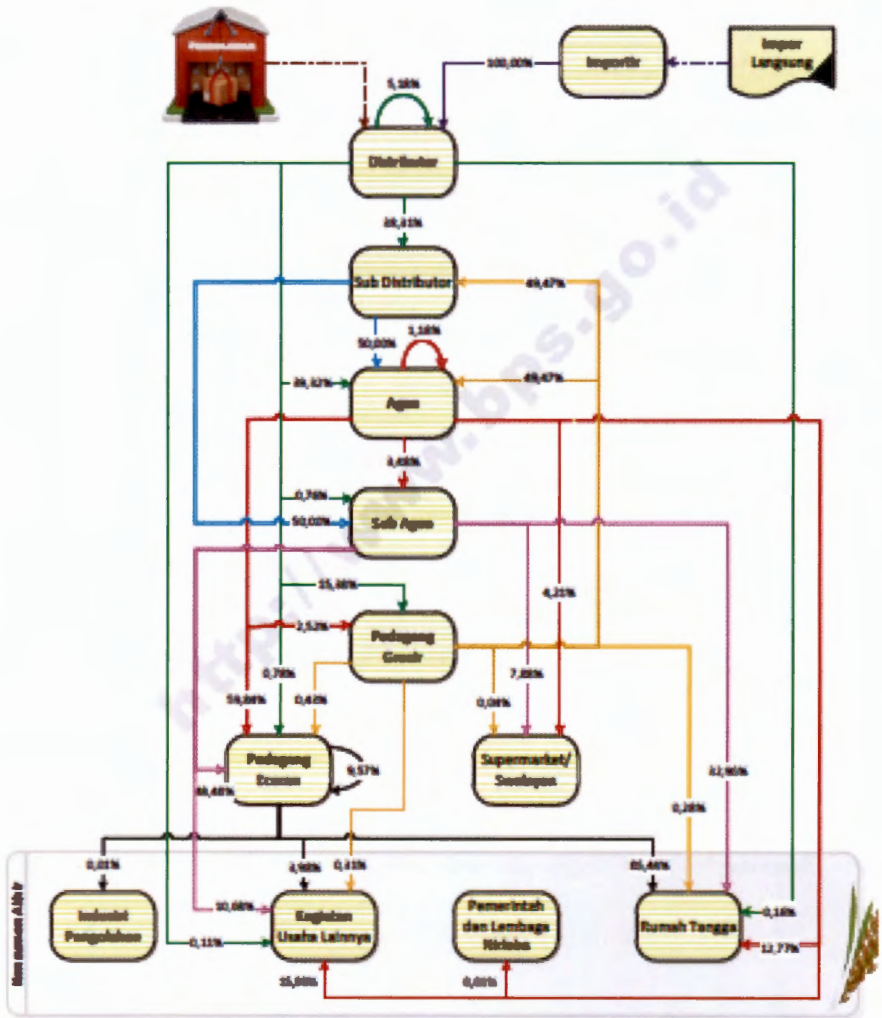


Gambar 39. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5.1. Peta Distribusi Perdagangan Beras di DKI Jakarta

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi DKI Jakarta memang cukup kompleks. Karena banyak melibatkan fungsi usaha, dari mulai importir, distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Distributor mendapat pasokan beras dari produsen, importir, atau dari sesama distributor. Tujuan penjualan distributor kepada subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan ke konsumen akhir.

Sementara itu, konsumen akhir terdiri atas industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga.



Gambar 5.2. Pola Distribusi Perdagangan Beras di DKI Jakarta

Komoditas Gula Pasir

Kebutuhan gula pasir per bulan untuk Jakarta berkisar 7.900-13.000 ton atau 109.000 ton per tahun. Kebutuhan gula pasir pun seluruhnya

harus didatangkan dari luar DKI. Segmen pasar gula pasir terdiri atas dua jenis, yaitu Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi rumah tangga dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk industri makanan dan minuman, begitu pula dengan sektor konsumsinya.

Kebutuhan gula pasir secara nasional terus meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk, perkembangan industri makanan dan minuman, serta perkembangan hotel dan restoran. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015, rata-rata konsumsi gula pasir per kapita selama sebulan sebesar 5,95 ons. Dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 255,461 juta jiwa, diperkirakan konsumsi gula pasir pada tahun 2015 mencapai 5,7 juta ton.

Jumlah produksi gula di dalam negeri pada tahun 2015 hanya mencapai 2,53 juta ton. Produksi gula dalam negeri diperoleh dari perkebunan tebu yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan.

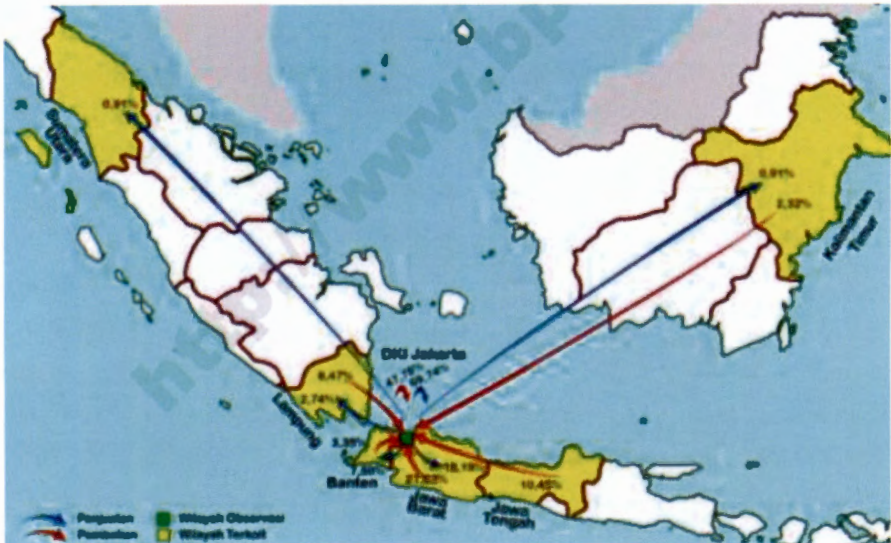


Sumber: Statistik Tebu Indonesia 2015 (BPS, diolah)

Gambar 5.3. Sebaran Produksi Tebu di Indonesia

Pasokan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta banyak melibatkan beberapa wilayah di luar Provinsi DKI Jakarta. Namun terbesar berasal dari dalam wilayah sendiri 47,78%, Jawa Barat sebesar 27,63%, Jawa Tengah

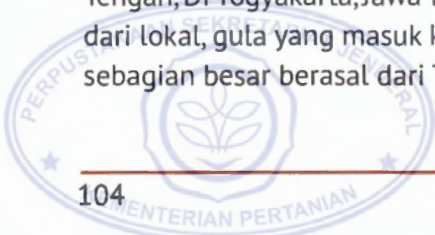
sebesar 10,45%, dari Lampung 8,47%. Sisanya dari Provinsi Banten 3,35% dan Provinsi Kalimantan Timur. Gula pasir tersebut dipasarkan ke wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 69,74%, Provinsi Jawa Barat (18,19%). Sisanya ke Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 5.4. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DKI Jakarta

Sentra produksi tebu yang merupakan bahan baku produksi gula pasir saat ini terpusat di Pulau Jawa yaitu mencapai 57,27% dari total jumlah produksi tebu Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penghasil gula terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai 1,24 juta ton. Selain Provinsi Jawa Timur, sentra produksi gula berada di Provinsi Jawa Tengah (0,76 juta ton), Sumatera Selatan (0,21 juta ton), Jawa Barat (0,10 juta ton) dan Lampung (0,09 juta ton).

Adapun provinsi yang merupakan sentra produksi gula pasir yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Selain dari lokal, gula yang masuk ke Jakarta juga datang dari impor. Impor gula sebagian besar berasal dari Thailand, Brasil, dan Uni Eropa.



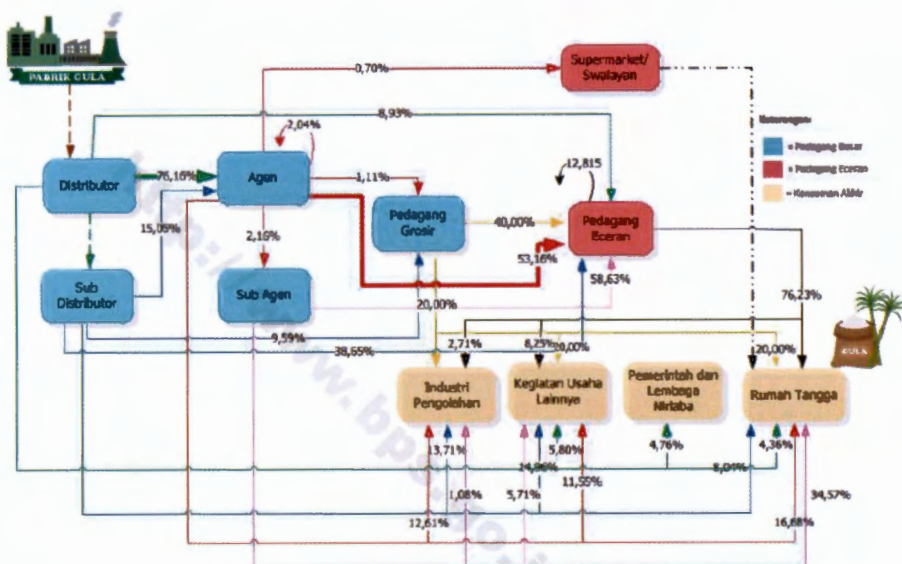
Aktivitas distribusi gula pasir secara umum melibatkan produsen, penghubung sampai akhirnya bisa sampai di tangan konsumen. Istilah penghubung dalam rantai distribusi barang ini dapat berupa distributor, sub distributor, agen, sub agen, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Kemudian, konsumen yang dimaksud dapat berupa industri pengolahan (usaha makanan dan minuman), kegiatan usaha lainnya (hotel dan restoran), pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga.

Berdasarkan informasi dari AGI (Asosiasi Gula Indonesia), distribusi Gula Kristal Putih lokal produksi dalam negeri selama ini umumnya melalui 3 pola sebagai berikut.

- Produsen → Distributor → Sub Distributor → Grosir → Retail → Konsumen
- Produsen → Distributor → Grosir → Retail → Konsumen
- Produsen → Distributor → Retail → Konsumen

Menurut survei BPS (2016), jalur distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta dimulai dari pedagang di tingkat distributor yang mendapat pasokan dari produsen di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penjualannya terbanyak melalui agen (76,16%), sisanya ke pedagang eceran, dan konsumen akhir. Sub distributor juga berperan mendistribusikan gula pasir melalui pedagang eceran (38,65%), agen (15,05%), pedagang grosir, dan konsumen akhir. Pedagang besar lainnya setingkat agen, subagen, dan pedagang grosir juga mendistribusikan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, pedagang eceran mendistribusikan ke konsumen akhir. Pola yang sama juga dilakukan untuk pedagang besar lainnya seperti pedagang grosir ke pengecer dan konsumen akhir. Pengecer menjual ke rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya.



Gambar 5.5. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal margin tata niaga, kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,58%. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,54%. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 9,56%.

Komoditas Minyak Goreng

Dari hasil survei BPS (2016) terhadap produsen minyak goreng di Indonesia disebutkan bahwa hampir separuh dari total hasil produksi minyak goreng Indonesia diekspor langsung ke luar negeri. Sementara sisanya dijual ke berbagai lembaga usaha lain, baik yang termasuk pada level pedagang besar maupun langsung ke konsumen akhir.

Dari sisi perdagangan, rantai distribusi minyak goreng di Indonesia memperlihatkan kompleksitas. Seluruh lembaga usaha perdagangan, baik yang termasuk pada level pedagang besar maupun level pedagang

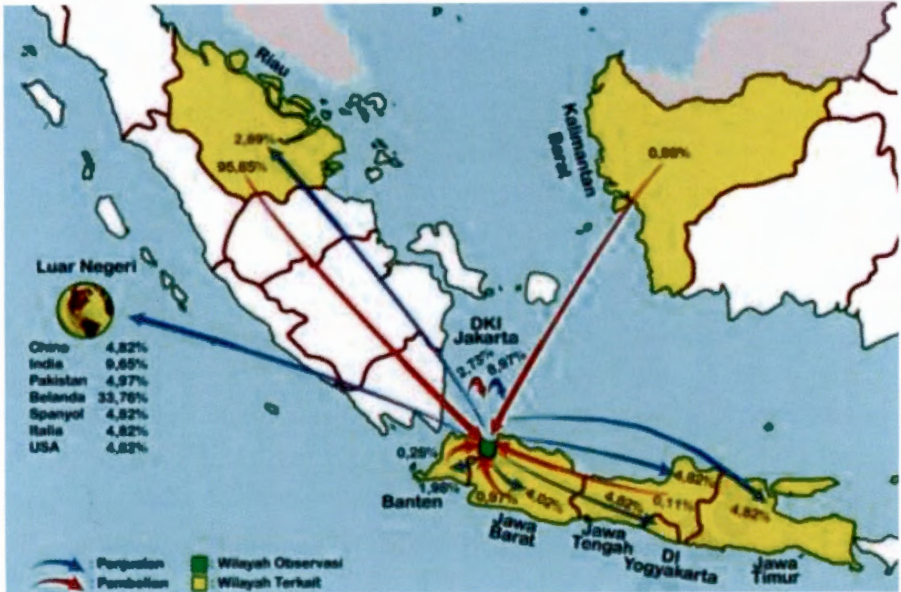
eceran menjalankan perannya masing-masing dalam rantai distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia.

Khusus untuk DKI Jakarta, produsen minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta memperoleh pasokan bahan baku minyak goreng dari beberapa provinsi. Terutama dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung dan Banten. Minyak goreng tersebut untuk memenuhi kebutuhan di wilayah DKI Jakarta sebesar 70,44%. Sisanya dijual ke Jawa Barat dan Banten.

Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng juga menunjukkan bahwa sebagian besar yang masuk ke wilayah Jakarta berasal dari luar Jakarta. Dari hasil survei diketahui bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta terbesar berasal dari Provinsi Riau, sebesar 95,85%. Sedangkan dari sisi penjualan, sebagian besar pasokan minyak goreng tersebut dijual ke luar negeri seperti China, India, Pakistan, Belanda, Spanyol, Italia dan AS. Sisanya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri seperti Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta itu sendiri.



Gambar 5.6. Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta

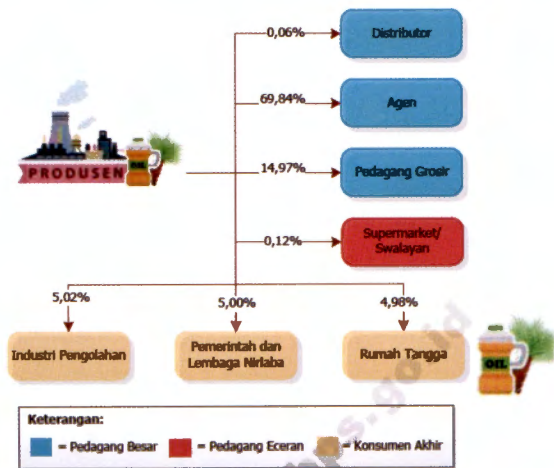


Gambar 5.7. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta

Produsen minyak goreng menjual sebagian besar hasil produksinya melalui agen sebesar 69,84%. Selain itu minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta juga dijual melalui distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, maupun langsung ke konsumen akhir. Konsumen akhir yang dimaksud meliputi pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga.

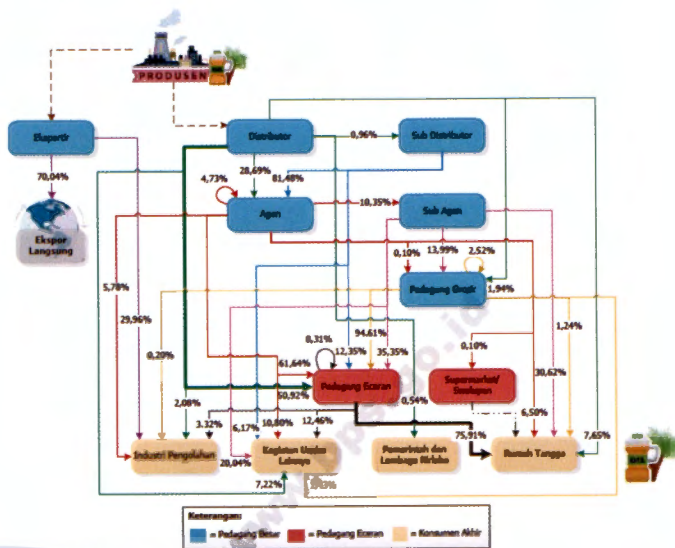
Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta melibatkan fungsi usaha yang cukup kompleks. Distributor menjual setengah pasokannya ke pedagang eceran. Kemudian pedagang eceran menjual pasokannya ke konsumen akhir yang terdiri dari rumah tangga (75,91%), kegiatan usaha lainnya (12,46%), industri pengolahan (3,32%). Selain itu, pedagang eceran juga menjual ke sesama pedagang eceran. Selain itu juga didapat informasi sebesar 70,00% hasil produksi minyak goreng di DKI Jakarta dijual ke beberapa negara di Asia dan Amerika.





Gambar 5.8. Pola Distribusi Penjualan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal margin, pedagang besar rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 11,27%. Adapun kategori pedagang eceran minyak goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,11%. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,13%.



Gambar 5.9. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta



Komoditas Daging Sapi

Kebutuhan daging sapi untuk Jakarta per hari 60 ton atau setara dengan 750-1.000 ekor sapi hidup siap potong. Jika dibulatkan sebulan rata-rata 5.000 ton, atau lebih kurang 60.000 ton/tahun. Kebutuhan tersebut untuk memenuhi industri horeka (hotel, restoran, dan katering), restoran padang, warteg, dan masyarakat.

Pada hari-hari khusus, misalnya Natal dan Tahun Baru, kebutuhan daging Jakarta naik 25 – 30% per hari. Bahkan pada momentum Idul Fitri, kenaikan kebutuhan daging setiap harinya bisa mencapai 100%, apalagi saat Idul Adha.

Selama ini hampir seluruh daging ini, yakni 97%, dipenuhi langsung dari impor, baik berupa daging beku maupun sapi hidup yang dipotong di sekitar Jakarta. Untuk mendapatkan jaminan pasokan, Pemerintah Provinsi DKI memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PD Dharma Jaya untuk memasok ternak sapi dari NTT. Namun, upaya ini baru 5-6 tahun akan terasa manfaatnya. Targetnya, Jakarta ingin memperbesar porsi sapi lokal dari 3 menjadi 30%.



Pasokan daging ke wilayah Jakarta dan sekitarnya 100% dari luar, baik luar Jakarta maupun impor. Artinya, Jakarta memiliki ketergantungan sangat tinggi dengan daging impor. Suplai daging ke wilayah Jakarta juga sangat tergantung pada surplus daerah lainnya. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung tidak mungkin mengirim ke Jakarta karena wilayah itu juga defisit daging. Bahkan, Jatim sempat melarang pengusaha di wilayah itu mengirim daging ke Jakarta untuk menyelamatkan kebutuhan wilayahnya. Apalagi jumlah penduduknya kini sudah 2,8 juta jiwa.

Untuk mengendalikan harga daging yang semakin tinggi, yakni bertengger pada angka Rp 120.000/kg, pemerintah menggelontorkan daging beku dari Australia dan Selandia Baru yang dibanderol pada harga Rp 80-85 ribu/kg. Daging kerbau dari India, bahkan hanya Rp 65 ribu/kg.

Kebijakan yang membolehkan daging impor dijual ke pasar becek, membuat pasokan tercukupi. Sebelumnya, daging impor tidak boleh dijual atau dipasarkan ke pasar becek, saat ini dibebaskan. Salah satu penyebab harga daging bergejolak karena tumpuannya hanya satu, daging lokal di pasar becek. Saat ini sudah banyak tumpuan, termasuk dengan hadirnya daging kerbau impor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pendapatan, harga ikan tongkol, harga telur ayam ras, dan harga minyak goreng, masing-masing berpengaruh terhadap permintaan daging sapi. Elastisitas harga daging sapi sendiri bersifat inelastis (-0,078), yang menunjukkan bahwa konsumen daging sapi adalah golongan menengah ke atas, tidak terpengaruh perubahan harga.

Elastisitas pendapatan terhadap permintaan daging sapi masyarakat DKI Jakarta bernilai positif dan kurang dari satu (0,183), menunjukkan bahwa daging sapi merupakan barang kebutuhan pokok. Daging ayam ras dan telur ayam ras merupakan barang substitusi bagi daging sapi. Sedangkan ikan tongkol dan minyak goreng termasuk barang komplementer. Rata-rata konsumsi daging secara sebesar 2,31 kg/kapita/tahun (BPS, 2016).

Komoditas Daging Ayam

Lain daging sapi, lain daging ayam. Meski kedua produk pangan ini bisa saling substitusi, namun perilaku pasarnya cukup berbeda. Kebutuhan daging ayam ras per bulan untuk Jakarta mencapai 9.300-10.300 ton atau 113.700 ton/tahun. Tingkat konsumsi daging ayam masyarakat Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) masih menempati urutan paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.

Saat ini konsumsi masyarakat Jabodetabek terhadap daging ayam mencapai 1-1,2 juta ekor ayam/hari atau kurang lebih 300 juta ekor/tahun. Di Jakarta kebutuhannya 1 juta ekor/hari, atau 300 juta ekor se-Jabodetabek/tahun. Jumlah tersebut sudah sepertiga dari kebutuhan nasional. Kondisi ini, menyebabkan terjadinya kepincangan konsumsi protein daging secara nasional, termasuk daging ayam di wilayah luar Jakarta termasuk di daerah-daerah.

Karena itu pergerakan harga daging ayam termasuk yang paling liar. Naik dan turun dengan mendadak tanpa bisa dikontrol. Suplai dan permintaan sangat fluktuatif. Ke depan, kuncinya adalah bagaimana mendorong keberadaan rumah potong ayam di sentra produksi. Kemampuan produksi rumah potong yang mampu memproduksi daging ayam beku, bisa menjadi solusi stabilitas harga daging ayam di dalam negeri.

Bersamaan dengan itu, untuk mengendalikan virus Flu Burung (*avian influenza*) yang cukup meresahkan, telah terbit Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memelihara unggas pangan di daerah wajib memiliki izin. Dalam hal peredaran unggas, pada Pasal 6 terbaca "*Setiap orang dan/atau badan hukum yang memasukkan unggas pangan ke Daerah, wajib ke lokasi tempat penampungan*". Tempat penampungan dan pemotongan unggas dilokalisir.

Berdasarkan aturan tersebut, ribuan pedagang, pengepul, serta pemotong ayam di wilayah Jakarta tak bisa lagi seandainya menjalankan bisnis seperti selama ini. Pemda DKI hanya memberikan izin lokasi di lima titik yakni di Rawa Kepiting, Srengseng, Petukangan, Cakung, dan

Pulo Gadung. Pelaku usaha diminta merelokasi usaha pemotongan hewan di lima titik tersebut. Usaha pemotongan ayam juga harus didukung teknologi pendingin agar ayam yang dikonsumsi masyarakat masih dalam keadaan segar.

Lebih jauh, Pasal 8 mewajibkan setiap pihak yang memasukkan unggas ke Jakarta wajib dilengkapi dokumen yang menyatakan kesehatan unggas dan menerangkan asal serta tujuan pengiriman yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau dokter hewan daerah asal unggas. Kesiapan menjadi kata kunci dari pemberlakuan peraturan daerah tentang pengendalian, pemeliharaan, dan peredaran unggas di Jakarta.

Komoditas Telur Ayam

Komoditas telur ayam tidak bisa dipandang sebelah mata untuk Jakarta. Ketergantungan konsumen pada telur ayam sangat besar. Karena itu komoditas ini harus ditata dengan sangat baik. Kebutuhan telur ayam per bulan mencapai 8.800-9.100 ton atau setahun sebanyak 106.800 ton.

Selama ini, perbedaan harga telur dan ayam dari tingkat peternak hingga di pasar sering menjadi polemik. Disparitas harga ayam dan telur antara peternak dan pasar memang sudah terjadi sejak lama. Penyebabnya, karena integrator (perusahaan peternakan ayam) sudah masuk. Dalam arti sistem rantai pasok dari peternakan ayam ras dari hulu ke hilir dikuasai integrator. Integrator telah menguasai industri peternakan, mulai dari bibit ayam, pakan ternak, hingga penguasaan jaringan distribusi sampai kepada konsumen.

Akibatnya, peternak kecil hanya tinggal sebagian dari sistem tersebut. Peternak pun tidak memiliki posisi tawar apapun untuk menetapkan harga baik *input* (produksi) maupun *output* (jual). Pemerintah telah berkali-kali turun tangan langsung menata sistem tata niaga telur, bahkan pernah memerintahkan eradikasi DOC (*day old chick*).



Komoditas Cabai dan Bawang Merah

Warga Jakarta merupakan pemakan sayuran terbesar. Bahkan menyerap hasil produksi sayuran mulai dari Pengalengan Bandung sampai ke kebun-kebun di Cisarua sampai Cianjur. Jakarta yang menghidupkan ekonomi penduduk di lahan-lahan kering perbukitan tersebut. Dua komoditas sayuran yang selalu menjadi isu media massa adalah cabai dan bawang merah.

Kebutuhan bawang merah untuk Jakarta 3.300-3.600 ton/bulan atau 39.600 ton/tahun. Sedangkan, kebutuhan cabai besar dan rawit per bulan hampir dua kali lipat yakni 5.200- 5.700 ton. Tiga pasar utama yang menyalurkan bawang merah dan cabai ke rumah-rumah dan meja di restoran adalah Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Cibitung, dan Pasar Tanah Tinggi. Sesungguhnya Jakarta juga menanam sayurannya sendiri. Namun, jumlahnya sangat tidak cukup.

Tabel 5.1 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sayuran di Provinsi DKI Jakarta, 2015

No.	Kabupaten/Kota	Bayam (kw)	Kangkung (kw)	Ketimun (kw)	Kacang Panjang (kw)	Petsal (kw)	Lainnya (kw)
1.	Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-
2.	Jakarta Selatan	40	48	-	10	48	-
3.	Jakarta Timur	37.990	42.696			26.836	
4.	Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-
5.	Jakarta Barat	6.639	26.430	226	6	12.001	-
6.	Jakarta Utara	12.330	33.055	-	-	8.001	-
	DKI Jakarta	26.999	102.229	226	16	48.886	

Komoditas Buah-Buahan

Kita mengenal Pasar Minggu sebagai sentra pasar buah di Jakarta. Namun, saat ini, titik-titik bagi buah di Jakarta lebih menyebar. Indonesia memiliki beragam buah-buahan lokal yang bernilai nutrisi baik untuk kesehatan, mulai dari pisang, jambu, apel, dan sebagainya. Namun dalam

kenyataannya, masyarakat Indonesia tergolong minim mengonsumsi buah-buahan. Artinya, sebagaimana teori bahwa perubahan dimulai dari *middle class*. Jika konsumen Jakarta bisa ditata, maka *demand* buah lokal akan sangat menarik.

Tahun 2011 sebagai contoh, konsumsi buah-buahan masyarakat Indonesia hanya 34,55 kg/kapita/tahun. Untuk sayur angkanya pun tak begitu jauh berbeda. Sebagai salah satu sumber serat bagi kesehatan selain buah, konsumsi sayuran masyarakat Indonesia hanya 40,35 kg/kapita/tahun. Jelas ini baru setengah dari rekomendasi FAO sebanyak 73 kg/kapita/tahun. Sedangkan standar kecukupan untuk sehat sebesar 91,25 kg/kapita/tahun. Pengeluaran rumah tangga untuk sayur-sayuran hanya 3,45%, sedangkan buah-buahan lebih sedikit lagi yakni hanya 2,12%.

Pemerintah telah mencoba mengendalikan serangan buah-buahan impor dengan berbagai cara. Misalnya, sejak Februari 2016, Kementan memperketat proses masuknya buah dan sayur impor dari negara yang belum memenuhi standar laboratorium pengujian keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sesuai Permentan No. 4/PP340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Larangan ini berlaku bagi semua negara pengekspor buah dan sayur, termasuk tanaman pangan yang belum memenuhi uji laboratorium Badan Karantina. Dengan regulasi ini, pemerintah hanya mengizinkan impor buah berasal dari empat negara yang sudah melakukan pengawasan laboratorium sesuai standar *Codex International Food Standards* (CIFS) yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Empat negara tersebut yakni Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand. Sementara negara eksportir di luar 4 negara tersebut, harus mendaftarkan komoditas hayatnya pada WHO agar bisa masuk ke pelabuhan Indonesia.

Negara eksportir masih bisa melakukan uji lab sendiri dengan standar yang ditetapkan Badan Karantina. Namun, pelabuhan masuknya dibatasi dan dilarang melalui Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Makassar. Syarat yang ditetapkan Badan Karantina Pertanian ini meliputi

keamanan pangan dari jenis-jenis pestisida dalam batas tertentu, batasan cemaran penyakit biologi, dan batasan cemaran fisik.

Upaya pemerintah membatasi buah impor menyebabkan buah nusantara kembali dilirik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Buah yang jarang muncul, seperti kokosan dan sawo manila, mulai muncul di pasar. Namun, fasilitas pemasaran yang kurang menyebabkan akses konsumen kepada buah lokal terbatas.

Margin Tata Niaga Komoditas Pangan ke Jakarta

Dalam bagian ini dipaparkan perbedaan harga konsumen Jakarta dengan harga produsen, serta perilaku harga pangan di Jakarta dan pengaruhnya kepada pola produksi pangan di wilayah sekitarnya. Jakarta sebagai pembentuk harga, berdampak terhadap harga keekonomian dari komoditi pangan.

Apa yang menarik dari pasar Jakarta, selain jumlah permintaannya yang besar, marginnya juga menjanjikan. Sebab, konsumen Jakarta memiliki daya beli besar dan mampu membayar tinggi. Margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) menggambarkan besarnya keuntungan yang diambil pada kegiatan perdagangan dengan masih mengikutsertakan biaya pengangkutan barang (selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian).

Survei BPS (2016) menunjukkan, rata-rata rasio MPP pedagang besar (PB) komoditas beras adalah 9,84%, MPP pedagang eceran (PE) 11,35%, dan MPP pedagang beras adalah 10,57%. Hal tersebut berarti secara umum pedagang beras mendapatkan keuntungan sebesar 10,57% dari nilai pembeliannya. Sedangkan untuk komoditas lainnya, diperoleh bahwa secara nasional rata-rata rasio MPP minyak goreng 9,79%, gula pasir 9,25%, dan telur ayam ras 8,76%.

Untuk beras, margin pemasaran tertinggi diperoleh pedagang/penggilingan padi (7,6%) dan pedagang pengumpul/kongsi (6,75%). Selanjutnya pedagang pengecer (1,8%) dan pedagang besar/grosir

(1,2%). Margin keuntungan di penggilingan hanya Rp 89/kg, tapi volume penjualannya paling besar yaitu 1.500 – 2000 ton beras/musim.

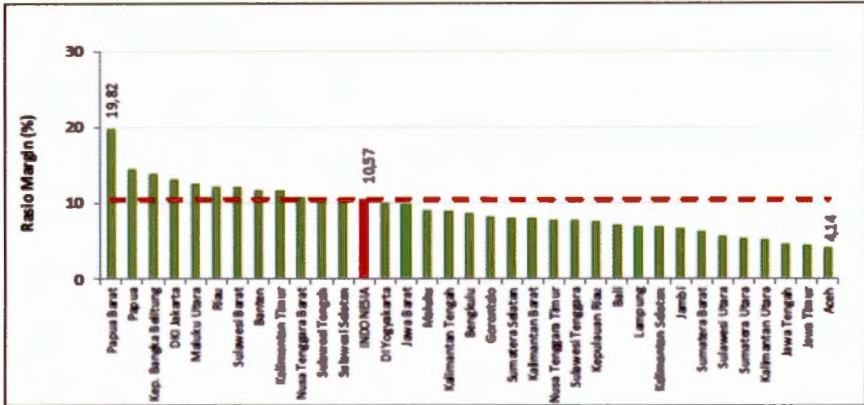
Integrasi pasar secara vertikal pada berbagai saluran pemasaran terintegrasi (pasar berjalan efisien), kecuali antara petani dengan pedagang pengumpul provinsi. Antara pedagang pengumpul kabupaten dengan pedagang pengecer lokal, tidak terintegrasi (pasar berjalan tidak efisien). Hal ini mengindikasikan bahwa pasarnya mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna.

Selain pangan utama, fluktuasi harga sayuran pada umumnya lebih tinggi dibanding buah, padi dan palawija. Ini indikasi bahwa ketidakseimbangan antara volume pasokan dan kebutuhan konsumen lebih sering terjadi pada sayuran. Margin pemasaran sayuran juga relatif tinggi.

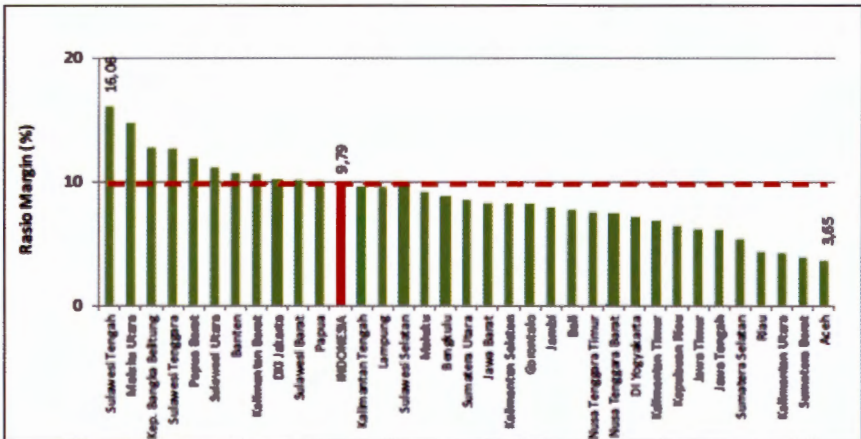
Berdasarkan provinsi, rata-rata rasio MPP beras terbesar berada di Provinsi Papua Barat, yaitu 19,82%, dan terkecil di Provinsi Aceh, yaitu 4,14%. Sedangkan untuk minyak goreng, rata-rata rasio MPP terbesar berada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 16,06%, dan terkecil di Provinsi Aceh yaitu 3,65%. Sementara itu, untuk gula pasir, rata-rata rasio MPP terbesar di Provinsi Jawa Barat, yaitu 17,91% dan terkecil di Sumatera Utara yaitu 3,34%.

Sedangkan untuk telur ayam ras, rata-rata rasio MPP terbesar di Provinsi Jambi yaitu 20,90%. Terkecil di Kalimantan Barat yaitu 4,39%. Gambar 7, 8, 9, dan 10 menyajikan rata-rata rasio MPP untuk komoditas beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras secara nasional dari provinsi yang diurutkan dari provinsi penerima MPP terbesar ke terkecil. Sedangkan Tabel 2 menyajikan rata-rata rasio MPP menurut provinsi, komoditas, dan kategori pedagang (PB dan PE).

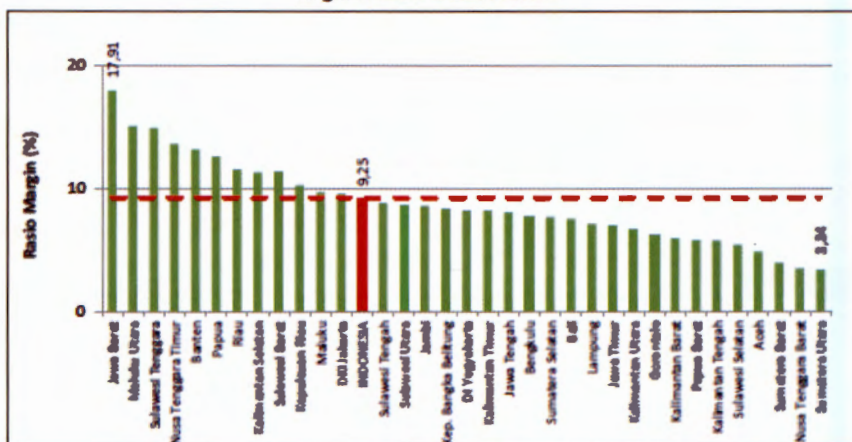
Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras Tingkat Nasional dan Provinsi



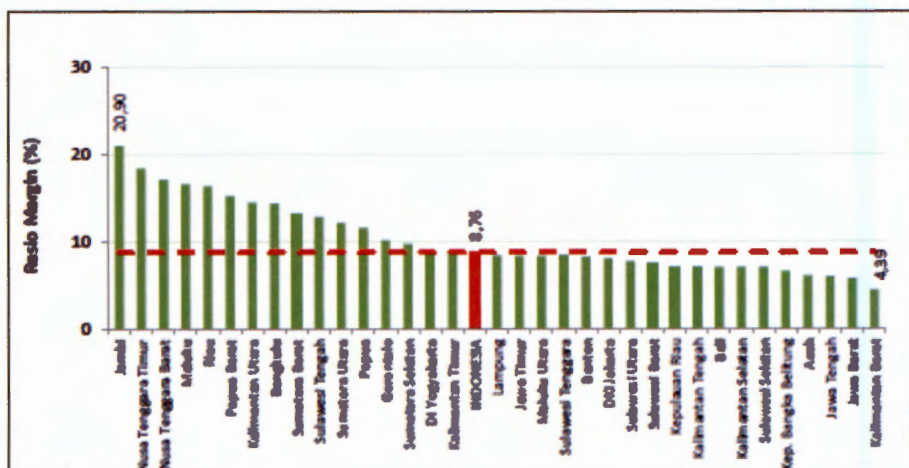
Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Minyak Goreng Tingkat Nasional dan Provinsi



Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Gula Pasir Tingkat Nasional dan Provinsi



Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Telur Ayam Ras Tingkat Nasional dan Provinsi



Dari gambar tersebut terlihat harga yang diterima petani dan transmisi harga dari konsumen ke produsen rendah. Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi upaya pengembangan agribisnis dan peningkatan daya saing sayuran. Kelembagaan tata niaga belum merespons dinamika pasar secara efektif dan efisien.

Dalam kondisi ini diperlukan beberapa upaya, misalnya mengembangkan sinkronisasi produksi sayuran secara lintas daerah produsen, mengembangkan daerah sentra produksi sayuran yang lebih tersebar secara regional, serta mengembangkan teknologi penyimpanan yang sederhana dan efisien serta memfasilitasi petani untuk menerapkan teknologi tersebut.

Kemampuan Wilayah Sekitar Jakarta

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, pangan untuk Jakarta dipasok dari berbagai wilayah. Sebagian dari wilayah sebagian agak dekat. Pertanyaannya, apakah mungkin seluruh kebutuhan pangan Jakarta ditanam dan diproduksi dari wilayah-wilayah yang hanya selingkar Jakarta?

Sebelum membedah bagaimana kemampuan wilayah sekitar, dan apa yang dimilikinya, kenapa tidak dilihat dulu apa yang dimiliki Jakarta itu sendiri? Apa saja produk pertanian yang mampu dihasilkan Jakarta secara mandiri?

Apa yang dimiliki Jakarta? Provinsi DKI Jakarta sesungguhnya memiliki pertanian yang cukup baik. Produk pertanian mulai dari palawija, sayuran, anggrek, dan tanaman obat banyak diusahakan penduduknya di lahan terlantar ataupun pekarangan. Paling menonjol adalah produk perikanan. Produksi perikanan pada tahun 2005 terdiri dari perikanan laut 132.033,8 ton, perikanan darat 8.880,37 ton, dan ikan hias 49.002,044 ton.

Total luas sawah di Jakarta memang hanya 653 ha. Ini lebih kurang seluas sawah dua desa rata-rata saja di Jawa. Sebagian besar (505 ha) merupakan sawah irigasi, dan sisanya 148 ha merupakan sawah non irigasi. Sebagian besar sawah ada di Jakarta Utara. Selain sawah, ada juga lahan tegalan atau kebun seluas hampir dua kali lipat sawah (955 ha). Dalam buku "Jakarta Dalam Angka tahun 2016", berdasarkan hasil Survei Pertanian pada tahun 2014 produksi padi sawah sebanyak 7.541 ton dengan rata-rata produktivitas 53,86 kuintal/ha.





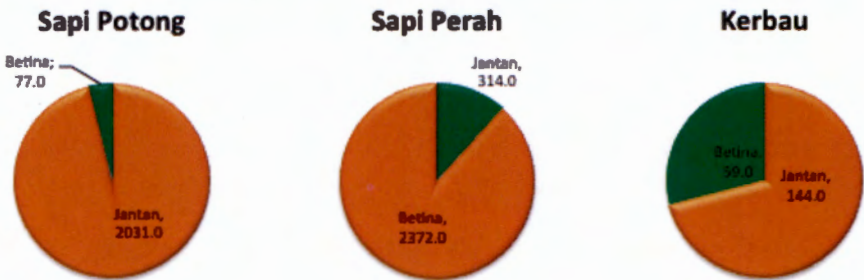
Sementara jenis ternak yang paling banyak diusahakan warga DKI Jakarta adalah kambing sebanyak 6.112 ekor, itik/itik manila mencapai 22.495 ekor. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan populasi tertinggi.

Untuk tanaman hortikultura, produksi terbesar tanaman sayur-sayuran adalah kangkung (5.272 ton). Sedangkan untuk buah adalah mangga sebanyak 106.478 ton. Lengkuas yang merupakan tanaman obat produksinya terbesar yakni 20.008 kg. Sementara itu, tanaman hias, paling banyak adalah anggrek (165.253 tangkai). Anggrek banyak diusahakan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Selain anggrek, bunga lain adalah bunga kuping gajah, pisang-pisangan dan mawar.

Sayangnya, pembangunan perkotaan menjadikan lahan pertanian di Jakarta semakin sempit. Sawah dikalahkan pembangunan properti maupun industri yang berskala besar. Tidak hanya sawah, lahan terbuka hijau pun kalah. Karena itu Jakarta harus bergantung pada pasokan hasil pertanian dari daerah di luar Jakarta. Padahal Ibukota Negara itu masih memiliki potensi lahan yang cukup luas. Data dari *jakarta.go.id*, Jakarta memiliki taman ukuran 500-1500 meter persegi mencapai 60.000 dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang mencapai 157 unit.

Sementara untuk ternak, jumlah sapi dan kerbau di Jakarta pada 1 Mei 2013 sebanyak 4.997 ekor. Terdiri dari 2.108 ekor sapi potong, 2.686 ekor sapi perah dan 203 ekor kerbau. Jumlah sapi potong betina lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sapi potong jantan. Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, jumlah sapi potong betina sebanyak 77 ekor dan jumlah sapi potong jantan sebanyak 2.031 ekor. Sedangkan sapi perah betina sebanyak 2.372 ekor dan jumlah sapi perah jantan hanya sebanyak 314 ekor. Sementara itu populasi kerbau betina sebanyak 59 ekor dan jumlah kerbau jantan 144 ekor.

Gambar 5.
Jumlah Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau Menurut jenis Kelamin Tahun 2013



Wilayah dengan jumlah sapi dan kerbau terbanyak adalah Jakarta Selatan, dengan jumlah sapi dan kerbau sebanyak 2.244 ekor. Sedangkan di Jakarta Pusat, populasi sapi dan kerbau paling sedikit hanya 63 ekor. Jumlah sapi potong terbanyak terdapat di Jakarta Timur, yaitu 747 ekor. Namun jumlah sapi perah terbanyak berada di Jakarta Selatan yakni 1.469 ekor. Sedangkan jumlah ternak kerbau terbesar berada di Jakarta Barat yang berjumlah 84 ekor.



Tabel 6.
Jumlah Sapi dan Kerbau Pada 1 Mei 2013 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (ekor)

No.	Kabupaten/Kota	Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Jumlah Sapi dan Kerbau
		Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kepulauan Seribu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jakarta Selatan	717	25	742	224	1.245	1.469	32	1	33	2.244
3	Jakarta Timur	738	9	747	84	1.070	1.154	53	11	64	1.965
4	Jakarta Pusat	4	0	4	6	53	59	0	0	0	63
5	Jakarta Barat	508	24	532	0	0	0	55	29	84	616
6	Jakarta Utara	64	19	83	0	4	4	4	18	22	109
DKI Jakarta		2.031	77	2.108	314	2.372	2.686	144	59	203	4.997

Bila diperinci menurut wilayah (Tabel 6), tiga kota yang memiliki sapi potong paling banyak adalah Jakarta Timur dengan jumlah populasi sebanyak 747 ekor, kemudian Jakarta Selatan (742 ekor), dan Jakarta Barat (532 ekor). Sementara itu, kota yang memiliki sapi potong paling sedikit adalah Jakarta Pusat dengan jumlah populasi sebanyak 4 ekor. Bahkan Kepulauan Seribu tidak memiliki sapi potong.

Sapi perah paling banyak terdapat di Jakarta Selatan dengan jumlah 1.469 ekor. Disusul Jakarta Timur (1.154 ekor), dan Jakarta Pusat (59 ekor). Sedangkan wilayah yang sama sekali tidak terdapat populasi sapi perah adalah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

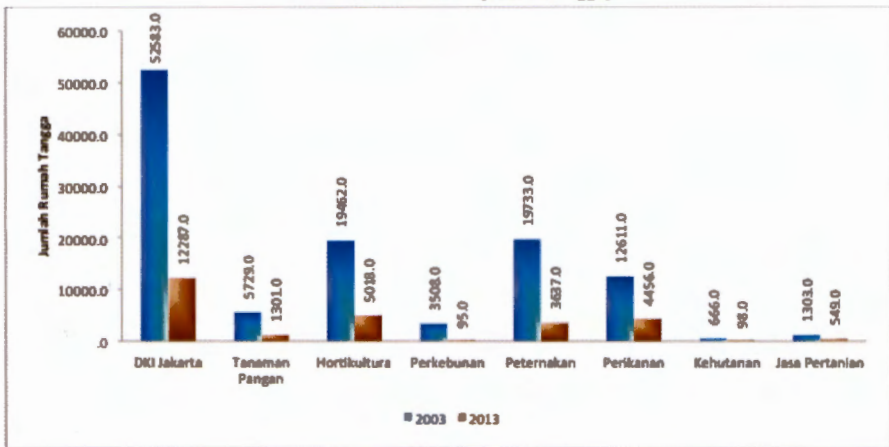
Kerbau paling banyak terdapat di Jakarta Barat dengan jumlah populasi sebanyak 84 ekor, kemudian Jakarta Timur (64 ekor), dan Jakarta Selatan (33 ekor). Wilayah yang sama sekali tidak memiliki populasi kerbau adalah Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.

Sosok Petani Jakarta

Gambaran petani di Jakarta cukup mengesankan. Selain masih bertani secara tradisional, jumlahnya menurun sangat cepat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pencacahan lengkap ST2013, diketahui jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jakarta pada tahun 2013 sebesar 12.287 rumah tangga.

Subsektor hortikultura, perikanan, dan peternakan merupakan tiga subsektor yang memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak yaitu masing-masing 5.018 rumah tangga, 4.456 rumah tangga, dan 3.637 rumah tangga. Sementara itu, perkebunan merupakan subsektor yang paling sedikit memiliki rumah tangga usaha pertanian, yaitu sebanyak 98 rumah tangga.

Gambar 1.
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor, Tahun 2003 dan 2013 (rumah tangga)



Sementara jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jakarta pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 40.296 rumah tangga. Jika tahun 2003 masih sebanyak 52.583 rumah tangga, maka tahun 2013 hanya 12.287 rumah tangga. Berarti terjadi rata-rata penurunan sebesar 7,66% per tahun.

Secara absolut penurunan terbesar terjadi di subsektor peternakan dan penurunan terendah di subsektor kehutanan. Masing-masing turun sebanyak 16.096 rumah tangga dan 568 rumah tangga. Sedangkan secara persentase perkebunan merupakan subsektor yang mengalami penurunan paling besar selama 10 tahun terakhir, sebesar 97,29%. Sedangkan jasa pertanian menjadi subsektor dengan tingkat penurunan terendah yaitu 57,87%.



Tabel 5.2. Jumlah Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor di Wilayah DKI Jakarta

Subsektor	SP 2003	SP 2013	Perubahan (% per tahun)
Tanaman pangan	5.729	1.301	-77,29
Hortikultura	19.462	5.018	-74,22
Perkebunan	3.508	95	-97,29
Peternakan	19.733	3.637	-81,57
Perikanan	12.611	4.456	-64,67
Kehutanan	666	98	-85,29
Jasa pertanian	1.303	549	-57,87
Total	52.583	12.287	-76,63

Adapun jumlah rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) di DKI Jakarta tahun 2013 sebanyak 8.611 rumah tangga. Komposisi terbanyak berada di Jakarta Barat sebesar 3.081 rumah tangga, disusul Jakarta Timur sebesar 2.408 rumah tangga dilanjutkan Jakarta Selatan sebesar 1.566 rumah tangga. Sementara komposisi rumah tangga petani gurem terkecil berada di Kepulauan Seribu hanya 91 rumah tangga.

Dibandingkan dengan kondisi tahun 2003, jumlah rumah tangga petani gurem di tahun 2013 mengalami penurunan cukup drastis. Jika pada tahun 2003 petani gurem di DKI Jakarta sebanyak 45.428 rumah tangga, maka pada tahun 2013 tinggal 8.611 rumah tangga atau turun 81,04%.

Penurunan terbesar secara absolut terjadi di Jakarta Selatan yang mencapai 12.721 rumah tangga. Ditinjau secara persentase penurunan rumah tangga petani gurem terbesar terjadi di Jakarta Pusat sebesar 95,42%. Penurunan jumlah rumah tangga petani gurem sebagian besar berasal dari penurunan 9.483 rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 1000 m².

Dari seluruh rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013, sebesar 77,44% merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan (9.515 rumah tangga). Sedangkan rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna lahan hanya sebesar 22,56% atau sebanyak 2.772 rumah tangga. Dari seluruh rumah tangga pertanian pengguna lahan, jumlah petani yang bergelut di subsektor hortikultura paling besar yakni 5.853 orang.

Selama kurun waktu sepuluh tahun, rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan mengalami penurunan sebesar 37.747 rumah tangga atau sebesar 79,87%. Penurunan jumlah rumah tangga pengguna lahan terbesar secara absolut terjadi di Jakarta Selatan yang mencapai 12.868 rumah tangga. Sementara itu penurunan jumlah rumah tangga pengguna lahan terbesar secara persentase terjadi di Jakarta Pusat yang mencapai 94,88%.

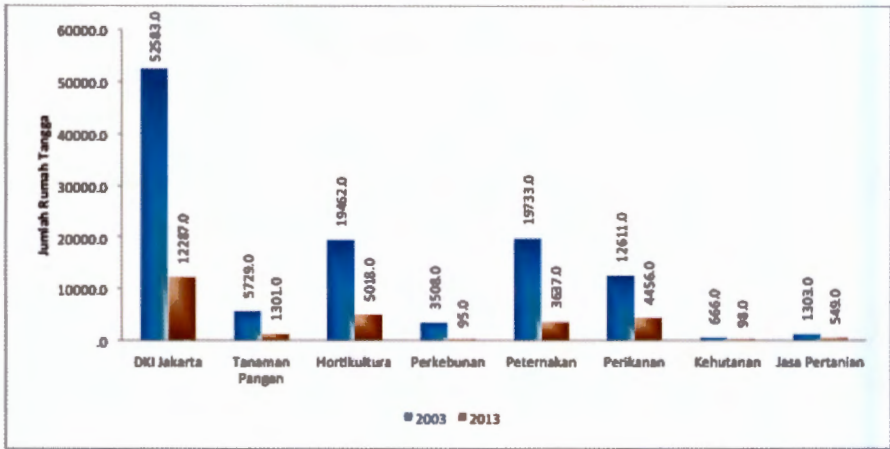
Berdasarkan kondisi demografi, menurut jenis kelamin, hasil SP 2013 menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah petani (14.139 orang), didominasi laki-laki sebesar 89,33%. Kondisi ini berlaku sama untuk komposisi petani di masing-masing subsektor pertanian, baik di tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Sementara itu dari hasil Sensus Pertanian 2013 juga diketahui bahwa sebanyak 5.041 petani yang bekerja di sektor pertanian berada di subsektor hortikultura atau terbesar dari seluruh subsektor pertanian. Subsektor lain yang juga banyak menyerap jumlah tenaga kerja berturut-turut adalah peternakan 3.680 orang dan penangkapan ikan sebesar 2.558 orang.

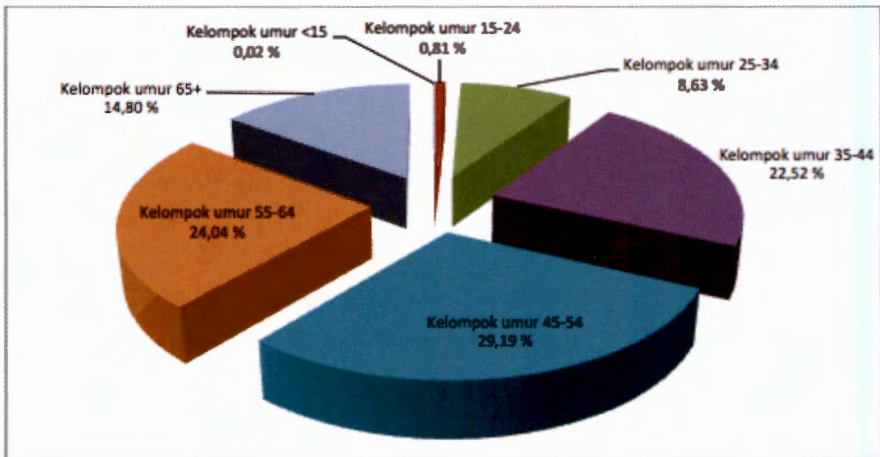
Petani utama DKI Jakarta terbesar berada di kelompok usia 45-54 tahun yakni sebesar 3.586 rumah tangga (29,19%). Dengan kata lain kelompok usia produktif mendominasi kelompok umur di bidang usaha pertanian.



Gambar 1.
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor, Tahun 2003 dan 2013 (rumah tangga)



Gambar 3.
Jumlah Petani Utama Menurut Kelompok Umur Tahun 2013



Untuk perusahaan pertanian yang berbadan hukum, hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan terdapat 48 perusahaan pertanian. Sebagian besar atau sebanyak 21 perusahaan pertanian yang berbadan hukum bergerak di subsektor perikanan disusul subsektor kehutanan sebanyak 17 perusahaan pertanian.

Sedangkan tanaman pangan dan peternakan merupakan subsektor yang paling sedikit memiliki perusahaan pertanian masing-masing satu perusahaan pertanian. Secara keseluruhan jumlah perusahaan pertanian pada tahun 2013 sama dengan pada tahun 2003, sebanyak 48 unit.

Komunitas Berkebun, Petani Modern Harapan Jakarta

Gairah berkebun mulai tumbuh pada golongan menengah kota Jakarta. Mereka adalah kelompok masyarakat yang terdidik dengan kesadaran kesehatan pangan dan lingkungan yang tinggi. Beberapa komunitas membangun jaringan melalui media sosial, misalnya dengan tagar #RawatKebun – JktBerkebun, @akademiberkebun.

Satu komunitas yang cukup luas adalah “Indonesia Berkebun” dengan jargon “*Urban Farming Act for Community Empowerment*”. Komunitas ini telah bergerak di 27 kota. Mereka melakukan sosialisasi publik berkenaan dengan *optimize non-productive land*, dan napasnya adalah pada *provide food security and empower people via both social media and on-field real action*.

Program berkebun di perkotaan yang dikenal sebagai *Urban Farming* diusung tidak sekedar untuk menjadi hobi dan gaya hidup, namun sudah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi guna mengantisipasi permasalahan tingginya populasi penduduk dan ancaman krisis pangan dan gizi di tahun 2050. Mereka berharap bisa berkontribusi mengurangi risiko kekurangan gizi masyarakat Indonesia.

Sepak terjang dari gerakan *Urban Farming* banyak memasuki segmen-segmen penting di perkotaan. Antara lain segmen institusi, *ruang publik*, area komersial dan kelompok-kelompok masyarakat (komunitas) yang kebanyakan dari mereka memang masih belajar berkebun. Misalnya, program Marunda Hijau, yang berupaya menyokong gizi masyarakat melalui sayuran segar dan sehat.

Gerakan *Urban Farming* juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Komunitas ini juga turut serta pada acara tahunan seperti

FLONA dan Festival Buah dan Bunga Nusantara 2015 sebagai ajang pengenalan produk *personal pouch Urban Farming* dan edukasi masyarakat.

Program *Urban Farming melalui Demplot Competition Challenge* bersama komunitas Indonesia Berkebun dijalankan dengan segmeri Jakarta Berkebun, Bekasi Berkebun, Depok Berkebun, Cikarang Berkebun, Banten Berkebun, Bogor Berkebun, Untirta Berkebun, dan UI Berkebun. Di dalam tantangan ini, setiap tim diwajibkan menyiapkan lahan dengan desain dan kreativitas masing-masing.

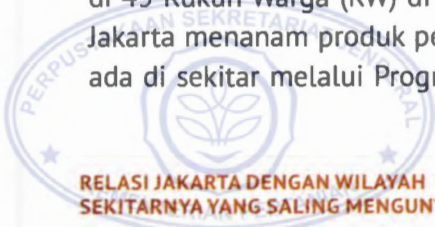
Di samping tujuannya percontohan yang bisa diterapkan di lingkungan perkotaan, kegiatan tersebut juga menyimulasikan bahwa dengan lahan yang terbatas bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi melalui beberapa jenis sayuran untuk satu keluarga.

Selain itu, Tim *Urban Farming* juga membuka wahana percontohan kegiatan berkebun di perkotaan melalui acara *Urban Farming Expo*. Tim mendesain sedemikian rupa lahan kosong menjadi contoh agar para masyarakat bisa langsung mendapat gambaran dan memutuskan bagaimana cara memanfaatkan lahan yang tidak terpakai di sekitar lingkungannya untuk kegiatan berkebun secara efisien, benar dan indah.

Kegiatan itu juga menyajikan program pelatihan bagi pengunjung yang ingin mengetahui bagaimana cara menyemai benih, memindah semaian tanaman ke lahan dengan tepat dan benar, serta pemanfaatan sayuran untuk parcel. Harapan ke depan, pengunjung *Urban Farming Expo* tertantang untuk langsung mencoba ilmu dan ketrampilan yang didapat dan diaplikasikan ke lahan di sekitar rumah mereka.

Selain itu, terobosan baru dalam gerakan *Urban Farming* telah diluncurkan melalui aplikasi *android Urban Farming Indonesia*. Aplikasi ini adalah wahana interaksi tanya-jawab seputar kegiatan berkebun di perkotaan dari mulai menanam hingga memanen.

Pada Maret 2017, gerakan Turun Tangan mengenalkan *Urban Farming* di 45 Rukun Warga (RW) di Jakarta. Aksi ini untuk mengajak masyarakat Jakarta menanam produk pertanian dengan memaksimalkan lahan yang ada di sekitar melalui Program RW Menanam. RW Menanam merupakan



inisiatif sederhana untuk mengkampanyekan gerakan menanam kepada masyarakat ibukota dengan memanfaatkan pekarangan yang minimal. Jenis tanamannya adalah sayur-sayuran yang cepat, tumbuh seperti sawi, kangkung, cabai, dan tomat.

Pemda pun melakukan Gerakan Turun Tangan karena melihat adanya peluang untuk memaksimalkan lahan tersebut menjadi kebun pertanian perkotaan melalui program “RW Menanam”. Dalam program ini peserta mendapatkan bantuan bibit tanaman dan peralatannya secara gratis. Selain itu, peserta diberikan pelatihan cara menanam dengan teknik hidroponik, *polybag*, dan vertikultur serta cara merawat tanaman agar sehat.

Berharap pada Potensi Wilayah Sekitar Jakarta

Kementerian Pertanian saat ini tengah menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan pangan di Jakarta. Pasokan utama melibatkan daerah-daerah yang berada di sekitar Jakarta, yaitu Provinsi Banten dan Jawa Barat. Untuk Menyangga Jakarta ini, Kementan sudah bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, BUMN, dan Kementerian Perdagangan.

Sinergi tersebut diwujudkan dalam bentuk fasilitas yang disediakan masing-masing kementerian. Kementerian Pertanian menyiapkan benih dan alsintan secara gratis. Perhutani dan Inhutani dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian BUMN menyediakan lahan. Untuk pinjaman dan kredit usaha rakyat (KUR) itu ada Bank BRI, Mandiri, BNI dan BTN.

Pemerintah akan menyiapkan lahan sebesar 200 ribu-300 ribu ha untuk program penyangga Jakarta tersebut. Pola yang akan diterapkan adalah integrasi antara hutan dengan komoditas-komoditas kebutuhan Jakarta seperti jagung, cabai, bawang, hingga sapi dan kambing. Strategi memilih kabupaten-kabupaten yang mengelilingi Jakarta sebagai penyuplai pangan untuk Jakarta diambil lantaran jarak yang dekat dari ibu kota negara, sehingga biaya transportasinya murah. Selain itu, iklim di daerah tersebut pun cocok untuk menjalankan program itu.

Karakter dan potensi pasokan pangan dari beberapa wilayah seputar Jakarta adalah sebagai berikut:

Wilayah	Karakter	Potensi pasokan pangan
1. Provinsi Banten	Sangat dekat ke Jakarta, dengan potensi sawah dan lahan kering	Tanaman palawija, seperti jagung
2. Provinsi Lampung	Memiliki karakteristik seperti pulau Jawa, dengan beragam potensi SDA dan masyarakat	Daging Jumlah ini adalah 90,50% dari seluruh rumah tangga pertanian pengguna lahan. Dari jumlah petani sebanyak 14.139 orang, yang bergelut di subsektor hortikultura paling besar yakni 5.853 orang. sapi, gula, dan minyak goreng
3. Bogor	Diuntungkan karena dekat dengan Jakarta	Sayuran dan buah-buahan (misalnya manggis)
4. Cianjur	Didominasi lahan kering dataran tinggi dengan produksi pertanian yang berkualitas	Beras premium, sayuran dan bunga
5. Bandung sekitarnya	& Mirip dengan Kabupaten Cianjur dengan beragam komoditas pertanian	Sayuran, daging ayam, dan telur ayam
6. Subang Karawang	& Didominasi lahan sawah dengan irigasi baik	Beras
7. Sukabumi		Ikan air tawar dan ikan laut
8. Bekasi Tangerang	& Memiliki keunggulan karena jarak yang sangat dengan Jakarta, dan memiliki keunggulan pada <i>non land base agricultural</i>	Daging sapi, daging ayam, telur ayam



BAB VI

INVESTASI DAN KELEMBAGAAN



Pengembangan wilayah penyangga Jakarta menjadi sebuah langkah penting dalam menjaga dinamika dalam hal produksi, konsumsi, dan harga yang terbentuk di Jakarta. Dalam aspek fisik, peran pasar Jakarta dan Jabodetabek sangat mempengaruhi perilaku harga beragam produk di Indonesia termasuk harga komoditas pertanian. Pada sisi lain, secara psikologis dinamika pasar Jakarta berpengaruh terhadap pasar produk di berbagai lokasi. Besarnya peran pasar Jakarta dan Jabodetabek ini juga terlihat dalam pembentukan inflasi nasional.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga dinamika pasar pangan di Jakarta, serta untuk menjaga harmonisasi dan sinergi Jakarta dan wilayah di sekitar Jakarta. Hal ini dilakukan pemerintah dalam upaya untuk:

1. Optimalisasi kinerja sektor pangan. Hal ini didasari keinginan untuk mencapai kinerja terbaik dari kegiatan yang memiliki nilai ekonomi pada sektor pangan di Jakarta, sehingga akan mendorong pertumbuhan sektor lain. Hal ini akan menciptakan sinergi berbagai komponen pembangunan Jakarta dalam mendukung terciptanya pertumbuhan.
2. Penciptaan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi sektor lain. Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Jika ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah yang produksinya meningkat, maka membuat produksi sektor lain juga meningkat. Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan antar sektor dan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan, sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor pangan.
3. Mendorong pertumbuhan daerah penyangga. Perkembangan Jakarta mempengaruhi kesinergian hubungan antara Jakarta dan daerah penyangga. Jakarta membutuhkan bahan baku dari wilayah penyangga dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah penyangga untuk dapat mengembangkan diri.

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila berbagai kebijakan pemerintah dalam pengembangan pertumbuhan Jakarta dan wilayah sekitar Jakarta dalam sebuah konsep yang terintegrasi dapat diterapkan

secara menyeluruh. Secara operasional, ide memenuhi pangan kota besar dengan membangun keterhubungannya dengan wilayah penyangga pada akhirnya membutuhkan kegiatan investasi yang berkelanjutan dan kelembagaan yang sesuai.

Investasi Pengembangan Wilayah Penyangga Mendukung Pangan Jakarta

Investasi merupakan usaha pembentukan modal guna memperoleh keuntungan, terutama dalam bentuk pendapatan atau bunga modal. Investasi adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah *output*.

Investasi biasanya ditujukan untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada. Sedangkan tujuan lainnya menyebutkan bahwa investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

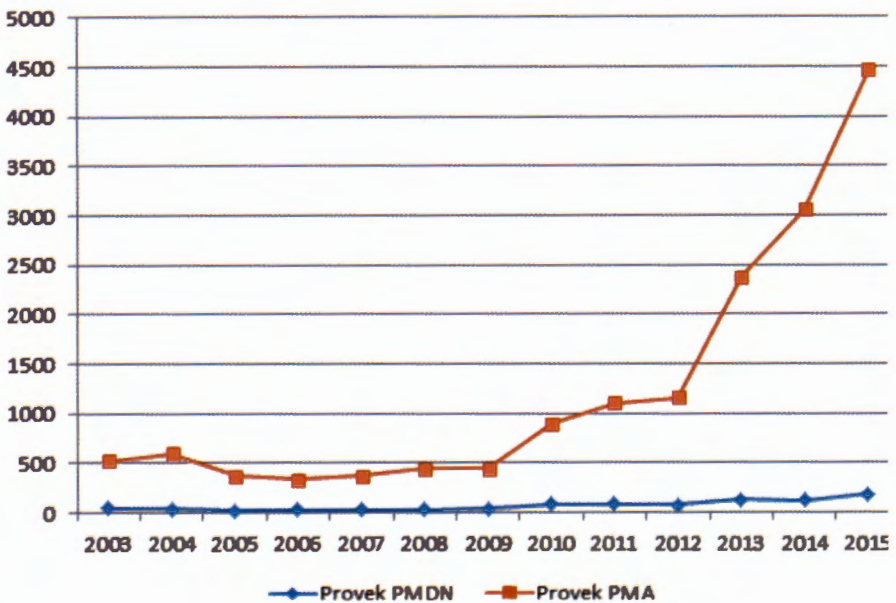
Dalam ekonomi makro, investasi merupakan pengeluaran masyarakat yang ditujukan untuk menambah stok modal fisik. Sementara itu dalam perhitungan pendapatan nasional dan statistik, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, bahan belum diproses, dan barang jadi.

Berdasarkan pelakunya, kegiatan investasi dibagi menjadi dua kategori yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Adapun menurut jenis investor, investasi dapat dibagi dalam dua kategori yaitu penanam modal individual dan penanam modal institusional. Penanam modal individual di sini adalah penanam modal perseorangan. Sedangkan penanam modal institusional adalah penanam modal yang sifatnya berkelompok atau suatu lembaga tertentu.

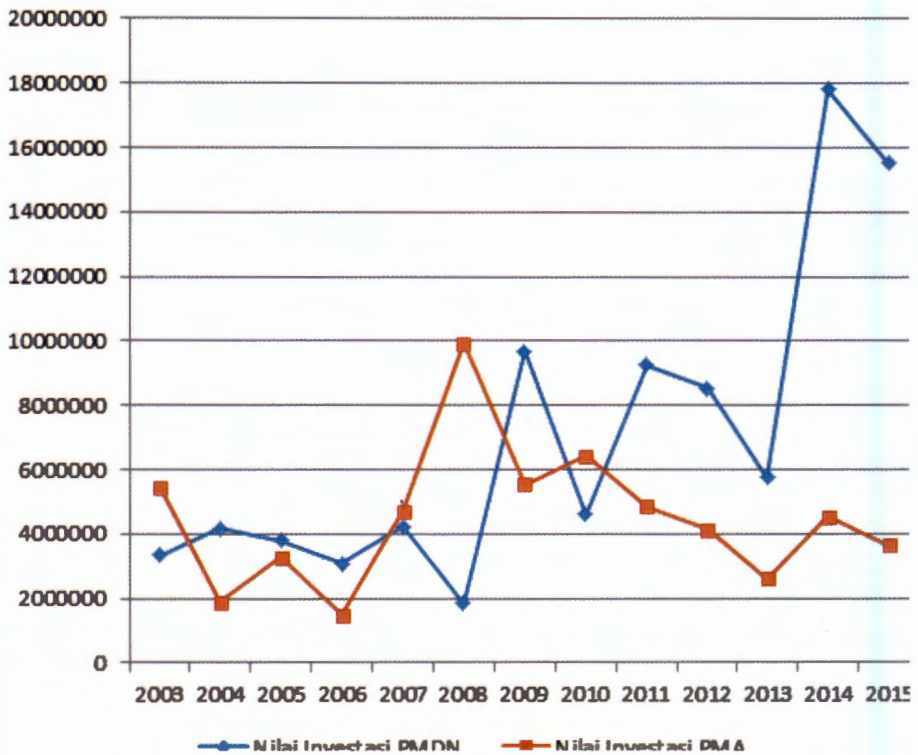
Investasi pada sektor pertanian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk model bisnis. Model bisnis merupakan cara sebuah unit usaha

mengelola sumber daya, kerja sama, dan hubungan pelanggan dalam upaya menciptakan dan mendapatkan nilai. Derajat inklusivitas diukur dari kepemilikan, suara, risiko, dan penghargaan yang dibagi antar mitra kerja. Dukungan pemerintah yang dapat diberikan antara lain dalam bentuk penyediaan peraturan, informasi, dan pelibatan kelompok.

Secara umum kegiatan investasi di Jakarta menunjukkan peningkatan. Berdasarkan jumlah proyek terlihat bahwa proyek PMA lebih tinggi dari jumlah proyek PMDN (Gambar 1). Berdasarkan nilainya terlihat bahwa sejak 5 tahun terakhir didominasi PMDN (Gambar 2).



Gambar 6.1. Perkembangan Jumlah Proyek Investasi



Gambar 6.2. Perkembangan Nilai Investasi

Perubahan iklim dan preferensi konsumen terhadap pangan, serta persaingan antara pangan dan energi diduga akan mempengaruhi prospek investasi di bidang pertanian. Kondisi iklim diperkirakan mampu mendorong investasi domestik maupun asing, karena berbagai negara akan merekonstruksi program pengembangan komoditasnya.

Peluang pasar dan kebutuhan penanaman modal di sektor pertanian masih terbuka luas, namun bagi Jakarta investasi tidak akan secara otomatis terbangun. Posisi Jakarta yang merupakan wilayah perkotaan membuat kegiatan pertanian menjadi terbatas. Karena itu, pendekatan model kluster industri dengan mengintegrasikan keterkaitan dengan wilayah di sekitar Jakarta dapat memperkuat keunggulan kompetitif di bidang agribisnis.

Perkembangan berbagai indikator perekonomian DKI Jakarta pada awal tahun 2017 menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi Ibukota. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin baik. Bahkan pada triwulan I 2017 dapat tumbuh sangat tinggi akibat adanya dampak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan gencarnya pembangunan konstruksi proyek infrastruktur pemerintah. Kondisi ekonomi yang berkembang dengan diiringi terkendalinya inflasi di ibukota diharapkan dapat terus mendukung berlanjutnya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

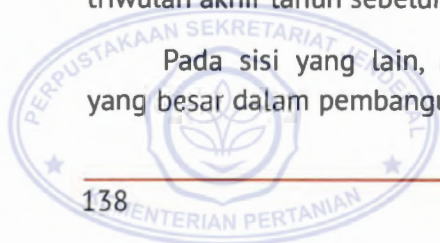
Berbagai dukungan pada tingkat nasional telah diberikan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi. Namun tetap mengutamakan kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan. Bahkan Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga BI *7-day Reverse Repo Rate*, yang pada medio akhir tahun lalu telah dilakukan pelonggaran dengan menurunkan suku bunga sebanyak dua kali.

Kebijakan ini diharapkan akan semakin memperkuat penerapan berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai hal ini diharapkan dapat semakin mendorong optimisme masyarakat, sehingga perekonomian nasional dan berbagai wilayah terus menguat.

Setelah sempat melambat pada triwulan IV 2016 dengan realisasi 5,51% (yoy), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta kembali menguat pada triwulan I 2017 menjadi 6,48% (yoy). Menguatnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari pengaruh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mendorong pertumbuhan konsumsi, khususnya Konsumsi Lembaga Publik yang melayani Rumah Tangga (LNPR).T).

Pelaksanaan pilkada juga mendorong pertumbuhan konsumsi rumah pada triwulan awal tahun yang cukup baik meskipun bersifat terbatas, mengingat tren pertumbuhan konsumsi rumah tangga awal tahun yang secara umum mengalami perlambatan dibandingkan periode triwulan akhir tahun sebelumnya.

Pada sisi yang lain, arus investasi juga memberikan pengaruh yang besar dalam pembangunan ekonomi. Terutama investasi bangunan



melalui akselerasi berbagai proyek konstruksi dan infrastruktur yang dikerjakan Pemerintah Pusat dan Provinsi di Jakarta.

Secara keseluruhan, target investasi DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 55 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta optimistis dapat mencapai karena hingga Juli 2017 realisasi investasi sudah mencapai Rp 48,6 triliun.

Selama semester I 2017, DPMPTSP DKI Jakarta melakukan pelayanan PTSP sebanyak 2,8 juta layanan perizinan dan non perizinan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 54% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebanyak 98 jenis dan telah diluncurkan 38 jenis layanan izin baru. Selama Januari-Juni 2017, perizinan DKI Jakarta telah terselesaikan 244 izin dan non perizinan, kota/kabupaten 20.758 perizinan dan non perizinan, kecamatan 9.465 perizinan dan non perizinan serta kelurahan 107.855 perizinan dan non perizinan.

Berbagai inovasi layanan telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai target investasi. Di antaranya, antar jemput izin bermotor (AJIB), mobil AJIB, Tanya PTSP 1500-164, antrean daring, tanda tangan elektronik, jasa arsitek gratis untuk bangunan rumah tinggal dengan luasan di bawah 200 m² dan IMB 3.0.

Tekanan inflasi di DKI Jakarta pada awal tahun 2017 masih terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan capaian inflasi pada triwulan I 2017 sebesar 3,43% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi rata-rata lima tahun sebelumnya pada kisaran 5,7% (yoy). Terjaganya inflasi di DKI Jakarta dipengaruhi harga pangan yang secara umum tetap terkendali, sejalan dengan terjaganya kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi.

Investasi pada sektor pertanian, sebagai sebuah kegiatan penggunaan modal untuk menciptakan nilai tambah, merupakan salah satu penggerak utama proses pembangunan perekonomian nasional. Realisasi investasi sektor pertanian masih merupakan bagian kecil dari total penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun swasta dan asing. Rendahnya investasi pada sektor pertanian didominasi

alasan tingginya tingkat risiko yang dihadapi. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap kinerja pembangunan pangan dan pertanian.

Pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta akan terus mengalami peningkatan apabila kegiatan investasi, terutama yang terkait pembangunan infrastruktur oleh pemerintah mampu mendorong pertumbuhan dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Bagi wilayah yang tidak berperan sebagai produsen pangan, perdagangan antar daerah neto yang juga meningkat akan turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi yang lain, kegiatan investasi juga akan mendorong pelaksanaan pembangunan di Jakarta, khususnya pengembangan pangan dan pertanian yang melibatkan daerah penyangga. Investasi yang dapat dilakukan meliputi, investasi baru, investasi peremajaan, investasi rasionalisasi, investasi perluasan, investasi modernisasi, atau investasi diversifikasi. Investasi tersebut dapat mendorong pembangunan Jakarta.

Kegiatan investasi dalam pelaksanaan pemenuhan pangan Jakarta yang melibatkan berbagai investor, pada akhirnya bukanlah merupakan sebuah satu-satunya tujuan. Memastikan investasi berlangsung secara kesinambungan adalah tugas selanjutnya. Berbagai faktor perlu dipastikan bagaimana penerapannya di lapang.

Menarik investasi pada kegiatan pertanian juga dipengaruhi dari kebijakan di luar sektor pertanian yang meliputi kebijakan makro ekonomi dan kebijakan sektoral. Kerangka kebijakan bagi investasi pangan dan pertanian menurut OECD (2013) meliputi, kebijakan investasi, promosi dan fasilitasi investasi, pembangunan infrastruktur. Selain itu, kebijakan perdagangan, pengembangan sektor finansial, pengembangan inovasi dan SDM, kebijakan pajak, manajemen risiko, etika bisnis, serta lingkungan. Aspek tersebut akan terus menjadi perhatian Kementerian Pertanian dalam membangun sinergi dengan kementerian dan lembaga lain.

Selain berbagai inovasi layanan, pengelolaan risiko investasi juga perlu mendapat perhatian untuk menjaga kesinambungan pengembangan pangan dan pertanian di Jakarta. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat memperkirakan dampak jika risiko

terjadi, membuat keputusan yang tepat mengenai dampak yang telah diperkirakan, mengimplementasikan program penanggulangan risiko tersebut, serta secara kontinu melakukan pengukuran dan perkiraan apakah program yang telah dijalankan sudah berjalan efektif atau masih membutuhkan perbaikan.

Pengelolaan risiko dilakukan baik terhadap risiko non sistematis (*unsystematic risk*) maupun risiko sistematis (*systematic risk*). Risiko non sistematis terdiri dari, risiko bisnis (*business risk*), risiko finansial (*financial risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko cidera janji (*default risk*) dan risiko negara (*country risk*). Risiko sistematis meliputi, risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko nilai tukar mata uang (*exchange risk*), risiko pasar (*market risk*), dan risiko inflasi (*inflation risk*).

Kelembagaan untuk Mendorong Kesinergian Jakarta dengan Wilayah Penyangga

Berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan pemerintah DKI Jakarta telah memberikan berbagai perbaikan kondisi. Secara ekonomi, dari sisi kesejahteraan, pembangunan di Jakarta berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduknya. Hal tersebut terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 sebesar 79,6 atau setara dengan status “Tinggi”. Capaian IPM tersebut bahkan mendekati status “Sangat Tinggi” dengan indeks 80,0.

Perbaikan IPM terutama didorong dimensi standar hidup layak, yang tercermin dari membaiknya pengeluaran per kapita masyarakat. Di samping itu, kemampuan belanja masyarakat membaik, yang didukung meningkatnya pendapatan yang diperoleh kelompok masyarakat kelas menengah. Membaiknya kesejahteraan masyarakat Jakarta yang didorong perkembangan ekonomi ibukota juga ditunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih dalam tren menurun.

Mengiringi perkembangan perekonomian Jakarta tersebut, kondisi stabilitas sistem keuangan ibukota pada triwulan I 2017 masih terjaga. Hal ini didukung kinerja cukup baik pada kinerja korporasi dan rumah



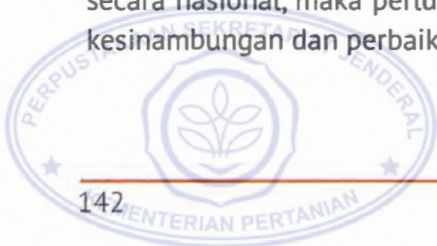
tangga. Kinerja korporasi ditopang pertumbuhan sektor-sektor utama DKI Jakarta yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan, *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan. Semua itu sejalan dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan-perusahaan besar di ibukota.

Di sisi lain, kondisi rumah tangga juga cukup baik dan dinilai cukup mampu untuk menghadapi tekanan inflasi selama beberapa bulan ke depan. Selain itu, besarnya dana pihak ketiga yang dimiliki sektor rumah tangga DKI Jakarta memberikan keleluasaan gerak bagi Perbankan untuk menjalankan fungsi intermediasinya.

Pada sisi sistem pembayaran, aktivitas transaksi keuangan masyarakat baik secara tunai maupun nontunai mengalami sedikit perlambatan, sehingga menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga bersifat terbatas. Dari sisi transaksi tunai, perlambatan terlihat dari *net outflow* aliran uang tunai yang lebih rendah dibandingkan akhir tahun lalu. Sedangkan dari sisi nontunai juga terlihat dari perlambatan transaksi yang menggunakan sistem kliring nasional.

Pencapaian yang telah diperoleh pemerintah DKI Jakarta memberikan sebuah catatan terkait dengan bagaimana kesinambungan pembangunan tersebut di masa yang akan datang. Dalam kondisi demikian, perlu dibangun sebuah sistem kelembagaan yang memungkinkan berbagai program yang telah dijalankan dapat terus diperbaiki dan diterapkan pada masa mendatang. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah isu pemenuhan kebutuhan pangan di Jakarta.

Secara lebih spesifik, program pertanian di DKI Jakarta dijalankan melalui berbagai terobosan. Pertanian di lahan sempit dan pelibatan daerah penyangga dalam sebuah rantai pasok merupakan sebagian dari program yang digagas untuk mendukung pembangunan ekonomi DKI Jakarta. Mengingat peran strategis stabilitas pangan di Jakarta akan menjaga stabilitas wilayah ibukota dan juga memberikan pengaruh secara nasional, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk menjaga kesinambungan dan perbaikan yang terus menerus.



Program pertanian di lahan sempit pemukiman warga telah diujicobakan di sebanyak 66 lokasi yang berada di banyak kelurahan hingga tahun 2015. Program pertanian kota ini dijalankan dengan memanfaatkan gang-gang sempit, pekarangan rumah warga hingga lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Program pertanian kota lahan sempit dikembangkan sesuai dengan kondisi iklim dan agroklimat daerah di DKI Jakarta.

Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian telah banyak menghasilkan inovasi teknologi yang terkait dan mendukung pertanian perkotaan. Misalnya, teknologi budidaya sayuran dengan sistem vertikultur, hidroponik, aeroponik, dan vertiminaponik. Selain itu juga telah dikembangkan pembuatan media tanam dan pupuk organik berbasis pemanfaatan sampah rumah tangga warga yang sudah dimanfaatkan masyarakat luas.

Di lokasi percontohan, dilakukan sosialisasi cara membuat kebun bibit dan demonstrasi plot serta mempraktikkannya di tingkat rumah tangga. Melalui program pertanian kota lahan sempit ini, mampu meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat menjadi lebih bergizi, aman dan seimbang.

Kegiatan pemanfaatan lahan juga dilakukan untuk tanaman perkebunan. Gerakan perkebunan dan pertanian di Jakarta juga telah dilakukan organisasi Indonesia Berkebun yang menciptakan gerakan berkebun di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya di Jakarta, dengan nama Jakarta Berkebun. Indonesia Berkebun berusaha memanfaatkan lahan terlantar untuk dijadikan lahan produktif. Caranya, dengan menanam tanaman pangan dan sayuran, sehingga tanah yang tadinya rusak bisa subur kembali dan mampu meresap air hujan dengan cepat.

Selain program yang dilakukan di Jakarta, pemerintah juga melakukan program yang melibatkan daerah penyangga dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan. Dari sisi peraturan bahwa wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bagian kawasan strategis nasional, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terpadu

dengan kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada pasal 2 menyebutkan tujuan penataan ruang wilayah nasional adalah untuk mewujudkan:

1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah.

Kementerian Pertanian telah mencanangkan program produksi jagung dengan menunjuk sepuluh kabupaten yang ditunjuk untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kesepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang dan Karawang. Diharapkan 200.000-300.000 ha dapat disiapkan untuk memenuhi kebutuhan Jagung di DKI Jakarta.

Pada tahap awal 10 kabupaten ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Jagung di DKI Jakarta. Jagung hasil produksi dalam negeri memiliki kualitas yang tidak kalah dari jagung impor. Selama kurun 2 tahun ini impor jagung telah mengalami penurunan. Keberhasilan ini juga diapresiasi Presiden RI yang disampaikan saat menghadiri perhelatan Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XV-2017 di Aceh yang berlangsung

6 Mei 2017 atas kinerja Kementan mengurangi impor jagung sebanyak 66%.

Pembangunan pertanian sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta juga dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Wilayah sekitar Jakarta dan Jakarta terintegrasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Ibukota Negara yang memiliki keterkaitan dan interaksi antar wilayah dalam kerangka pengembangan perekonomian.

Pengembangan kawasan akan memberikan hasil perbaikan perekonomian yang optimal apabila terdapat kesesuaian dalam proses interaksi yang efektif antara Jakarta sebagai pusat konsumsi dan wilayah sekitar Jakarta sebagai sumber komoditas unggulan atau pusat produksi. Implementasi pengembangan kawasan dapat dilaksanakan secara utuh, sistematis, terintegrasi atau terpadu, terkoordinasi dan terkelola dengan baik.

1. Secara operasional efektivitas keterkaitan Jakarta dan wilayah sekitarnya mensyaratkan beberapa kondisi (Setyanto et al., 2016) yaitu:
2. Setiap kawasan harus memiliki spesialisasi dan kompetensi inti dalam pengembangan komoditas unggulan masing-masing.
3. Terdapat kegiatan subsektor hulu dan hilir yang dapat menjadi pendorong pengembangan komoditas unggulan yang memiliki kemampuan daya saing.
4. Mempunyai keterkaitan antara pengembangan subsistem usaha tani komoditas dengan subsistem agribisnis hulu dan hilir, serta penunjangnya.
5. Memiliki fokus pengembangan kepada produk yang memiliki nilai tambah dan kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.
6. Memiliki fokus pengembangan kepada produk yang berdaya saing dan berorientasi pada pasar regional, nasional dan ekspor dalam rangka swasembada, swasembada berkelanjutan maupun ekspor.
7. Memiliki kesinergian antarprogram, antarkawasan dan antarwilayah.
8. Perlunya peran pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator.

9. Perlunya dukungan penempatan kawasan komoditas unggulan dalam tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pemenuhan pangan Jakarta, membutuhkan berbagai strategi, mengingat peran Jakarta dan dinamika yang mempengaruhinya. Kementerian Pertanian terus berupaya mendorong pemenuhan pangan Jakarta melalui berbagai terobosan dalam beberapa hal. Misalnya, pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerja sama, serta peningkatan kapasitas distribusi pangan. Pada tataran yang lebih luas, pembangunan sistem cadangan pangan, peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan, juga akan menjadi perhatian pada masa mendatang.

Dalam upaya mewujudkan pemenuhan pangan Jakarta, Kementerian Pertanian telah mengawali dengan menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan, selain juga bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mendukung keterkaitan Jakarta dan wilayah sekitarnya. Berbagai kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi, kebijakan pada daerah sekitar Jakarta, kebijakan pada daerah Jakarta, kebijakan berbasis wilayah, dan kebijakan impor (Gambar 3).



Gambar 6.3. Kebijakan Mendukung Penyediaan Pangan bagi Jakarta

1. Kebijakan pada daerah sekitar Jakarta

Kebijakan pada daerah sekitar Jakarta yaitu kebijakan pengembangan agribisnis. Kebijakan pengembangan agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat berlangsung secara produktif. Selain itu menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Tujuan kebijakan ini adalah mengembangkan subsistem hulu, subsistem *on-farm*, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang sebagai suatu kesatuan sistem yang sinergis. Sasaran kebijakan adalah berkembangnya semua subsistem agribisnis secara serasi dan seimbang, dan usaha-usaha agribisnis (Saragih, 2001).

2. Kebijakan pada daerah Jakarta

Kebijakan diarahkan kepada dukungan penyediaan input produksi serta distribusi dan pemasaran produk pertanian.

3. Kebijakan dan pendekatan berbasis wilayah

Kebijakan berbasis wilayah ditujukan kepada terciptanya kebijakan integratif, terciptanya pendekatan partisipatif, dan terbangunnya manajemen rantai pasok untuk membangun aliran sumber daya dan produk yang efisien.

4. Kebijakan Impor

Kelangkaan produk yang kemudian menyebabkan terjadinya lonjakan tajam harga bahan pangan memberikan dampak yang besar bagi konsumen miskin dan juga bagi produsen kecil pengguna komoditas sebagai bahan baku. Kebijakan untuk mengelola dampak peningkatan harga dirancang dengan tiga tujuan utama yakni, hanya melindungi penduduk yang rentan, menciptakan dan mempertahankan insentif bagi produsen dan tersedianya dana yang cukup untuk membiayai keberlangsungan kebijakan tadi.

Terdapat tiga kebijakan perdagangan terkait dengan kebijakan impor yaitu pengenaan tarif impor (bea masuk), penetapan kuota

impor, dan pemberian hak monopoli impor atau pembatasan terhadap jumlah importir.



Gambar 6.4. Sistem Operasional Pemenuhan Pangan Jakarta.

Pada akhirnya setelah sebuah lokus ditetapkan keterhubungannya dengan Jakarta dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan, diperlukan sebuah sistem operasional yang memungkinkan tercapainya tujuan tersebut. Kebijakan berbasis wilayah diarahkan kepada terciptanya kebijakan integratif, terciptanya pendekatan partisipatif, serta terbangunnya manajemen rantai pasok untuk membangun aliran sumber daya dan produk yang efisien.

Kebijakan Integratif

Kebijakan integratif mendorong terjalannya pendekatan terpadu dan terintegrasi antara Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kegiatan pengembangan kawasan dilaksanakan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar wilayah. Struktur kebijakan yang terintegrasi merujuk kepada Sistem Pertanian-Bioindustri Terpadu merupakan kebijakan yang mendukung totalitas atau kesatuan kinerja pertanian terpadu. Terdiri dari:

1. Subsistem sumber daya insani dan IPTEK
2. Subsistem pertanian terpadu hulu yang berupa kegiatan ekonomi *input* produksi, informasi, dan teknologi

3. Subsistem tata ruang yang berupa pengaturan tata ruang kegiatan pertanian secara terpadu
4. Subsistem usaha pertanian agroekologi
5. Subsistem pengolahan bioindustri
6. Subsistem pemasaran, baik pemasaran domestik maupun global
7. Subsistem pembiayaan, baik melalui perbankan maupun non perbankan
8. Subsistem infrastruktur dari hulu sampai hilir, yaitu dukungan sarana dan prasarana berbasis perdesaan
9. Subsistem legislasi dan regulasi, berupa aturan-aturan yang memaksa keterpaduan pembangunan sistem pertanian terpadu secara nasional.

Kementerian Pertanian terus mendorong terciptanya kebijakan peningkatan kesinergian yang ditunjukkan dalam bentuk kebijakan dukungan pengembangan dan kebijakan mendukung peningkatan keunggulan komparatif wilayah sekitar Jakarta. Untuk penyediaan lahan, implementasi pengembangan wilayah penyangga, Kementan bekerja sama dengan Kemen LHK dan BUMN, khususnya Perhutani.

Di sepuluh wilayah penyangga pangan DKI Jakarta, terdapat sekitar 1.031.283 ha lahan potensial untuk perluasan areal tanam jagung. Terdiri dari lahan Perhutani seluas 84.376 ha dan lahan non Perhutani, seperti lahan perkebunan, lahan kering telantar dan kebun campuran, luasnya 946.907 ha.

Pada sisi yang lain, dukungan terhadap peningkatan modal dan kapasitas SDM yang terlibat dalam pemenuhan pangan Jakarta juga mendapat perhatian. Kementerian Pertanian menyadari pentingnya sumber kapital dan penggerak sumber daya lain, sumber inovasi dan invensi, sumber pengembangan teknologi, sumber peningkatan kewirausahaan, sumber perbaikan etos kerja, serta sumber perbaikan berkelanjutan berbasis *know how* dan teknologi maju. Sumber-sumber tersebut sebagai faktor yang akan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian pemenuhan Pangan Jakarta.

Pendekatan Partisipatif

Untuk mendorong keberlanjutan kawasan komoditas yang telah ditetapkan, perlu ditumbuhkan rasa memiliki seluruh wilayah dan pemangku kepentingan yang terkait. Untuk itu, seluruh pihak terkait perlu dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. Partisipasi dana dari berbagai pihak (APBD, swasta dan masyarakat) juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan sinergi dan dampak dari kegiatan pengembangan kawasan.

Manajemen Rantai Pasok

Integrasi wilayah dalam kerangka produksi dan pemasaran membutuhkan sebuah pendekatan pada meso level yang diperlukan sebuah manajemen rantai pasok. Pada konteks pelaku, integrasi wilayah sekitar Jakarta dan Jakarta terlibat pelaku utama yaitu pemasok (*supplier*), pengolah (*manufacturer*), pendistribusi (*distributor*), pengecer (*retailer*), dan pelanggan (*customer*).

Manajemen rantai pasok merupakan pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Tujuannya adalah membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan.

Manajemen rantai pasok merupakan serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan pelaku secara efisien sehingga produk dihasilkan dapat didistribusikan dengan kuantitas, tempat, dan waktu yang tepat untuk memperkecil biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Dalam konteks sumber daya dan produk, terdapat tiga elemen yang harus dikelola dalam integrasi wilayah sekitar Jakarta dan Jakarta untuk mencapai tujuan. *Pertama*, aliran barang dari hulu ke hilir. *Kedua*, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. *Ketiga*, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya.

Terkait dengan pasokan pangan dan gejolak harga yang sering kali terjadi di kota besar, khususnya Jakarta, Kementerian Pertanian telah memberikan solusi untuk mengamankan pangan Jakarta. Dengan menerapkan kebijakan integratif dan konsep pembangunan berbasis kawasan dengan pendekatan rantai pasok, kebutuhan pangan pokok masyarakat kota Jakarta diharapkan dapat dipenuhi dari wilayah yang berbatasan dengan kota Jakarta (Gambar 5).



Gambar 6.5. Program Pemenuhan Kebutuhan Pangan Jakarta

Dalam aspek **kebijakan integratif**, sebagai tindak lanjut terlaksananya pemenuhan kebutuhan jagung masyarakat Jakarta, Kementerian Pertanian telah bekerja sama dengan Kementerian dan lembaga terkait lainnya. Untuk penyediaan lahan Kementan bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dan BUMN dalam hal ini Perhutani. Kementerian Pertanian menjalin kerja sama dengan Bank Mandiri, BTN, BRI dan BNI dalam upaya penyediaan anggaran kredit.

Dalam aspek **kebijakan sistem produksi yang berbasis manajemen rantai pasok**, Kementerian telah melakukan berbagai terobosan. Penyerapan hasil produksi petani dilakukan dengan membangun sinergi antara Kementerian Pertanian dengan Bulog dan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT).

Dalam sisi produksi, Kementerian Pertanian membangun embung desa bersinergi dengan Kementerian Desa dan PDT. Selain itu juga dilakukan penyediaan alsintan, benih unggul, dan pompa oleh Kementerian Pertanian yang diberikan secara gratis kepada kabupaten yang mendukung pemenuhan kebutuhan pangan Jakarta.

Keberlanjutan menjadi perhatian Kementerian Pertanian pada program pemenuhan pangan Jakarta. Jika program pemenuhan pangan, khususnya jagung berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta, maka komoditas lain seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan lainnya diharapkan dapat segera diluncurkan. Selain juga kemungkinan aplikasi program pada kota besar lain.

Untuk mendorong keberlanjutan kawasan komoditas yang telah ditetapkan, **pendekatan partisipatif** menjadi penting, yakni bagaimana terus meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki seluruh wilayah dan pemangku kepentingan yang terkait. Untuk itu, seluruh pihak terkait diupayakan dilibatkan secara aktif, mulai dari tahap perencanaan kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan yang ditetapkan Kementerian Pertanian.



EPILOG



Menyediakan pangan untuk Jakarta dari wilayah yang paling dekat, pada hakikatnya masih baru sebuah konsep. Dapat dikatakan, ini adalah serangkaian niat yang ingin diwujudkan Kementerian Pertanian ke depan. Saat ini memang baru sampai kepada mengumpulkan informasi, mengukur kemampuan, menyusun rencana.

Karena itu, pada bagian akhir buku ini, penulis akan menyampaikan catatan apa saja persiapan yang harus disusun agar peluang yang sangat besar ini bisa diwujudkan. Kementan dengan berbagai pihak terkait mestilah bergerak cepat menyusun langkah dan menjalankan program.

Jakarta harus Pro aktif

Dalam rangkaian acara World Food Day (WFD) Oktober 2016, Giuseppe Sala, Walikota Milan, Italia, menyatakan bahwa: *“Cities can and must turn policies often decided on a national and international level into practical applications”*. Pernyataan ini lalu ditimpali Direktur FAO Graziano da Silva, *“Local authorities have an important role to play in our global quest for sustainable development”*.

Jakarta harus aktif menyelesaikan urusannya sendiri. Ini sudah dilakukan Pemda Jakarta untuk pengendalian banjir dengan merangkul Pemda sekitar dalam kesatuan wilayah Bodetabekjur (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur).

Dalam konteks ini, Jakarta mesti berdiri berjajar bersama kota-kota besar dunia lain yang menghadapi masalah yang sama. Urbanisasi yang sulit dikendalikan, akan menjadikan 70% warga dunia akan tinggal di perkotaan di tahun 2050. Ini membutuhkan konfigurasi baru sosial ekonomi untuk menangani kebutuhan pangan dan keamanan gizi (*nutrition security*) warganya.

Tahun 2001, FAO telah meluncurkan inisiatif multidisiplin *“Food for the Cities”* dengan tujuan *“addressing the challenges that urbanization brings to the urban and rural population, as well as the environment, by building more sustainable and resilient food systems”* (*Food for the Cities Initiative: <http://www.fao.org/fcit/fcit-home/en/>*).

Konsep *city region food systems* (CRFS) merangkai sebuah jaringan yang kompleks antara aktor, proses, dan relasi untuk pangan berkaitan dengan produksi, *processing*, *marketing*, dan konsumsi. Pendekatan CRFS menyediakan solusi yang konkret berkenaan dengan relasi *rural-urban*. Tahun 2009 saja, gerakan ini telah memiliki 2.500 anggota yang tersebar di 114 negara di dunia.

Semua sudah mafhum bahwa Jakarta memiliki kemampuan yang besar, termasuk dari sisi PAD dan anggarannya. Karena itu, ide “Menyangga Pangan Jakarta!” ini akan lebih cepat berhasil jika Jakarta, baik pemerintah maupun swastanya, bergerak cepat terlibat langsung dalam pengembangan pangan di daerah penyangganya. Caranya tentu dengan menanamkan investasi, membangun usaha, mendampingi dan memperkuat pelaku pangan, serta memperkuat manajemen Pemda terkait.

Model untuk Direplikasi

Buku “Menyangga Pangan Jakarta!” ini bermaksud menyusun sebuah model. Ke depan, kota-kota besar di Indonesia dapat meniru pendekatan ini, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian.

Sebagai sebuah model, hal ini jauh dari sempurna. Daya replikasinya untuk kota-kota besar lain membutuhkan kreativitas para penyusun dengan mempertimbangkan tidak hanya kondisi sosial ekonomi pertaniannya (produksi, tata niaga, dan konsumsi), tapi juga pada kondisi sumber daya alam, infrastruktur, serta potensi sosiokultural masyarakat dan kapasitas pemerintah kota dan Pemerintah-Pemerintah Daerah di sekitarnya.

Bagaimana menyediakan pangan untuk Surabaya dengan murah, cepat, berkualitas dan berkelanjutan akan berbeda dengan di Medan dan Makassar.

“You never change things by fighting the existing reality.To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”

(R. Buckminster Fuller

– arsitek dan teoritikus sistem)

Terakhir, pola konsumsi sebagai penentu pasar pangan saat ini dan ke depan, semakin menjadi sebuah gaya. Konsumsi warga kota cepat berubah karena berbagai pengaruh, termasuk perubahan dari dalam masyarakatnya sendiri. Kota dan perubahan adalah dua sisi mata uang yang terus sejalan.

Perubahan dalam pola konsumsi, makanan yang disukai, dan cara memasaknya. Berbagai hal lain yang menyangkut makanan dan perilaku memakan itu sendiri merupakan sesuatu yang dinamis. Pertanian yang berada di bagian hulu harus bisa menangkap perubahan tersebut dan meresponsnya dengan cepat.

Karena itu, pada akhirnya, bagaimana menyediakan pangan untuk sebuah kota besar, adalah sebuah pengetahuan yang harus dibangun di atas teori dan dasar keilmiahan yang memadai.



UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan kepada:

Yulistiana Endah Utami, M.Sc, M.Phil

Lucas Suharyanto, M.Si

Adi Nurahmat, MM

Supriatningsih, S.Sos



Daftar Bacaan

Advances in Maritim Logistics and Supply Chain Systems, World Scientific Publishing Cp. Pte Ltd <http://worldscibooks.com>

An Agenda For Increasing Productivity, World Scientific Publishing Cp. Pte Ltd <http://worldscibooks.com>

Ariyanti, DS 2015, 'NTT Baru Penuhi 15% Kebutuhan Daging DKI', *Bisnis.com*, <<http://industri.bisnis.com/read/20150220/99/404757/ntt-baru-penuhi-15-kebutuhan-daging-dki>>.

Bank Indonesia. 2009. *Kajian Ekonomi Regional Jakarta*. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jakarta/Documents/341d00793881464a9211251af6828075box3.pdf>

Bapenas. 2011. *Strategi Utama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. www.kp3ei.go.id

Blanchard D, 2010. *Supply Chian Management Best Practices*, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc.Canada.

BPS 2015a, *Kepadatan Penduduk menurut Provinsi, 2000-2015*, Badan Pusat Satatistik, 3 Agustus 2017, <<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842>>.

BPS 2015b, 'Perdagangan Komoditas Strategis 2015', *Berita Resmi Statistik*, no. 15/12/Th. XIX, 1 Februari 2016

BPS 2016a, *Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2015*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

BPS. 2016. *Distribusi Perdagangan Komoditas Gula Pasir Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

BPS. 2016. *Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.



- BPS. 2016. *Jakarta Dalam Angka Tahun 2016*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS 2016b, 'Perdagangan Komoditas Strategis 2016', *Berita Resmi Statistik* no. 114/12/Th. XIX, 15 Desember 2016.
- BPS 2017, *Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas 2013-2017*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 25 Agustus 2017, <<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1102>>
- Brunn, S. D., M. H. Mitchell and DJ. Zeigler. 2016. *Cities of the World*, World Regional Urban Development 5th Edition. Rowman & Littlefield Publishers.
- Cordon C, et al, 2012, *Strategic Supply Chain Management*, Routledge, Taylor & Francis Group, New York and London.
- De Feranti et al, 2009, *How to Improve Governance, A New Framework for Analysis and Action*, Brookings Institute Press, Washington, DC.
- Detik. Com. 2016. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3276043/enggar-amran-dan-ahok-rapat-bareng-bahas-harga-pangan>.
- DKPKP 2017, *Luas Lahan Pertanian di Provinsi DKI Jakarta*, 3 Agustus 2017, <http://dkpkp.jakarta.go.id/potensi_sumber_daya>.
- Dubbeling M, Santini G, Renting H, Taguchi M, Lançon L, Zuluaga J, Paoli L, Rodriguez A and Andino V. 2017. *Assessing and Planning Sustainable City Region Food Systems: Insights from Two Latin American Cities*. *Sustainability* 2017, 9, 1455; doi:10.3390/su9081455
- Dubbeling M, Bucatariu C, Santini G, Vogt C and Eisenbeiß K. 2016. *City Region Food Systems and Food Waste Management: Linking Urban and Rural Areas for Sustainable and Resilient Development*.
- Fajriah, L.R. 2017. *Enam Langkah Strategis Pemerintah dan BI Jaga Inflasi 2017*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1174053/33/enam-langkah-strategis-pemerintah-dan-bi-jaga-inflasi-2017-1485329840>
- Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R. (2004). *Introduction to Logistics Systems Planning and Control*. England: John Wiley.

- Hill, M., 1997, *The Policy Process, A Reader, Second Edition*, Pearson Education Limited, Ediburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England.
- Jamal. E. 2006. 'Revitalisasi Pertanian dan Upaya Perbaikan Penguasaan Lahan di Tingkat Petani'. *Jurnal Analisis Sosial Volume. 11/No.1/2006*. AKATIGA. Bandung.
- Kurniawan, S 2017, 'Menyelami Lampung Sebagai Harta Karun Sumatera', *Marketeters*, <http://marketeters.com/menyelami-lampung-harta-karun-sumatera/>
- Kompas.com. 2017. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/05/10/160000026/mentan.harap.wilayah.penyangga.mampu.pasok.bahan.pangan.untuk.ibu.kota>
- Kompas. 2 September 2017. Sapi NTT Peran Ganda PD Dharma Jaya. Halaman 28 dalam kolom Metropolitan.
- Liu JJ, 2012, *Supply Chain Management and Transport Logistics*, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.
- March JG and JP Olsen, 1995. *Democratic Governance*, The Free Press, New York.
- MC Nabb, DE. 2009, *The New Face of Government, How Public Managers are Forging a new Approach to Governance*, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York.
- Merna T, Detlef VS. 2000. 'Risk Management of an Agricultural Investment in a Developing Country Utilising the CASPAR Programme.' *International Journal of Project Management* 18(2000): 349-360.
- Padovanu, E. and DW. Young, 212, *Managing Local Governments, Designing Management Control Systems that Deliver Value*, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York.
- Pemda DKI. 2017. Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Daerah. Indonesia.go.id
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012. Pemerintah Daerah

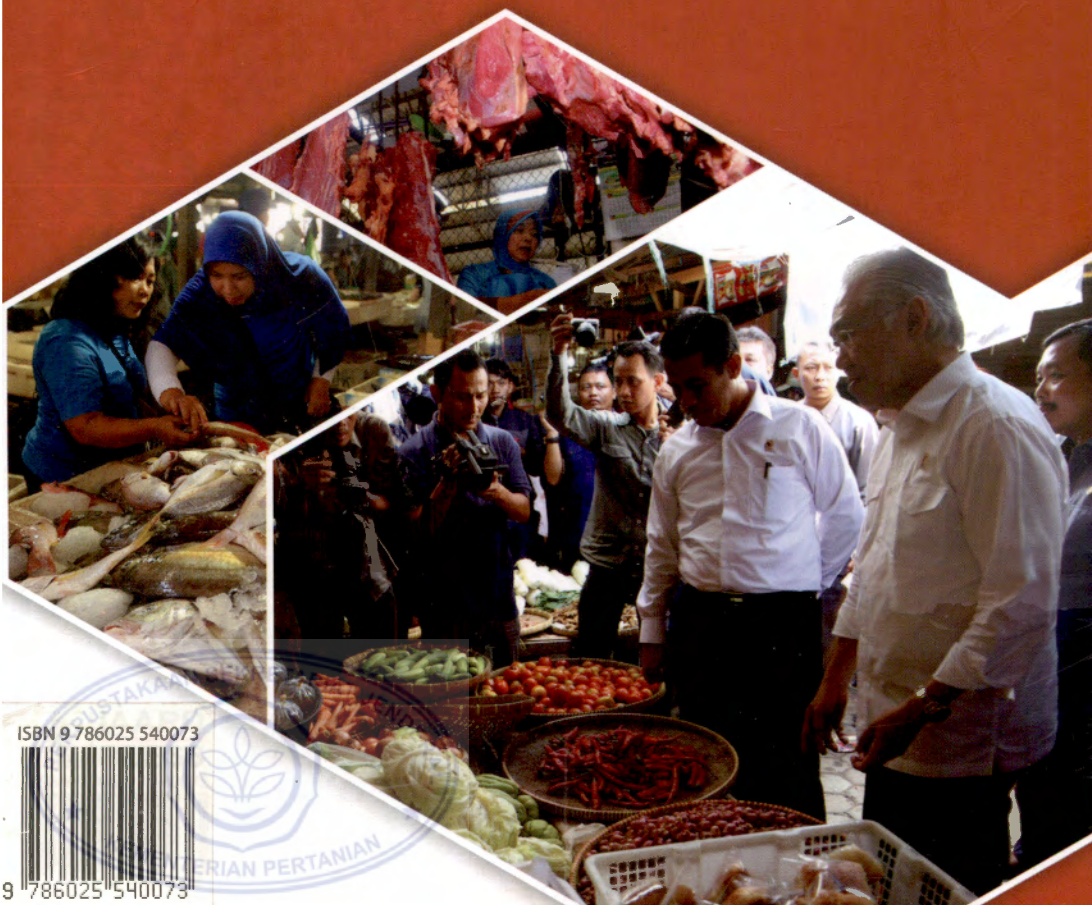
- Provinsi DKI Jakarta. Sumber Kekayaan Alam Jakarta. Jakarta.go.id
- Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
- Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
- Ribot, J. 2004. *Waiting for Democracy, The Politics of Choice in Natural Resources Decentralization*, World Resources Institute, Washington DC.
- Risk, Uncertainty And The Agricultural Firm*, World Scientific Publishing Cp. Pte Ltd <http://worldscibooks.com>
- Simatupang, TM., *Mari Memajukan Logistik Indonesia* www.supplychainindonesia.com , 7 Februari 2011;
- Supply Chain Management : *Concepts, Techniques and Practices*, World Scientific Publishing Cp. Pte Ltd <http://worldscibooks.com>
- Tempo. 2017. Menteri Amran Beberkan Strategi Penuhi Kebutuhan Pangan Jakarta. <https://www.tempo.co/read/news/2017/05/09/090873834/menteri-amran-beberkan-strategi-penuhi-kebutuhan-pangan-jakarta#1IFBp2dU06bGtoSY.99>
- Vermeulen S, Cotula L. 2010. *Making The Most of Agricultural Investment: a Survey of Business Models That Provide Opportunities for Smallholders*. FAO and IIED. Rome, Italy. 116p.
- Waters D, 2011, *Supply Chain Risk Management, Vulnerability And Resilience in Logistics*, The Chartered Institute of Logistics Transport (UK). Kogan Page, London Philadelphia-New Delhi.

MENYANGGA PANGAN JAKARTA



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Harsono RM No.3, Ragunan
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7811545
www.pertanian.go.id



ISBN 9 786025 540073



9 786025 540073

